14. Perhubungan

a. Prioritas urusan

Prioritas urusan perhubungan yang masuk ke dalam *dedicated program*, yaitu :

1) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum, kegiatan :
   - Survey capaian Standar Pelayanan Minimal Transjakarta Busway
   - Evaluasi Jaringan Pelayanan Angkutan Umum
   - Kajian Penyusunan SPM MRT Jakarta
   - Penyusunan Pedoman dan Perhitungan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) dan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC) LRT Jakarta Koridor 1 Fase 1 (Kelapa Gading - Velodrome)
   - Penyusunan Pedoman dan Perhitungan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) dan Penggunaan Prasarana Perkeretaapain (TAC) MRT Jakarta Koridor Selatan - Utara Fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI)
   - Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan LRT
2) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan, kegiatan :
   - Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Kepulauan Seribu
   - Pembangunan tanggul kolam labuh P.Untung Jawa
   - Pembangunan Tanggul dan kolam labuh pulau kelapa 02 RW 05
   - Pembangunan kolam labuh dan alur masuk pulau

kelapa

- Peningkatan dermaga Pulau sebira
- Pembangunan Tanggul dan dermaga sisi timur pulau pramukaProgram Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubungan
- Pelayanan Kapal Kepulauan Seribu (Kapal Patroli 1, Kapal Patroli 4, dan Kapal Kerja)
- Peningkatan Dermaga Pulau LancangPelayanan Angkutan Bus Sekolah

3) Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan, kegiatan :
    - Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Koridor Busway
    - Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Koridor Busway
    - Pelaksanaan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi
    - KMRLL Lalu Lintas di Koridor Busway
    - Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jakpus
    - Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jakpus
    - Pelaksanaan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota Administrasi Sudinhub Jakpus
    - Pelaksanaan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota Administrasi Sudinhub Jaktim
    - Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jaktim
    - Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jaktim

- Pelaksanaan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota Administrasi Sudinhub Jakbar
- Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jakbar
- Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jakbar
- Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jaksel
- Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jaksel
- Rekayasa Geometrik Ruang Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jaksel
- Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota Administrasi Sudinhub Jaksel
- Pelaksanaan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota Administrasi Sudinhub Jakut
- Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jakut
- Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jakut
- Penyusunan Pengembangan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik
- Pendampingan Oleh Tenaga Ahli Kegiatan UP Sistem Jalan Berbayar Elektronik

4) Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan, kegiatan :
   - Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Koridor Busway
   - Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Koridor Busway

- Pemilihan Abdi Yasa Teladan
- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi Angkutan Umum
- Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jakpus
- Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jakpus
- Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jaktim
- Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jaktim
- Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jakbar
- Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jakbar
- Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jaksel
- Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jaksel
- Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jakut
- Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway Sudinhub Jakut

b. Program dan kegiatan

Program provinsi Urusan Perhubungan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.133 Perbandingan Program Nasional dan Program ProvinsiUrusan Perhubungan

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
2	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan
3	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
4	Program Pembangunan Kereta Api Ringan	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
5	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
6	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
7	Program Pengembangan SDM Perhubungan	
Jml	**7**	**6**

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

Urusan Perhubungan pada Tahun 2018 dilaksanakan 6 program dan 406 kegiatan sebagai berikut.

Tabel 3.134
Program Urusan Perhubungan

No	Program	Jumlah Kegiatan
1	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum	15
2	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan	25
3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan	54
4	Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan	48

No	Program	Jumlah Kegiatan
5	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan	220
6	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	44
Jumlah		406

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Beberapa kegiatan dan hasilnya dalam Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.135 Realisasi Program Urusan Perhubungan

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum	15	15	100 %
2	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan	25	23	92 %
3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan	54	53	98 %
4	Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan	48	47	98 %
5	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan	220	220	100 %
6	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	44	44	100 %
Jumlah		406	402	99 %

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

Prasarana jalan di DKI Jakarta dikelompokkan dalam 6 jenis jalan, dengan total panjang 6.932 km dengan luas 48.3km^2.

Tabel 3.136
Panjang dan Luas Jalan Menurut Jenisnya

No	Jenis Jalan	Panjang (m)	Luas (m^2)	Status Jalan
1.	Tol			Tol
2.	Arteri Primer	100.457	2.073.227,30	Nasional
3.	Kolektor Primer			Nasional
4	Arteri Sekunder	344.161	4.871.916,20	Provinsi

5.	Kolektor Sekunder			Provinsi
6.	Lokal			Provinsi
Jumlah				

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta Tahun 2018 (Dinas Pekerjaan Umum seharusnya**)**

Tabel 3.137 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Perhubungan

N0	Jenis Pelayanan	Target	Realisasi	%
1.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	42,150,000,000	43,60,835,000	102.64
2.	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Perhubungan	14,500,000,000	10,467,087,500	72.19
3.	Retribusi Terminal	6,355,000,000	6,258,640,901	98.48
4.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1,350,000,000	1,454,428,500	107.74
5.	Retribusi Penyeberangan air	500,000,000	222,170,000	44.43
6.	Pendapatan Denda Restribusi Perijinan Jasa Umum	0	765,761.838	0
7.	Pendapatan Denda Restribusi Perijinan Jasa Usaha	0	758,782,240	0
		Jumlah	**62,428,923,739**	**96.26**

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan UKD serta UPT di bawahnya, dengan jumlah pegawai sebanyak 1.794 orang.

Tabel 3.138 Rekapitulasi Pegawai Dinas Perhubungan

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**		
	1. Golongan IV	46	
	2. Golongan III	564	
	3. Golongan II	1075	
	4. Golongan I	109	
B.	**Eselon**		
	1. Eselon I	-	
	2. Eselon II	1	
	3. Eselon III	23	
	4. Eselon IV	58	

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
	5. Eselon V	-	
	6. Jabatan Fungsional Tertentu	84	
	7. Jabatan Fungsional Umum	1628	
C.	**Pendidikan**		
	1. S3	-	
	2. S2	52	
	3. S1	258	
	4. Diploma	36	
	5. SLTA	1279	
	6. SLTP	141	
	7. SD	28	

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.139
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan Perhubungan

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	2	1	1	-	1
	Eselon III	25	23	23	4	23
	Eselon IV	60	58	58	26	58
Jumlah		87	82	82	30	82

Sumber : Dinas Perhubungan 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan :

- Tingkat Pendidikan : 82 / 82 = 100,00 %
- Diklat Kepemimpinan : 30 / 82 = 36,58 %
- Kepangkatan : 82 / 82 = 100,00 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Perhubungan Terdapat pada Dinas Perhubungan, Sudin dan UPT Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.140
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perhubungan

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN PERHUBUNGAN	1,497,789,022,408	1,323,265,338,535	88.35
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	505,646,771,000	495,727,573,746	98.04
2. BELANJA LANGSUNG	992,142,251,408	827,537,764,789	83.41
a. BELANJA PEGAWAI	643,624,552,290	615,753,073,822	95.67
b. BELANJA BARANG DAN JASA	545,041,490,940	432,047,219,098	79.27
- Belanja Pemeliharaan	274,814,296,759	144,026,361,005	52.41
c. BELANJA MODAL	309,122,968,178	275,465,045,615	89.11
CATATAN PERBANDINGAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : APBD	992,142,251,408 / 1,497,789,022,408	**827,537,764,789/ 1,323,265,338,535**	62.54
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	309,122,968,178 / 992,142,251,408	275,465,045,615 / 827,537,764,789	33.29
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	274,814,296,759 / 545,041,490,940	144,026,361,005 / 432,047,219,098	33.34
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	274,814,296,759 / 992,142,251,408	144,026,361,005 / 827,537,764,789	17.40

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Perhubungan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.141
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Perhubungan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin/UPT								Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	6	1	1	-	1	1	1	5	16
2.	Dishub Dalam Angka	0	-	-	-	-	-	-	-	0
3.	Mobil Keliling	1	-	-	-	-	-	-	8	9
4.	Website	1	-	-	-	-	-	-	-	1
5.	E-mail	2	-	-	-	-	-	-	-	2
6.	Mobil VMS	-	-	-	-	-	-	-	5	5
7.	Gerbang VMS	-	-	-	-	-	-	-	7	7

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

CATATAN PERBANDINGAN :

- Website : http://dishub.jakarta.go.id
- E-mail : dishubdki@gmail.com/dishubdki@yahoo.com

Beberapa sarana dan prasarana yang digunakan untuk Urusan Perhubungan sebagaimana pada Tabel 3.164

Tabel 3.142 Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan

No	Uraian Sarana dan Prasarana	Jum1lah
1.	Terminal Bis Antar Kota (Kampung Rambutan, Kalideres, Tg. Priok)	3 lokasi
2.	Terminal Bis Dalam Kota (Pulo Gadung, Kampung Rambutan, Kalideres, Lebak Bulus, Senen, Pinang Ranti, Klender, ,Manggarai,Rawamangun, Grogol, Pasar Minggu, Tanjung Priok, Blok M, Muara Angke,Ragunan dan Clilitan)	16 lokasi
3.	Teminal Mobil Barang (Tanah Merdeka, Rawa Buaya dan Pulogebang)	3 lokasi
4.	Pelabuhan/Dermaga Penyebrangan	
	Pelabuhan Penyebrangan (Muara Angke, Pulau Payung, Pulau Pari, Pulau Lancang, Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung, Pulau Pramuka dan Pulau Kelapa)	8 lokasi
5.	Pengujian kendaraan Bermotor (Ujung Menteng, Pulogadung, Cilincing).	4 lokasi*
6.	CCTV (di Terminal Pulogadung, Kp. Rambutan, Kalideres, Cililita, Blok M, Tg. Priok, Rawamangun, Manggarai, Mitratel, Bali Tower, TMB Pulogadung, Pulogaung, Ragunan, Pinang Ranti dan 206 lokasi untuk lalu lintas)	320 unit
7.	Halte Bis (termasuk Halte Busway)	
	- Halte Bus *Non Busway*	1303 buah
	- Halte Bus *Busway*	217 buah
8.	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) (termasuk JPO Busway)	
	- JPO Busway	167 buah
	- JPO Non Busway	134 buah
9.	Bus Sekolah	
	- Bus Sedang (30 pnp)	116 unit
	- Bus Kecil (23 pnp)	60 unit
10.	- Lajur Uji Kendaraan Bermotor	23 lajur**
	- Mobil PKB Keliling	10 unit

*) 1 lokasi pengujian (5 lajur PKB Jagakarsa) tidak difungsikan

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Urusan Perhubungan termasuk urusan pelayanan dasar, sehingga dalam proses perencanaan memerlukan partsipasi masyarakat secara langsung. Partisipasi tersebut antara lain

diakomodasikan dalam Forum Musrenbang mulai dari tingkat RW sampai ke Provinsi.

Tabel 3.143 Sinkronisasi Perencanaan Program Perhubungan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	6	RKPD : RENJA SKPD	100%
2	RENJA SKPD 2018	12	RENJA SKPD :RKA	50 %
3	RKA 2018	6	RKA : DPA	100%
4	DPA 2018	6	DPA	100%

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

h. Permasalahan dan solusi

Dilihat dari sisi perhubungan dan atau lalu lintas, Kota Jakarta dikenal dengan kemacetan lalu lintasnya. Hal ini disebabkan pertumbuhan rata-rata kendaraan bermotor selama 5 (lima) tahun terakhir (2010-2016) sebesar ± 10 juta unit tidak seimbang dengan pertumbuhan ruas jalan. Untuk penambahan ruas jalan di DKI Jakarta sangat sulit untuk diwujudkan, karena lahan yang sangat terbatas dan harga tanah yang sangat tinggi. Beberapa pendekatan sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, antara lain seperti :

1) Pembangunan Jaringan Sistem BRT/Busway yang terintegrasi dengan modal Transportasi lain (KA, Terminal Bus) serta pusat-pusat kegiatan.
2) Pembangunan Busway Koridor lanjutan (Bekasi, Tanggerang).
3) Pengembangan *Feeder Busway* (termasuk APTB dan angkutan regular/bus sedang terintegrasi dengan *busway*).
4) Pembatasan lalu lintas dengan 3 in 1 *(three in one)* yang nantinya diganti dengan sistem plat nomor ganjil genap sebagai transisi ke sistem ERP.

5) Pengendalian dan penataan parkir on street.
6) Peningkatan kapasitas jaringan jalan dengan penerapan ITS (Inteligent Transport System) yang meliputi ATCS, *Bus Trecking System* dan *Traffic Information System*.
7) Pelebaran jalan dan perbaikan fasilitas jalan (Persimpangan, *U-turn*, Pulau-Pulau, Portal, Marka dll)

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Perhubungan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.144
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Perhubungan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan	1. Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi
		2. Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran
		3. Perda No 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem BRT
2.	PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	4. Pergub Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran
		5. Pergub Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta
		6. Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas
		7. Pergub Nomor 22 Tahun 2017
		8. Pergub Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan 9. Pergub Nomor 8Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja UP Angkutan Sekolah
		10. tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
		11. Pergub Nomor 181 Tahun 2012 tentang SPM UP Perparkiran
		12. Pergub Nomor 161Tahun 2013 tentang SPM Bidang Perhubungan
		13. Pergub Nomor 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja UP Sistem Pengendali lalu Lintas
		14. Pergub Nomor 110 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja UP Perparkiran
		15. Pergub Nomor 53Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja UP Angkutan Perairan Kepelabuhanan

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

15. Komunikasi dan Informatika

j. Prioritas urusan

- Pengembangan komunikasi dan informatika yang bertujuan untuk menciptakan sistem kehumasan yang lebih baik, modern dan luas sehingga masyarakat memperoleh hak publiknya dari penyelenggaraan pemerintahan.
- Menerapkan teknologi informasi untuk semua tingkat pemerintahan (e-government) yang dimulai dengan proses perencanaan *(e-planning)*, penganggaran *(e-budgeting)* dan proses pengadaan barang *(e-procurement)* serta pengawasan.

k. Program dan Kegiatan

Program nasional Urusan Komunikasi dan Informatika yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.145
Perbandingan Program Nasional dan Program Povinsi
Urusan Komunikasi dan Informatika

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik
3		Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika
4		Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika
Jml	**2**	**4**

Sumber : Dinas Kominfotik Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

Program Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2018 terdapat 4 program dengan 57 kegiatan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.146
Program Urusan Komunikasi dan Informatika

No	SKPD/Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	22
2.	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik	19
3.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika	13
4.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika	3
Jumlah		**57**

Sumber : Dinas Kominfotik Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

I. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan Komunikasi dan Informatikan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.147
Realisasi Program Urusan Komunikasi dan Informatika

No	SKPD/Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	22	22	100
2.	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik	19	19	100

No	SKPD/Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
3.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika	13	13	100
4.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika	3	3	100
Jumlah		**57**	**57**	**100**

Sumber : Dinas Kominfotik Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

Beberapa kegiatan dan hasil lainnya.

1) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik

- Persentase laporan warga melalui aplikasi interaktif Jakarta Smart City dari target 74% terealisasi sebesar 97,30%
- PPID Provinsi DKI Jakarta memberikan pelayanan informasi kepada 159 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 150 pemohon informasi individu (perseorangan) dan 9 pemohon informasi berbentuk lembaga/badan hukum. Pemohon menyampaikan permohonan informasi publiknya dengan cara mendatangi langsung desk pelayanan informasi sebanyak 23 pemohon dan melalui portal/website PPID http://ppid.jakarta.go.id sebanyak 136 pemohon.
- Pelayanan informasi pemberitaan implementasi program, kegiatan dan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Website beritajakarta.com baik dalam Bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
- Tersedianya data dan informasi pemprov DKI melalui website “www.jakarta.go.id” kepada publik
- Tersedianya media tercetak di Pemprov DKI pada tahun 2018, penerbitan Majalah Media Jaya sebagai majalah internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

sebanyak 10 (Sepuluh) edisi, dimana tema masing-masing edisi disesuaikan dengan kebijakan dan atau program kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta perkembangan isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tema yang diangkat pada majalah Media Jaya Tahun 2018 antara lain:

a. Edisi I : Jakarta Menuju Kota 4.0
b. Edisi II : Merevitalisasi Danau, Situ, dan Waduk
c. Edisi III : Jakarta Sukseskan Asian Games 2018
d. Edisi IV : Tahapan 7 Pas Dalam Program OK OCE
e. Edisi V : Jakarta Sambut Asian Para Games 2018
f. Edisi VI : Jakarta Darurat Sumur Serapan Air
g. Edisi VII : Kupas Tuntas Tentang Jak Lingko
h. Edisi VIII : Revitalisasi SMK di Jakarta
i. Edisi IX : DP 0 Rupiah
j. Edisi X : Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Seputarnya

- Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
- Pengembangan sistem penataan dan pengembangan Aplikasi e-Absensi dan e-TKD, Aplikasi PTSP, Aplikasi SIPKD, Serta sistem e-Kinerja Pendukung Kebijakan Remunerasi
- Program pengembangan Teknologi Komunikasi Informasi dalam hal Presentase Service Level Agreement Data Center selama tahun 2018 sebesar 100%
- Jumlah sistem informasi yang terintegrasi sejumlah 45 sistem informasi

m. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 diselenggarakan oleh Dinas dan Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3.148
Rekapitulasi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**	**235**	
	1. Golongan IV	17	
	2. Golongan III	192	
	3. Golongan II	25	
	4. Golongan I	1	
B.	**Eselon**	**235**	
	1. Eselon I	0	
	2. Eselon II	1	
	3. Eselon III	14	
	4. Eselon IV	37	
	5. Eselon V	0	
	6. Fungsional	5	
	7. Pelaksana	178	
C.	**Pendidikan**	**235**	
	1. S3	0	
	2. S2	22	
	3. S1	155	
	4. Diploma	19	
	5. SLTA	36	
	6. SLTP	1	
	7. SD	2	

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.149
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Komunikasi dan Informasi

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1	0	1
2	Eselon III	15	14	14	6	14

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
3	Eselon IV	37	37	37	18	37
Jumlah		55	52	52	24	52

Sumber : Dinas Kominfotik Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 52/52 = 100,00 %
- Diklat Kepemimpinan : 24/52 = 46,15 %
- Kepangkatan : 52/52 = 100,00 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.150
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KOMUNIKASI dan INFORMATIKA	**362.858.543.069**	**298.340.469.281**	**82,21**
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	105.744.829.000	93.436.415.202	88,36
2. BELANJA LANGSUNG	257.113.714.069	204.904.054.079	79,69
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	-
b. BELANJA BARANG DAN JASA	166.294.630.548	125.689.660.886	75,58
- Belanja Pemeliharaan	16.883.446.319	16.310.761.786	96,61
c. BELANJA MODAL	90.819.083.521	79.214.393.193	87,22
CATATAN PERBANDINGAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	362.858.543.069		
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	90.819.083.521	362.858.543.069	25%
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	16.883.446.319	166.294.630.548	10%
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	16.883.446.319	362.858.543.069	5%

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed,* BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan Prasarana

Sarana yang digunakan dalam Urusan Komunikasi dan Informatika tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa

jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.151
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Komunikasi dan Informatika

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1		7
2.	Twitter @jakarta.go.id	1								1
3.	Mobil Keliling	2	1	1	1	1	1			7
4.	Media Masa	1								1
5.	Leaflet	8								8
6.	Poster	8								8
7.	Website	2	1	1	1	1	1	1	1	9
8.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1	1	8
10	SMS center 02132881818	1								1
11	LAPOR 1708	1								1
12	Call Center 112	1								1

Sumber : Dinas Kominfotik Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

CATATAN PERBANDINGAN :

- Website : http://www.jakarta.go.id/www.beritajakarta.com
- E-mail :dki@jakarta.go.id
- Call Center : 112

Sarana dan prasarana untuk melaksanakan operasional Urusan Komunikasi dan Informatika yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik lebih merupakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) teknologi informasi. Sedangkan untuk kegiatan bidang komunikasi public dan informasi public lebih kepada alat operasional sebagaimana pada berikut

Tabel 3.152
Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional

No	Nama/Jenis Barang
1)	Kamera Video
2)	Alat Editing Video
3)	Note Book

No	Nama/Jenis Barang
4)	SMS Center
5)	E-mail
6)	Situs Berita
7)	Kamera Foto
8)	Video Tave Recorder
9)	TV Monitor
10)	Faximile
11)	Mesin Foto Copy
12)	Personal Komputer
13)	Situs Data & Informasi

Sumber : Dinas Kominfotik Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Urusan Komunikasi dan Informatika lebih merupakan pelayanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat, sehingga proses perencanaan lebih bersifat *top down*. Perencanaan tersebut tidak terlepas dari kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan aerah.

Tabel 3.153
Sinkronisasi Perencanaan Program Komunikasi dan Informatika

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	4	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2018	4	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2018	4	RKA : DPA	100
4	DPA 2018	4		
5	DPAP	4		

Sumber : Dinas Kominfomas Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

h. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika dan kehumasan Provinsi DKI Jakarta

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sesuai dengan kompetensi menghambat pelaksnaan pekerjaan.
2. Terbatasnya waktu untuk memasukan usulan harga komponen barang yang dibutuhkan sehingga sulit

memperbaharui ke dalam sistem.

3. Terbatasnya kapasitas dan media backup data pengadaan barang/jasa secara elektronik di LPSE
4. Aplikasi SPSE dan aplikasi lainnya seperti SiRUP dan SPSE mengalami gangguan karena adanya pengembangan/ perubahan/ update versi di aplikasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai pembuat aplikasi tersebut.
5. Kurangnya perangkat kerja untuk mendukung aktifitas yang tinggi sehingga memungkinkan terjadinya kerusakan.
6. Ketidaksiapan SKPD/ UKPD dalam memenuhi kebutuhan dokumen pendukung sebagai pedoman pengembangan aplikasi.
7. Terkait pengelolaan informasi, PPID pada SKPD/UKPD belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Belum meratanya ketersediaan desk pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD untuk memudahkan pemohon informasi melakukan pelayanan informasi publik.
9. Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan.
10. Integrasi berita media massa yang dilakukan pada tahun 2017 terkendala karena karakteristik media massa yang berbeda-beda. Aktualisasi media cetak tertinggal dari media elektronik lainnya seperti TV dan online yang real-time sehingga perlu mendapat perhatian dalam akurasi saat analisis data.
11. Tindaklanjut SKPD/UKPD terhadap aspirasi publik yang kurang tepat terkait karena kurangnya pemahaman serta kesadaran untuk menindak lanjuti aduan masyarakat

Sedangkan solusi yang dapat diambil dari permasalahan tersebut antara lain:

1. Dalam rangka optimalisasi pelaksnaan pekerjaan perlu didukung Tenaga Ahli Profesional serta peningkatan

kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) .

2. Mengatur jadwal untuk melakukan survey harga pasar sebagai pendukung dalam updating komponen harga.
3. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di LPSE untuk meningkatkan kapasitas dan media backup data sehingga proses pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat berjalan dengan optimal.
4. LPSE Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dan konsultasi terkait permasalahan teknis tersebut ke LKPP agar permasalahan teknis gangguan pada aplikasi SPSE
5. Penambahan sarana kerja dan optimalisasi pemeliharaan perangkat kerja
6. Mendorong SKPD untuk menyiapkan dokumen pendukung sebagai pedoman pengembangan aplikasi seperti SOP, dan lain-lain
7. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengembangan/pemutakhiran sistem informasi dan portal/website PPID seluruh PPID pada SKPD/UKPD maka dilaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi untuk memberikanpenjelasan kepada PPID SKPD/UKPD mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik;
8. Perlunya melaksanakan pengembangan/pemutakhiran sistem informasi dan portal/website PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih memudahkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara online, sehingga informasi publik yang disajikan dapat terklasifikasi dengan baik;
9. Pelayanan informasi akan lebih maksimal dan baik dengan menempatkan desk pelayanan informasi, tidak hanya pada PPID Provinsi, tetapi juga seluruh PPID pada SKPD/UKPD, agar dapat lebih mudah di akses oleh masyarakat.
10. Mengevaluasi efektifitas media massa cetak terhadap media massa jenis lainnya serta perlunya strategi untuk menganalisa data secara periodik agar mendapatkan analisa data berita secara aktual.
11. Mengadakan sosialisasi kepada SKPD/UKPD melalui seluruh kanal informasi yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Povinsi DKI Jakarta sehingga

aspirasi publik ditindaklanjuti dengan lebih cepat dan sesuai harapan masyarakat

Saat ini Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

i. Hal-hal yang perlu diperhatikan

Prestasi Daerah :

1) Peringkat dua Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat RI Tahun 2018
2) Penghargaan Inspirational Leader dari Gov Insider Singapura 2018
3) Penghargaan Best Team Under 35 dari Gov Insider Singapura 2018
4) Stand Terbaik Kategori Pemda/ BUMN Jakarta Fair 2018

16. Pertanahan

a. Prioritas urusan

- Program Penyiapan Akuisisi Tanah

b. Program dan Kegiatan

Program Urusan Pertanahan tahun 2018 berjumlah 1 Program

Tabel 3.154
Program Urusan Pertanahan

No	Program	Jumlah Kegiatan
1	Program Penyiapan Akuisisi Tanah	1
Jumlah		**1**

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Pencapaian kinerja kegiatan urusan pertanahan Tahun 2018 sebesar 90,29% dari rencana kegiatan

Tabel 3.155 Realisasi kegiatan Tahun 2018

No	Program	Jumlah		
		Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Penyiapan Akuisisi Tanah	896,276,088	809,260,000	90,29
Jumlah		896,276,088	809,260,000	90,29

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2018

d. SKPD yang menyelenggarakan Urusan

Mulai Tahun 2017 urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan dan Pemetaan di Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan. Bidang pertanahan dan pemetaan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dasar, penyusunan peta dasar dan peta tematik, serta menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan perencanaan pertanahan sedangkan terkait pembelian dan pembebasan tanah tersebar di beberapa SKPD/UKPD.

Gambaran kondisi SDM urusan pertanahan secara rinci berdasarkan Golongan, Jabatan serta tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut.

Rekapitulasi Pegawai Urusan Pertanahan

NO	KUALIFIKASI		JUMLAH	KETERANGAN
A	Golongan		20	
	1	Golongan IV	3	
	2	Golongan III	14	
	3	Golongan II	2	
	4	Golongan I	1	
B	Eselon		4	
	1	Eselon I	0	
	2	Eselon II	0	
	3	Eselon III	1	
	4	Eselon IV	3	
	5	Eselon V	0	
	6	Fungsional	0	
	7	Pelaksana (Staf)	16	

NO	KUALIFIKASI		JUMLAH	KETERANGAN
C	Pendidikan		20	
	1	S3	0	
	2	S2	4	
	3	S1	13	
	4	Diploma	0	
	5	SLTA	2	
	6	SLTP	1	
	7	SD	0	

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.156
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksanaan Urusan Pertanahan

NO	SKPD	JUMLAH JABATAN	JABATAN YANG TERISI	KESESUAIAN		
				PENDI-DIKAN	DIKLAT-PIM	PANGKAT
1	Eselon II					
2	Eselon III	1	1	1	1	1
3	Eselon IV	3	3	3	3	3
Jumlah		**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2018

Rekapitulasi kesesuaian jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 4 / 4 = 100,00%
- Diklat Kepemimpinan : 4 / 4 = 100,00%
- Kepangkatan : 4 / 4 = 100,00%

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Pertanahan pada Provinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2018 sebesar Rp 896,276,088 tetapi yang terserap sebesar Rp 809,260,000 (90,29%) adalah sebagai berikut

Tabel 3.157
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanahan

Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN PERTANAHAN	896,276,088	809,260,000	90,29
1. BELANJA TIDAK	-	-	-

Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
LANGSUNG			
2. BELANJA LANGSUNG	896,276,088	809,260,000	90,29
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	-
b. BELANJA BARANG DAN JASA	809,260,000	90,29	73,58
- Belanja Pemeliharaan	-	-	-
c. BELANJA MODAL	-	-	-
CATATAN PERBANDINGAN : PERBANDINGAN :			
Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	896,276,088		0,00
BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	-	809,260,000	0,00
Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	-	809,260,000	0,00
Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	-	809,260,000	0,00

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2018

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Pertanahan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan Prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.158
Sarana dan prasarana

NO	JENIS FASILITAS / PRASARANA	JUMLAH FASILITAS PADA DINAS/ SUDIN								Jml
		PROV	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1	Papan Pengumuman									
2	Kota Pengaduan									
3	Website									

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2018

Catatan Perbandingan :

- Website : http://dcktrp.jakarta.go.id
- E-Mail : dinas_cktrp@jakarta.go.id

Beberapa sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan Urusan Pertanahan, antara lain:

a. GPS
b. Server
c. Total Station
d. Sotfware Autocad & Arcgis
e. Distometer
f. Eskavator
g. Printer/Plotter/PC/Laptop
h. KDO Lapangan
i. Theodolite

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan dalam Urusan Pertanahan masih bersifat *top down*, karena urusan pertanahan yang bersifat pelayanan pensertifikatan tanah masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi teknisnya di daerah (Kanwil dan Kantor BPN).

Tabel 3.159 Sinkronisasi Perencanaan Program Urusan Pertanahan

NO	DOKUMEN	JUMLAH PROGRAM	PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM	%
1	RKPD	1	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD	1	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA	1	RKA : DPA	100
4	DPA	1		

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2018

h. Permasalahan dan Solusi

- Kewenangan di bidang pertanahan masih terbatas khususnya pelayanan pensertifikatan tanah yang masih menjadi kewenangan Pusat. Untuk itu dilakukan kerjasama pensertifikatan tanah dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- Masih banyak konflik pertanahan, khasusnya konflik kepemilikan tanah. Guna mengatasinya, selain dengan sosialisasi pertanahan juga dengan penyelesaian konflik pertanahan malalui jalur musyawarah maupun jalur hukum.

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

- SOP yang dimiliki Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Urusan Pertanahan Yaitu :
  a. Bidang Pertanahan dan Pemetaan :
     - Penerbitan Peta Informasi Zonasi

17. Ketentraman dan Ketertiban Umum Linmas

Tabel 3.160

Program dan Jumlah Kegiatan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Linmas

No	Program	Jumlah Kegiatan	Ket
1.	**Satpol PP**	**161**	
	a. Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	64	
	b. Program Penegakan Perda dan/atau Perkada secara Yustisial	8	
	c. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	61	
	d. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	28	
2.	**Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan**	**63**	
	a. Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran	4	
	b. Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	25	
	c. Program Peningkatan Kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	
	d. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	25	
	e. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	6	
3.	**BPBD**	29	
	a. Program Pengelolaan Risiko Bencana	17	
	b. Program Penanggulangan Bencana	7	
	c. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat SKPD/UKPD Penanggulangan Bencana Daerah	14	
	d. Program Pengelolaan Kendaraan	4	

No	Program	Jumlah Kegiatan	Ket
	Operasional Urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat SKPD/UKPD Penanggulangan Bencana Daerah		
	JUMLAH		

Sumber : Satpol PP, DPKP, BPBD Prov. DKI Jakarta, 2018

a. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Adapun hasil yang dicapai pada Tahun 2018 antara lain :

Tabel 3.161 Program, Jumlah Kegiatan dan Realisasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Linmas

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Satpol PP	**161**	**159**	**98,75**
2.	DPKP	63	58	92,06
3.	BPBD	42	42	100
Jumlah		**266**	**259**	97,36

Sumber : Satpol PP, DPKP, BPBD Prov. DKI Jakarta, 2018

Tabel 3.162 Rekapitulasi Pegawai Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Linmas

No	Kualifikasi	OPD			Jumlah
		Satpol PP	DPKP	BPBD	
A.	**Golongan**	**3151**	2.708	**68**	
	1. Golongan IV	**34**	18	18	
	2. Golongan III	**604**	928	35	
	3. Golongan II	**2451**	1.755	15	
	4. Golongan I	**62**	7		
B.	**Eselon**	**94**	2.708	**68**	
	1. Eselon I	0	0		
	2. Eselon II	1	1	1	
	3. Eselon III	12	11	4	
	4. Eselon IV	81	78	13	
	5. Eselon V	0	0		
	6. Fungssional	2	1		
	5. Pelaksana	3055	2.617	40	
C.	**Pendidikan**	**3151**	2.708	**68**	
	1. S3	0	1		
	2. S2	31	36	20	
	3. S1	462	383	33	
	4. Diploma	11	26	9	

No	Kualifikasi	OPD			Jumlah
		Satpol PP	DPKP	BPBD	
	5. SLTA	2565	2.216	6	
	6. SLTP	66	41		
	7. SD	16	5		

Sumber : Satpol PP, DPKP, BPBD Prov. DKI Jakarta, 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan :

Tabel 3.163 Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Linmas

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Jumlah Pejabat Sesuai		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	**Satpol PP**	101	94	94	30	94
	1. Eselon II	2	1	1	0	1
	2. Eselon III	12	12	12	5	12
	3. Eselon IV	87	81	81	25	81
2	**DPKP**	59	59	59	17	47
	1. Eselon II	1	1	1	-	1
	2. Eselon III	15	15	15	3	11
	3. Eselon IV	43	43	43	14	35
3	**BPBD**	19	18	18	17	18
	1. Eselon II	1	1	1	1	1
	2. Eselon III	5	4	4	3	4
	3. Esselon IV	13	13	13	13	13

Sumber : Satpol PP, DPKP, BPBD Prov. DKI Jakarta, 2018

b. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi dan anggaran Urusan Pekerjaan Umum tersebar pada beberapa SKPD sebagai berikut

Tabel 3.164 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Linmas

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
URUSAN PEKERJAAN UMUM	2,425,850,063,909	2,178,124,715,295	89.79
2. BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,605,475,136,994	1,564,576,259,313	97.45
3. BELANJA LANGSUNG	820,374,926,915	613,548,455,982	74.79
a. BELANJA PEGAWAI	156,739,413,198	152,219,223,475	97.12
b. BELANJA BARANG DAN JASA	316,603,114,609	203,784,716,614	64.37
- Belanja Pemeliharaan	156,739,413,198	152,219,223,475	97.12
c. BELANJA MODAL	347,032,399,108	257,544,515,893	74.21
CATATAN PERBANDINGAN :			
- Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	2,425,850,063,909	2,178,124,715,295	
- Belanja Modal : Belanja		1,564,576,259,313	

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
URUSAN	1,605,475,136,99		
- Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang&Jas	152,219,223,475	203,784,716,614	
- Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	152,219,223,475	1,564,576,259,313	

Sumber : LKPD 2018 *unaudited*, BPKD Prov. DKI Jakarta

Anggaran tersebut merupakan gabungan dari anggaran 3 SKPD sebagai berikut :

Tabel 3.165

Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada SKPD Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Linmas

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A. Satpol PP	1,214,902,456,434	1,089,695,863,228	89.69%
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	804,318,653,000	787,414,730,341	97.90
2. BELANJA LANGSUNG	410,583,803,434	302,281,132,887	73.62
a. BELANJA PEGAWAI	156,739,413,198	152,219,223,475	97.12
b. BELANJA BARANG DAN JASA	133,073,760,827	52,849,670,487	39.71
- Belanja Pemeliharaan	1.639.341.356	13.920.211.080	18,03
c. BELANJA MODAL	120,770,629,409	97,212,238,925	80.49
CATATAN PERBANDINGAN :			
- Alokasi Anggaran SKPD : Belanja APBD	1,214,902,456,434		
- Belanja Modal : Belanja SKPD	120,770,629,409	1,089,695,863,228	
- Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa		52,849,670,487	
- Belanja Pemeliharaan : Belanja SKPD		1,089,695,863,228	
B. DPKP	721.681.657.000	696.894.360.818	
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	211.419.171.066	145.225.646.739	
2. BELANJA LANGSUNG	721.681.657.000	700.173.247.485	
a. BELANJA PEGAWAI	173.712.852.324	142.286.331.701	
b. BELANJA BARANG DAN JASA		21.724.514.593	
- Belanja Pemeliharaan	22.040.9817.669	155.135.645.241	
c. BELANJA MODAL	721.681.657.000	696.894.360.818	
CATATAN PERBANDINGAN :			
- Alokasi Anggaran SKPD : Belanja	1,115,804,326,993		
- Belanja Modal : Belanja SKPD	155,135,645,241	997,595,224,427	
- Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa		142,286,331,701	
- Belanja Pemeliharaan : Belanja SKPD		997,595,224,427	

C. BPBD	45,668,486,488	41,442,847,646	90.75%
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	30,000,033,000	27,597,501,493	91.99
2. BELANJA LANGSUNG	15,668,453,488	13,845,346,153	88.36
a. BELANJA PEGAWAI			
b. BELANJA BARANG DAN JASA	9,816,501,458	8,648,714,426	88.10
- Belanja Pemeliharaan			
c. BELANJA MODAL	5,851,952,030	5,196,631,727	88.80
CATATAN PERBANDINGAN : PERBANDINGAN			
- Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	45,668,486,488		
- BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	5,851,952,030	41,442,847,646	
- Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa		8,648,714,426	
- Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN		41,442,847,646	

Sumber : LKPD 2018 *unaudited*, BPKD Prov. DKI Jakarta

c. Sarana dan prasarana

Sarana yang digunakan dalam Urusan Perumahan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.166

Jenis dan Jumlah Fasilitas / Prasarana Informasi

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas			JML
		Satpol PP	DPKP	BPBD	
1.	Papan Pengumuman	2	1	6	
2.	Kotak Pengaduan		1		
3.	Leaflet		1	2	
4.	Mobil Keliling	4	1		
5.	Media Masa	1	1	3	
6.	Website	3	1	1	
7.	E-mail	8	1	1	
8.	Call Center	1	1	1	
9	Sms center	1	1		

Sumber : Satpol PP, DPKP, BPBD Prov. DKI Jakarta, 2018

Catatan :
a. Satpol PP :
- Website : satpolpp.jakarta.go.id
- Email :

- Call Center :
- Media massa :
  Twitter : @SatpolPP_DKI
  Facebook : Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
  Instagram : @satpolpp.dki
  Youtube : @SatpolPP_DKI

b. DPKP :
- Website :
- Email : damkardki@jakarta.go.id
- Call Center : 112
- Media massa :
  Twitter : @humasjakfire
  Facebook : humas jakfire
  Instagram : @humasjakfire
  Youtube : humas jakfire

c. BPBD :
- Website : bpbd.jakarta.go.id
- Email : bpbddki@jakarta.go.id
- Call Center : 112
- **Media massa** :
  Twitter : @BPBDjakarta
  Facebook : BPBD DKI Jakarta
  Instagram : bpbddkijakarta
- Youtube : -

d. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Proses perencanaan dilakukan kombinasi antara *top down* dan *bottom up* dengan mengoptimalkan forum Musrenbang dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Provinsi, yang dikoordinasikan oleh Kappeko/Kappekab dan Bapeda.

Tabel 3.167 Sikronisasi Perencanaan Program Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Linmas

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
A.	**Satpol PP**			
1	RKPD 2017	4	RENJA SKPD : RKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	4	RKA : RENJA SKPD	100
3	RKA 2017	4	DPA : RKA	100
4	DPA 2017	4		
B.	**DPKP**			
1	RKPD 2017	5	RENJA SKPD : RKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	5	RKA : RENJA SKPD	100
3	RKA 2017	5	DPA : RKA	100
4	DPA 2017	5		
C	**BPBD**			
1	RKPD 2017	4	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	4	RENJA SKPD : RKA	100

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
3	RKA 2017	4	RKA : DPA	100
4	DPA 2017	4		

Sumber : Satpol PP, DPKP, BPBD Prov. DKI Jakarta, 2018

e. Permasalahan dan Solusi

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di DKI Jakarta Tahun 2018, antara lain :

1. Satpol PP:
   a. Jumlah anggota Satpol PP yang tidak sebanding dengan jumlah titik rawan serta jumlah kegiatan yg melibatkan masa yang cukup banyak
   b. Penertiban Skala besar banyak terkendala karena tidak adanya tindak Lanjut Pasca Penertiban
   c. Perlunya SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan penertiban yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 285 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
   d. Seringnya terjadi gesekan antara personil Satpol PP dengan masyarakat pada saat penertiban
2. DPKP
   a. Partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran belum optimal
   b. Partisipasi masyarakatnya dalam upaya penanggulangan dini kebakaran belum optimal
   c. Masih belum optimalnya fungsi hidran di kawasan rawan kebakaran
   d. Masih kurangnya tandon air di kawasan rawan kebakaran
   e. Rasio jumlah pos pemadam kebakaran terhadap jumlah kelurahan yang belum optimal
   f. Jumlah SDM penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang belum optimal
   g. Kesiapan sarana dan prasarana yang belum optimal
3. BPBD
   a. Belum optimalnya penyampaian informasi di lapangan, sehingga informasi kurang akurat
   b. Adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah serta belum semua SKPD terkait penanggulangan bencana termasuk ke dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39

Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Satpol PP :
   a. Perlunya kajian mendalam terkait titik rawan tramtibum dan indeks pelanggaran Perda dan/atau Perkada sehingga dapat digunakan untuk penempatan personil di lapangan
   b. SKPD yang mengusulkan Penertiban sudah menyiapkan kegiatan / Penataan di Lokasi yang sudah di tertibkan
   c. Perlu adanya perumusan SOP untuk setiap jenis kegiatan penertiban
   d. Perlu adanya peningkatan kapasitas (capacity building) maupun refreshment untuk personil Satpol PP khususnya refreshment tentang Perda/Perkada, TUPOKSI Satpol PP dan kemampuan *Public Speaking*
2. DPKP
   a. Mengoptimalkan upaya Pencegahan Kebakaran terlebih untuk sosialiasi pencegahan kebakaran
   b. Meningkatkan pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran agar berjalan lebih efektif dan efisien
   c. Meningkatkan operasi Penyelamatan agar berjalan lebih efektif dan efisien
   d. Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana penaggulangan kebakaran dan penyelamatan
   e. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia belum optimal
   f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas
3. BPBD
   a. Revisi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2014 dengan melibatkan semua SKPD terkait penanggulangan bencana
   b. Meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait penanggulangan bencana
   c. Meningkatkan peran serta lembaga masyarakat dalam penanggulangan bencana
   d. Meningkatkan sumber daya manusia dititik rawan bencana

f. Hal lain yang perlu dilaporkan

Peraturan Menteri atau peraturan yang berkaitan dengan urusan Kesbangpol yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut

Tabel 3.168
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Linmas

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007
3	PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Gubernur Nomor 285 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Prestasi Daerah yang diterima Provinsi DKI Jakarta selaku pelaksana Urusan Trantibumlinmas, antara lain sebagai berikut :

1. Certificate of Appreciation (participation and contribution to support Indonesia 2018 Asian Para Games, October 6 th – 13 th 2018
2. Juara III Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Zis) di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dilaksanakan pada acara Peduli Umat 1439 Hijriyah/2018 Masehi
3. Piagam penghargaan atas partisipasi dalam upaya pengurangan resiko bencana melalui program inisiasi DKI Jakarta sebagai Kota Berketahanan

18. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Prioritas urusan

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat menjadi DPPAPP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Urusan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di DKI Jakarta hanya mencakup Urusan Pemberdayaan Masyarakat karena di DKI Jakarta tidak ada Desa (otonom). Adapun Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat Kota/kabupaten Administrasi dan secara otomatis juga perangkat Provinsi DKI. Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Terdapat 1 Program Prioritas Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (khususnya RT/RW) Tahun 2018 di DKI Jakarta, yaitu :

1) Program Pemberdayaan Masyarakat

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Pemebrdayaan Masyarakat yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.169 Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Program Pemberdayaan Masyarakat
2	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan	
Jml	**3**	**1**

Sumber : DPPAPP Prov. DKI Jakarta 2018

Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) Program dengan 17 (empat belas) kegiatan.

Tabel 3.170
Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program	Jumlah Sub Kegiatan	Realisasi	%
1	Penguatan kelembagaan PKK dalam mensejahterakan keluarga		1.050.062.973	97,16

No	Program	Jumlah Sub Kegiatan	Realisasi	%
	tingkat provinsi			
2	Pemenuhan indikator kota layak anak (KLA) di RPTRA dan lingkungan sekitar		16.785.000	71,55
3	Penggalangan Gelar Kreatifitas 10 Program Pokok PKK di Rusunawa dan RPTRA		247.800.000	100
4	Orientasi Analisa SIM PKK		14.850.000	85,59
5	Rakor PKK tingkat provinsi		26.560.000	100
6	Gelar teknologi tepat guna tingkat nasional 2018		253.262.000	75,88
7	Penggalangan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes Tingkat Nasional		28.920.000	98,98
8	Pemetaan Sosial RPTRA		249.350.000	91,63
9	Pemetaan Sosial Rusunawa dan penyusunan konsep program Rusunawa DKI Jakarta		27.400.000	100
10	Peningkatan Prestasi PKK Tingkat Nasional		118.000.000	100
11	Pelaksanaan Orientasi pendamping pengelola Pokja I-IV dan sekretariat		66.450.000	84,70
12	Penyelenggaraan Rakerda Penanggulangan kemiskinan		22.870.000	92,70
13	Pelaksanaan rapat koordinasi TKPK Provinsi DKI Jakarta		16.535.000	93,02
14	Pelaksanaan Rekrutmen Pengelola RPTRA		97.150.000	94,30
15	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi		39.790.000	91,49
16	Pengembangan pemberdayaan masyarakat berbasis TTG di daerah Kawasan kumuh/rusunawa		28.500.000	99,22
17	Pelaksanaan orientasi program Sanimas IDB berbasis masyarakat di Provinsi DKI Jakarta		110.600.000	100
Jumlah		**17**	**2.414.884.973**	**100**

Sumber : DPPAPP Prov. DKI Jakarta 2018

Tabel 3.171
Rekapitulasi Dana PPMK

No	Uraian	Jumlah (Miliar Rupiah)	
		2014	2015
1	Dana BLM	109	60.150
2	Bina Ekonomi	0	0
3	Bina Sosial dan Fisik	119	53.736
4	Pemanfaat (Org)		**49.490**
Jumlah			

Sumber : DPPAPP Prov DKI Jakarta , 2015

PKK Aktif

No	Uraian	Tahun	
		2017	2018
1	PKK Aktif	110.724	102.446
2	Jml PKK	146.305	110.723
3	%	76	92,52

Sumber : DPPAPP Prov DKI Jakarta 2018

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di DKI Jakarta hanya mencakup Urusan Pemberdayaan Masyarakat karena di DKI Jakarta tidak ada Desa (otonom). Urusan ini dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. Adapun Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat Kota/kabupaten Administrasi dan secara otomatis juga perangkat Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3.172 Rekapitulasi Pegawai Urusan Pemberdayaan Masyarakat

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**	**25**	
	• Golongan IV	10	
	• Golongan III	15	
	• Golongan II		
	• Golongan I		
B.	**Eselon**	**9**	
	• Eselon I		
	• Eselon II		
	• Eselon III		
	• Eselon IV		
	• Fungsional Khusus		
	• Fungsional Umum (Staf)	**29**	
C.	**Pendidikan**	**38**	
	• S3		

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
	• S2		
	• S1		
	• Diploma		
	• SLTA		
	• SLTP		
	• SD		

Sumber : DPPAPP Prov. DKI Jakarta, 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.173
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural PelaksanaUrusan Pemberdayaan Masyarakat

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II					
2	Eselon III	1	1	1	1	1
3	Eselon IV	8	7	7	7	7
Jumlah		9	8	8	8	8

Sumber : DPPAPP, 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 8/8 100%
- Diklat Kepemimpinan : 8/8 100%
- Kepangkatan : 8/8 100%

d. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2018 melekat pada anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3.174
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat

URAIAN	ALOKAS (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.583.234.203	2.414.884.973	93,48
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2. BELANJA LANGSUNG	2.583.234.203	2.414.884.973	93,48

URAIAN	ALOKAS (Rp)	REALISASI (Rp)	%
a. BELANJA PEGAWAI			
b. BELANJA BARANG DAN JASA			
- Belanja Pemeliharaan			
c. BELANJA MODAL			
CATATAN :			
- Alokasi Anggaran URUSAN : APBD			
- Belanja Modal : Belanja URUSAN			
- Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa			
- Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN			

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

e. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.175
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Pemberdayaan Masyarakat

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman									
2.	Kotak Pengaduan									
4.	Media Masa									
5.	Website	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6.	E-mail	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Sumber : DPPAPP, 2018

CATATAN PERBANDINGAN :

Website : http://dkijakarta.bkkbn.go.id/

f. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat didominasi oleh program *bottom up*, karena kegiatannya sebagian besar berbasis masyarakat.

Usulan kegiatan PPMK yang diajukan oleh Dewan Kelurahan diseleksi oleh BPM Kota/Kabupaten untuk diteliti. Usulan yang disetujui dapat dikeluarkan anggarannya.

Tabel 3.176 Sinkronisasi Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	2	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	2	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2017	2	RKA : DPA	100
4	DPA 2017	2		

Sumber : BPMPKB, 2017

g. Permasalahan dan solusi

Permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

- **Permasalahan:**

  Masih belum optimalnya kualitas kelembagaan masyarakat, dan masih relatif rendahnya tingkat keberdayaan masyarakatan, dan belum optimalnya penggunaan TTG serta perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas RPTRA sebagai wahana pemberdayaan masyarakat secara terpadu.

  Solusi:

  a. Mengoptimalkan RPTRA sebagai wadah Pemberdayaan Masyarakat sekaligus sebaga salah satu implementasi dari Kota Layak Anak dan Kampung KB
  b. Peningkatan kemandirian masyarakat melalui pengembangan, pemasyarakatan, dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna serta mengoptimalkan masyarakat dalam pengembangan pemasyarakatan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk

meningkatkan produktivitas kerja dan peluang pemasaran hasil usaha agar penghasilan masyarakat meningkat dan menjadi mandiri

- **Permasalahan:**

  Persentase kemiskinan di Provinsi DKI menunjukkan tren peningkatan meskipun masih dalam kisaran angkat 3%, persentase penduduk miskin Provinsi DKI pada tahun 2017 sebesar 3,78%

  Solusi:

  Membangun Kemitraan dengan CSR sebagai upaya sinergitas kolaboratif dalam program Pemberdayaan Masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

h. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Diterimanya Penghargaan kepada Kuswandi dkk, Juara Harapan 2 Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional Tahun 2018.

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat yang telah dituangkan dalam Perda dan Peraturan Gubernur antara lain sebagai berikut.

Tabel 3.177
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Pemberdayaan Masyarakat

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.		Peraturan Gubernur Nomor 24Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 120 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana.
		Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pengalihan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
		Pengelolaan Dana Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dari Dewan Kelurahan Kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan
		Keputusan Gubernur Nomor 869 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bina Fisik dan Bina Sosial Program pemberdayaan Masyarakat Kelurah-an (PPMK) Tahun Anggaran 2010
		Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
		Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
		Peraturan Gubernur No.89/2011 ttg Penyelesaian Permasalahan Keuangan Dana Bina Ekonomi PPMK Th.Anggaran 2001 sd 2007.
		Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1033/2011 tentang Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2011
		Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1003/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
		Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 760/2013 tentang Tim Asistensi Penyelesaian Permasalahan Keuangan Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahaan TA 2013
		Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 465/2013 tantang Penetapan Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemda lain dan Pemerintahan serta partai Politik pada APBD TA 2013
		Keputusan Gubernur Provinsi DKI

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
		Jakarta No. 12/2012 tentang Penetapan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Pemerintahan/non-Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok dan Anggota Masyarakat serta Partai Politik pada APBD TA 2012
		Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1407/2011 tantang Alokasi Dana Bina Sosial serta Biaya Kegiatan Lapangan (BKL) PPMK TA 2011
		Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1663/2013 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang kepada Individu, Masyarakat, Kelompok masyarakat, Pemda Lainnya, dan Pemerintah serta parpol TA 2013
		Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 81/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bina Fisik Lingkkungan dan Bina Sosial Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)
		Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 55/2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD
		Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1369/2014 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Tahap ketiga dalam Bentuk Uang Kepada Individu, keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan pada APDB TA 2014
		Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 696/2014 tentang Penangung Jawan Operasional Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan
3.	Pereraturan Menteri Dalam Negeri No. 1/2013 tentang	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 112/2013 tentang

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
	Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemebrdayaan Masyarakat
		Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 46/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 112/2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Masyarakat

19. Sosial

a. Prioritas urusan

Adapun prioritas urusan pilihan di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari :

1) Pemenuhan kebutuhan dasar anak bermasalah sosial, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas
2) Penanganan PMKS Jalanan
3) Peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi warga binaan sosial (WBS) di panti sosial
4) Peningkatan sarana dan prasarana sosial
5) Peningkatan kemandirian keluarga miskin dan PMKS potensial
6) Peningkatan kualitas lembaga dan tenaga kesos serta peran masyarakat dan dunia usaha dlaam pembangunan kesos
7) Perlindungan sosial korban bencana

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Sosial yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.178 Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kementerian Sosial	1. Program Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Sosial 2. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Sosial 3. Program Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial
2	Program Pemberdayaan Sosial	4. Program Pemberdayaan Sosial 5. Program Penanganan Fakir Miskin
3	Program Rehabilitasi Sosial	6. Program Rehabilitasi Sosial
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	7. Program Perlindungan Sosial
5	Program Penanggulangan Kemiskinan	
Jml	5	**7**

Tahun 2018 terdapat 7 program dengan 746 kegiatan pada Urusan Sosial.

Tabel 3.179 Program Urusan Sosial

No.	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial	319
2.	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Sosial	79
3.	Program Rehabilitasi Sosial	206
4.	Program Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Kesejateraan Sosial	84
5.	Program Penanganan Fakir Miskin	17

No.	Program	Jumlah Kegiatan
6.	Program Pemberdayaan Sosial	19
7.	Program Perlindungan Sosial	22
Jumlah		746

Sumber : Dinas Sosial Prov DKI Jakarta, 2018

Tabel 3.180 Realisasi Program Urusan Sosial

No.	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial	319	313	98,12
2.	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Sosial	79	79	100
3.	Program Rehabilitasi Sosial	206	203	98,54
4.	Program Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial	84	82	97,62
5.	Program Penanganan Fakir Miskin	17	17	100
6.	Program Pemberdayaan Sosial	19	19	100
7.	Program Perlindungan Sosial	22	21	95,45
Jumlah		746	734	98,53

Sumber : Dinas Sosial Prov DKI Jakarta, 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Dalam melaksanakan operasional Urusan Sosial terdapat standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dicapai. Adapun pencapaian SPM Bidang Sosial tahun 2018 adalah :

No.	SASARAN INDIKATOR SPM BIDANG SOSIAL DINAS SOSIAL TAHUN 2010-2015	POPULASI TARGET	TARGET SPM	TARGET TAHUNAN		REALISASI PENCAPAIAN SPM TAHUN 2018					
						DINAS		SUKU DINAS		GABUNGAN	
				VOLUME	CAPAIAN	VOLUME	CAPAIAN	VOLUME	CAPAIAN	VOLUME	CAPAIAN
1	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan sosial dan/ atau UEP/KUBE	323.170	30%	16.159	66%	214.249	66,30%	210	0,06%	**214.459**	**66,36%**
2	Jumlah anak terlantar, anak nakal, anak jalanan dan anak cacat penerima bantuan sosial	12.097	80%	1.573	9%	1.119	9,25%	300	2,48%	**1.419**	**11,73%**
3	Jumlah bekas narapidana, WTS, pengidap penyakit kronis, waria, korban tindak kekerasan/pekerja migran bermasalah sosial menerima bantuan sosial	3.528	80%	459	1%	45	1,28%	-	0,00%	**45**	**1,28%**
4	Jumlah warga binaan sosial yang menerima pelayanan dalam panti sosial	31.010	60%	3.101	26%	8.069	26,02%	-	0,00%	**8.069**	**26,02%**
5	Jumlah PMKS jalanan yang mendapat perlindungan dan penyaluran sosial pertahun	150.000	60%	15.000	4%	6.471	4,31%	0	0,00%	**6.471**	**4,31%**
6	Jumlah panti sosial, sasana dan loka bina karya yang direnovasi/dilakukan perawatan	44	80%	6	64%	28	63,64%	7	15,91%	**35**	**79,55%**
7	Jumlah panti sosial yang memenuhi SOP panti	22	48%	2	100%	22	100,00%		0,00%	**22**	**100,00%**
8	Jumlah lembaga sosial yang mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial	536	60%	54	0%	-	0,00%	53	9,89%	**53**	**9,89%**
9	Pelayanan sosial penanggulangan korban bencana berupa makanan siap saji	5.000.000	80%	650.000	0%	-	0,00%	157.100	3,14%	**157.100**	**3,14%**
10	Jumlah satuan petugas bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana	2.000	80%	260	78%	1.550	77,50%	-	0,00%	**1.550**	**77,50%**
11	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental yang menerima pelayanan sosial/jaminan sosial	7.411	60%	741	5%	344	4,64%	418	5,64%	**762**	**10,28%**
12	Jumlah lanjut usia yang menerima pelayanan sosial/jaminan sosial	9.244	60%	924	157%	14.520	157,07%	90	0,97%	**14.610**	**158,05%**

d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Menurunnya hasil penjangkauan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang terdapat di 283 titik penjagaan di 5 Wilayah Kota Administrasi sebanyak 6.471 PMKS dibandingkan dengan tahun 2017 hasil

penjangkauan yaitu 8.504 PMKS, terdapat pengurangan jumlah yang signifikan dengan dengan bertambahnya titik jaga PMKS Jalanan oleh P3S.

2. Penyelenggaraan Panti Sosial (Permakanan, Sandang, Kesehatan dan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, Keterampilan dan Sosial) sebanyak 6.885 WBS dari 22 Panti Sosial di 47 Lokasi.
3. Sebanyak 29.833 Lansia mendapatkan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dengan 2 tahap yaitu 12.141 Lansia pada tahap pertama dan 2.379 Lansia pada tahap kedua.
4. Adanya Rumah Aman bagi Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak di 2 Lokasi dengan penerima manfaat sebanyak 27 Warga Binaan Sosial (WBS).
5. Adanya Co Working Space SKKT di wilayah Jakarta Pusat di 4 Lokasi yaitu Gedung SKKT Karang Anyar, Gedung SKKT Cempaka Putih, Gedung SKKT Kebon Kosong dan Gedung SKKT Kampung Rawa.
6. Terpilihnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mendapat juara 5, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) mendapat juara 1, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) mendapat juara 1 dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta mendapatkan penghargaan Lencana Adhitya Karya Mahatva Yodha Award Kategori Pembina Umum Terbaik Karang Taruna Provinsi dalam tingkat Nasional acara Penilaian Pilar-Pilar Sosial di tahun 2018.
7. Adanya Kampung Siaga Bencana sebanyak 80 di lokasi rawan bencana dan Tagana sebanyak 1.550 personil.
8. Pelatihan Kemandirian Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yaitu : jumlah penerima UEP/KUBE ada 1.140 KPM

(Keluarga Penerima Manfaat), remaja yang dibina pada wilayah rawan konflik sebanyak 300 orang di Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan dan Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat.

9. Adanya kegiatan Edukasi Perilaku Finansial bagi Keluarga Miskin Penerima UEP/KUBE sejumlah 100 orang untuk wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
10. Adanya pendampingan dalam penyaluran UEP/KUBE yang dilakukan oleh 160 orang pendamping untuk 800 KUBE (1 orang pendamping untuk 5 KUBE).

e. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Suku Dinas Sosial 5 wilayah Kota dan 22 Panti Sosial dengan jumlah pegawai sebanyak 700 orang.

Tabel 3.181 Rekapitulasi Pegawai Dinas Sosial

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**		
	1. Golongan IV	78	
	2. Golongan III	345	
	3. Golongan II	242	
	4. Golongan I	35	
B.	**Eselon**		
	1. Eselon I	0	
	2. Eselon II	1	
	3. Eselon III	32	
	4. Eselon IV	56	
	5. Eselon V	-	
	6. Fungsional Umum	21	
	7.Staf	590	
C.	**Pendidikan**		
	1. S3	1	
	2. S2	78	

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
	3. S1	201	
	4. Diploma	13	
	5. SLTA	331	
	6. SLTP	36	
	7. SD	28	

Sumber : BKD Prov DKI Jakarta, 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.182

Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan Sosial

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1	1	1
2	Eselon III	34	32	32	31	32
3	Eselon IV	57	56	56	52	56
Jumlah		92	89	89	84	89

Sumber : Dinas Sosial Prov DKI Jakarta, 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 89/92 = 96,7%
- Diklat Kepemimpinan : 84/92 = 91,3%
- Kepangkatan : 89/92 = 96,7%

f. Alokasi dan realisasi anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 didanai dengan Anggaran Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (APBD) berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Sosial (Dinas, Suku Dinas dan Panti Sosial) Provinsi DKI Jakarta Tahun Aggaran 2018. Dana yang tersedia secara keseluruhan untuk mendanai tugas pokok dan fungsi adalah sebesar Rp. 600.024.137.434,-

Tabel 3.183 Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial

Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN SOSIAL	452,718,008,528	410,344,302,038	91,37
A. DINAS SOSIAL	600.024.137.434	535.317.537.575	90,27
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	251.595.518.000	243.503.760.339	96,78
2. BELANJA LANGSUNG	348.428.619.434	291.813.777.236	83,75
a. BELANJA PEGAWAI	3.099.070.000	2.801.470.000	90,40
b. BELANJA BARANG DAN JASA	313.520.623.575	267.882838.170	85,44
- Belanja Pemeliharaan	3.807.942.796	3.274.830.805	86,00
c. BELANJA MODAL	34.773.276.823	23.780.574.481	68,39
CATATAN PERBANDINGAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : APBD			
• Belanja Modal : Belanja URUSAN	34.773.276.823	600.024.137.434	5,80
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	3.807.942.796	313.520.623.575	1,21
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	3.807.942.796	600.024.137.434	0,63

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

g. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Sosial tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.184 Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Sosial

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman/ Billboard	5	-	-	-	-	-	-	-	5
2.	Kotak Pengaduan	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Leaflet	1	-	-	-	-	-	-	22	23
4.	Mobil Keliling/Mobil Penyuluhan Sosial	1	1	1	1	1	1	-	-	6
5.	Media Massa (Surat Kabar, TV dan Radio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Website	1								1
7.	E-mail	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	28
8.	Call Center	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Sumber : Dinas Sosial Prov DKI Jakarta, 2018

CATATAN PERBANDINGAN :

- Website : dinsos.jakarta.go.id
- E-mail : dinas.sosial.09@gmail.com
- Call Center : 4265116

Untuk melayani masyarakat yang memerlukan bantuan sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki bebarapa sarana dan prasarana yang berupa panti.

Tabel 3.185 Jenis dan Jumlah Panti MilikPemerintah Provinsi DKI Jakarta

No	Jenis Panti	Jumlah
1	Panti Anak/Remaja (PSAA Balita, PSAA dan PSBR)	8
2.	Panti Tresna Werda (PSTW)	6
3.	Panti Rehabilitasi Cacat (PSBN, PSBD, PSBL dan PSBG)	9
4.	Panti Rehabilitasi Tuna Sosial (PSBI, PSBK dan PSBKW)	6
5.	Panti Orang Terlantar dan Korban Tindak Kekerasan (PSP)	1
6.	Loka Bina Karya	2
7.	Taman Asuhan Anak	2
8.	Rumah Perlindungan	1
9.	Sasana	6
10.	Unit Informasi Layanan Sosial	6
Jumlah		47

Sumber : Dinas Sosial Prov DKI Jakarta, 2018

h. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Dinas Sosial merupakan perpaduan program *Top Down* dan program *Bottom Up* hasil Musrenbang.

Tabel 3.186 Sikronisasi Perencanaan Program Sosial

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	7	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2018	7	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2018	7	RKA : DPA	100
4	DPA 2018	7		

Sumber : Dinas Sosial Prov DKI Jakarta, 2018

i. Permasalahan dan solusi

1. Permasalahan
   - Terdapat kegiatan rehab Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 dan rehab SKKT Sukapura Kota Administrasi Jakarta Utara yang gagal lelang, hal ini dikarenakan tidak adanya penawar yang memenuhi

syarat administrasi (2 kali lelang) sehingga tidak cukup waktu untuk dilakukan proses lelang kembali.

- Terdapat kesalahan penggunaan kode rekening perawatan dan pemeliharaan gedung yang seharusnya pengadaan sarana dan prasarana (belanja modal) pada kegiatan Co-Working Space gedung SKKT sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

2. Solusi
   - Untuk kegiatan rehab gedung SKKT Sukapura Kota Administrasi Jakarta Utara sudah dianggarkan kembali di tahun ini 2019 sedangkan untuk rehab gedung Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 tahun 2020 akan dibuat DED (Detail Engineering Design) terlebih dahulu karena tahun 2021 akan dilaksanakan rehab total.
   - Untuk kegiatan Co-Working Space gedung SKKT akan dianggarkan kembali di APBD-P Tahun ini 2019.

j. Hal lain yang perlu dilaporkan

Peraturan-peraturan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan sosial adalah :

Tabel 3.187

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Sosial

No.	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda / Pergub	Nomor dan Judul Peraturan Daerah/Pergub
1.	Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/1/2007	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV/AIDS
2.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 102/HUK/2007	Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

No.	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda / Pergub	Nomor dan Judul Peraturan Daerah/Pergub
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006	
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998	Peraturan Daerah No 10 Tahun 2011 tentang Penyandang Disabilitas
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan dalam pelaksanaan Urusan Sosial :

No	Nama, Nomor dan Tahun	Judul
1.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979	Kesejahteraan Anak
2.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997	Pengadilan Anak
3.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997	Penyandang Cacat
4.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997	Psikotropika
5.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997	Narkotika
6.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998	Kesejahteraan Lanjut Usia
7.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999	Hak Azasi Manusia
8.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
9.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	Perlindungan Anak
10.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
11.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004	Sistem Jaminan Sosial Nasional
12.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007	Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang
13.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007	Penanggulangan Bencana
14.	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009	Kesejahteraan Sosial
15.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	Sistem Peradilan Pidana Anak

16.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988	Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998	Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
20.	Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/1/2007	Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik
21.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007	Ketertiban Umum
22.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008	Penanggulangan HIV/AIDS
23.	Peraturan Daerah No 10 Tahun 2011	Penyandang Disabilitas
24.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013	Kesejahteraan Sosial

20. Kebudayaan

a. Prioritas urusan

Terdapat 4 Program Prioritas Urusan Kebudayaan dan Tahun 2018 di DKI Jakarta, yaitu :

1. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Seni Budaya
2. Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya
3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kebudayaan

4. Program Kendaraan Operasional Urusan Kebudayaan

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Kebudayaan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.188
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi Urusan Kebudayaan

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Sen iBudaya
2.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya
3.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Seni Budaya dan Pariwisata
4.	Program Pengembangan Kemitraan	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kebudayaan
Jml	**4**	**4**

Sumber : Dinas Parbud Prov DKI Jakarta, 2018

Program urusan Kebudayaan pada tahun 2018 seluruhnya sebanyak 4 program dengan 229 kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Dan dilaksanakan sebanyak 4 program dengan kegiatan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.189
Rincian Program Urusan Kebudayaan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1	Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kebudayaan	53
2	Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Seni Budaya	116
3	Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya	38

4	Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kebudayaan	22
	Jumlah Total	**229**

Sumber : Dinas Parbud Prov DKI Jakarta, 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Adapun kegiatan dan hasil kegiatan pada Urusan Kebudayaan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pengunjung Museum mencapai 3.419.515 Orang
2. Jumlah Bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan sebanyak 18 terdiri dari : Pemugaran bangunan dipulau cipir, Revitalisasi jaringan Air di Museum Seni Rupa dan Keramik, Konservasi Patung/Monumen, Konservasi Koleksi Museum, Pemugaran Makam Belanda Pulau Onrust, Penyelamatan Bastion di Pulau Onrust, Penyelamatan Reservoar VOC di PulauOnrust, PembuatanTanggul Lanjutan di PulauCipir, pemeliharaan sarana dan prasarana museum kesejarahan, pengelolaan dan pengembangan cagar budaya dikawasan kota tua, pemeliharaan dan perawatan kantor dan storage museum kesejarahan jakarta, pemeliharaan dan perawatan gedung museum kesejarahan jakarta, PemeliharaandanPerawatan Mobil Rep 1, Rep 2 dan Peristiwa Cikini, Pemeliharaan dan Perawatan koleksi museum kesejarahan jakarta, perawatan koleksi museum seni, fumigasi koleksi dan gedung museum seni, pemeliharaan sarana dan prasarana gedung monumen nasional, perencanaan pembangunan taman budaya gedung benyamin suaeb, pemasangan conblok halaman gedung eks kodim
3. Jumlah pelaku kebudayaan yang mendapatkan wawasan dan keterampilan sebanyak 9.260 pelaku seni, pada Unit Pusat Pelatihan Seni Budaya jenis pelatihan sebanyak 13 jenis yang diikuti oleh paraGuru, para Pelaku Seni

(sanggar-sanggar) dan masyarakat umum. Selain dilaksanakan pelatihan seni budaya dengan jadwal dan modul pelatihan yang telah ditetapkan, dilaksanakan pula pergelaran hasil pelatihan sebagai evaluasi dan pencarian bakat. Capaian indikator kinerja ini didapat juga dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di 5 (lima) wilayah kota dan 1 (satu) Kabupaten Kepulauan Seribu, saat initerdapat 290 RPTRA yangadadimasing-masingkelurahan tersebar di seluruh DKI Pelatihan Kesenian bagi Guru SD, Guru Tk, Penyutradaraan Seni Teater, Seni musik Gambang Kromong Modern, Gendang, Marawis, Nasyid, Qasidah, Samrah, Seni Rupa Membetik, Tata Rias, Seni Tari Betawi Kreasi, Betawi Tradisi, Kreasi Daerah Lain, Seni Teater Tradisi

Tabel 3.190
Realisasi Program Urusan Kebudayaan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	PeningkatandanPengelolaan Kantor UrusanKebudayaan	53	50	94,34
2.	PembinaandanPemberdayaanPelakuSeniBudaya	116	115	99,14
3.	PemeliharaandanPengembanganPemanfaatanCagarBudaya	38	35	92,11
4.	PengelolaanKendaraanOperasionalUrusan Kebudayaan	22	21	95,45
Jumlah Total		229	221	96,51

Sumber : Dinas Parbud Prov DKI Jakarta, 2018

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Kebudayaan tahun 2018 dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Pariwisata, dengan jumlah

pegawai 264 orang dimana pegawai tersebut juga melaksanakan urusan pariwisata.

Tabel 3.191
Rekapitulasi Pegawai Urusan Kebudayaan

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**	**302**	
	1. Golongan IV	40	
	2. Golongan III	207	
	3. Golongan II	54	
	4. Golongan I	1	
B.	**Eselon**	**302**	
	1. Eselon I	-	
	2. Eselon II	-	
	3. Eselon III	12	
	4. Eselon IV	32	
	5. Eselon V	-	
	6. Fungsional	1	
	7. Pelaksana (Staf)	258	
C.	**Pendidikan**	**302**	
	1. S3	0	
	2. S2	40	
	3. S1	96	
	4. Diploma	12	
	5. SLTA	143	
	6. SLTP	7	
	7. SD	4	

Sumber : Dinas Parbud Prov DKI Jakarta, 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.192
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan Kebudayaan

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	-	0	0	0
2	Eselon III	13	12	13	7	12
3	Eselon IV	27	27	27	10	27
Jumlah		46	43	44	38	43

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 44 / 46 = 95,56 %

- Diklat Kepemimpinan : 38 / 46 = 86,36 %
- Kepangkatan : 43 / 46 = 93,48 %

e. Alokasi Anggaran Urusan Kebudayaan

Alokasi dan realisasi anggaran urusan kebudayaan yaitu sebesar Rp. 120.673.619.008,- sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp. 111.892.397.519,- (90,35%)

Alokasi Anggaran Belanja langsung dialokasikan untuk 2 (dua) urusan yaitu urusan kebudayaan dan urusan pariwisata

Tabel 3.193 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kebudayaan

Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KEBUDAYAAN			
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2. BELANJA LANGSUNG			
a. BELANJA PEGAWAI			
b. BELANJA BARANG DAN JASA			
- Belanja Pemeliharaan			
d. BELANJA MODAL			
CATATAN PERBANDINGAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD			
• Belanja Modal : Belanja URUSAN			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN			

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Kebudayaan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.194
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Kebudayaan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UP	
1.	PapanPetunjuk	1	1	1	1	1	1	6		12
2.	BahanPromosi/Informasi	5	0	0	0	0	0	0	0	5
3.	Brosur	217	0	0	0	0	0	0	0	217
4.	Buku	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000
5.	Poster	12.500	0	0	0	0	0	0	0	12.500
6.	Pocket Map	12.500	0	0	0	0	0	0	0	12.500
7.	Poster	12.500	0	0	0	0	0	0	0	12.500
8	*Souvenir*	4 (20.600)	0	0	0	0	0	0	0	4 (20.600)
9	*Tourism Information Center* (TIC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Boothstand	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11	Call Center	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Website	1	0	0	0	0	0	0	3	4
13	E-mail	1	1	1	1	1	1	1	1	8

Sumber : Dinas Parbud Prov DKI Jakarta, 2018

CATATAN :
- Website : encyclopedia.jakarta-tourism.go.id
- E-mail : tourism @jakarta.go.id
- Call Center : 021-5205454

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa sarana dan prasarana untuk pengembangan seni budaya di Provinsi DKI Jakarta sebnyak 54, yaitu :

1. Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Maruki (7 bangunan) :
   - Teater Besar
   - Teater Kecil
   - Graha Bhakti Budaya

- Galeri Cipta II
- Galeri Cipta III
- Planetarium
- Kampus IKJ (Terdiri 5 Gedung)

2. Gedung Kesenian Jakarta
3. Gedung Kesenian Wayang Orang Bharata
4. Gedung Kesenian Miss Tjitjih
5. Monumen Nasional
6. Tugu Proklamasi
7. Perkampungan Budaya Betawi Setu babakan (1 Kawasan)
8. Pusat Kebudayaan Betawi (Eks Kodim)
9. Museum Sejarah Jakarta
10. Museum Seni Rupa dan Keramik
11. Museum Wayang
12. Museum Bahari
13. Museum Tekstil
14. Museum Djoang 45
15. Museum Prasasti
16. Museum Muhammad Husni Thamrin
17. Museum Sejarah Nasional (Monas)
18. Museum Taman Arkeologi Onrust
19. Situs Marunda
20. Rumah Si Pitung
21. Mesjid Al Alam Marunda
22. Makam TT Jongker
23. Pulau Cipir
24. Pulau Kelor
25. Pulau Bidadari
26. Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) 5 Lokasi :
    - PPSB Jakarta Utara
    - PPSB Jakarta Timur
    - PPSB Jakarta Barat
    - PPSB Jakarta Selatan
    - PPSB Jakarta Pusat
27. Anjungan DKI TMII (2 Lokasi)
    - Anjungan DKI TMII
    - Gedung Sangkrini Jaya Raya
28. Graha Wisata (2 Lokasi)
    - Graha Wisata TMII
    - Graha Wisata Ragunan
29. Laboratorium Karawitan Condet
30. Kawasan Balai Kota
31. Makam Pangeran Jayakarta
32. Makam Pangeran Wijaya Kusuma
33. Balai Budaya Jakarta
34. Kampung Tugu

35. Mesjid Jami Al Mansyur (Tambora)
36. Kawasan Kota Tua
37. Taman Fatahillah
38. Kawasan Luar Batang
39. Kawasan Pecinan
40. Kawasan Pekojan
41. Gedung Sasana Wisata Pulau Untung Jawa
42. Gedung MT Haryono

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Urusan Kebudayaan mencakup seluruh elemen masyarakat khususnya pekerja dan penikmat seni budaya. Oleh karena itu dalam proses perencanaan mengakomodir kepentingan *stakeholder* bidang kebudayaan melalui berbagai forum. Usulan *bottom up* diintegrasikan dengan *top down* menjadi Renja SKPD.

Tabel 3.195
Sinkronisasi Perencanaan Program Kepudayaan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	4	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2018	5	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2018	5	RKA : DPA	100
4	DPA 2018	5	4	100

Sumber : Dinas Parbud Prov DKI Jakarta, 2018

h. Permasalahan dan solusi

Permasalahan urusan kebudayaan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu :

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi kebudayaan.	Untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi kebudayaan dilakukan pengembangan pusat-pusat informasi baik melalui jejaring social, media cetak dan elektronik dan melalui web yang dikelola dinas dan instansi lain (smart city). Yang digunakan untuk efektivitas promosi, pengembangan dan pelestarian

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
		kebudayaan.
2.	Pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM) kebudayaan belum optimal	Untuk mengoptimalkan pemberdayaan SDM kebudayaan, telah dilakukan upaya pelibatan pelaku seni dan komunitas seni (sanggar-sanggar) melalui mengikutsertakan dalam penyelenggaraan event-event local, nasional maupu internasional, peningkatan kompetensi melalui pelatihan seni budaya kearah yang lebih profesional, dan pemberian alat-alat kesenian
3.	Banyak unsur-unsurkebudayaankhususnya budayabetawitidak terjaga keasliannya danhampirpunah	Untuk melindungi dan melestarikan unsur-unsur kebudayaan agar terjaga keasliannya dan tidakpunah, upaya yang telah dilakukan adalah menghidupkan kembali seni budaya pada event-event tradisional, melaksanakan kegiatan eksperimentasi seni budaya yang hampir punah, melakukan kegiatan Nominasi Warisan Budaya Tak Benda dan mengusulkan ke Lembaga terkait pengakuan sebagai hak milik kekayaan inteletual.
4.	Masih kurang memadainya sarana prasarana kebudayaan yang modern dan sesuai dengan tuntutan jaman.	Untuk meningkatkan sarana prasarana yang sesuai dengan tuntutan jaman telah dilakukan pembangunan dan pengembangan gedung-gedung pertunjukan kesenian dengan fasilitas modern sesuai standar Internasional, berkapasitas besar, lengkap dan nyaman. Salah satu kegiatannya adalah penatan/revitalisasi museum, rehab gedung-gedung kesenian, pengembangan sarana dan prasarana di PKJ TIM. Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan.

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
5.	Belum optimalnya pemanfaatan bangunan cagar budaya sebagai media edukasi kebudayaan dan pelestarian sejarah.	Untuk mengoptimalkan pemanfaatan bangunan cagar budaya sebagai media edukasi dan pelestarian sejarah telah dilakukan berbagai konservasi, revitalisasi, dan pameran-pameran kebudayaan dengan memanfaatkan bangunan cagar budaya, melakukan wajib kunjung museum bagi pelajar/mahasiswa, dan melakukan pengawasan berkala terhadap seluruh bangunan cagar budaya di Jakarta.

Sumber : Dinas Parbud Prov DKI Jakarta, 2018

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri yang berkaitan dengan urusan Kebudayaan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut:

Tabel 3.196
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Kebudayaan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Pelestarian Kebudayaan Betawi Pergub 229 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian budaya Betawi Pergub Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Ikon Budaya Betawi Pergub Nomor 192 Tahun 2016 tentang Pembubaran Unit Pengelola Museum Prasasti Pergub Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kota tua

Sumber : Dinas Parbud Prov DKI Jakarta, 2018

21. Statistik

a. Prioritas urusan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran yaitu Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian Urusan Pemerintahaan Bidang Statistik, Sub Urusan Statistik Sektoral penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga terdapat perbedaan urusan statistik yag dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu statistik dasar.

Penyelenggaraan Sub Urusan Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2017 dilaksanakan oleh UPT Pusat Pelayanan Statistik Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 307 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Statistik.

Penyelenggaraan Sub Urusan Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2017 dilaksanakan oleh UPT Pusat Pelayanan Statistik Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 307 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Statistik.

Tugas pokok dan fungsi dalam penyenggaraan statistik sektoral antara lain:

a. Merumuskan kebijakan statistik sektoral Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
b. Melaksanakan tugas operasional statsistik sektoral yang meliputi penghimpunan data, pengolahan data,

penganalisisan data dan penyajian statistik daerah.

c. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi melalui survei dan jajak pendapat tentang program dan kinerja pemerintah daerah.

d. Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan statistik sektoral Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

b. Program dan kegiatan

Program Urusan Statistik melekat pada Program Pengembangan Data Statistik Sektoral.

Tabel 3.197
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi Urusan Statistik

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI
1		Program Pengembangan Data Statistik Sektoral
Jml	0	**1**

Sumber : Diskominfotik Prov DKI Jakarta, 2018

Tabel 3.198
Rincian Program Urusan Statistik

No	Nama Program dan Kegiatan	Jumlah Kegiatan
1.	Program Pengembangan Data Statistik Sektoral	
	- Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Statistik Sektoral	1
	- Pengelolaan Sistem Informasi Statistik Sektoral	1
	- Pembinaan Statistik Sektoral	1
	- Penyelenggaraan Konsultasi Regional PDRB 2018 Se-Jawa Bali NTB dan NTT	1
	- Pelaksanaan Survei Kebijakan Publik	1
	Jumlah	5

Sumber : Diskominfotik Prov DKI Jakarta, 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Seluruh rencana kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2017 dapat dilaksanakan.

Tabel 3.199
Realisasi Program Urusan Statistik

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Pengembangan Data Statistik Sektoral	1	1	100

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
Jumlah Total		1	1	100

Sumber : Diskominfotik Prov DKI Jakarta, 2018

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Statistik Tahun 2017 dilaksanakan oleh UPT Pusat Pelayanan Statistik pada SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Adapun jumlah dan kualifikasi pegawai sebagaimana berikut.

Tabel 3.200 Rekapitulasi Pegawai Urusan Statistik

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**	**7**	
	• Golongan IV	1	
	• Golongan III	5	
	• Golongan II	1	
	• Golongan I	0	
B.	**Eselon**	**7**	
	• Eselon II	0	
	• Eselon III	1	
	• Eselon IV	1	
	• Staf	5	
C.	**Pendidikan**	**7**	
	• S2	0	
	• S1	5	
	• Diploma	0	
	• SLTA	2	
	• SLTP	0	
	• SD	0	

Sumber : Diskominfotik Prov. DKI Jakarta, 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.201 Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan Statistik

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	0	0	0	0	0
2	Eselon III	1	1	1	1	1

3	Eselon IV	1	1	1	0	1
Jumlah		2	2	2	1	2

Sumber : Diskominfotik Prov. DKI Jakarta, 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 2 / 2 = 100,00 %
- Diklat Kepemimpinan : 1 / 2 = 50,00 %
- Kepangkatan : 2 / 2 = 100,00 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Statistik melekat pada Anggaran Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Adapun anggaran yang dialokasikan sebagai berikut.

Tabel 3.202 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Statistik

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN STATISTIK			
1. BELANJA LANGSUNG	2.917.794.962	1.687.471.850	57,83
a. Belanja Alat Tulis Kantor	74.266.500	42.152.600	56,76
b. Belanja Cetakan Khusus	30.128.175	1.650.000	5,48
c. Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia	111.500.000	24.195.000	21,7
d. Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	1.536.545.762	482.568.000	31,41
e. Belanja Jasa Teknologi Informasi dan Kehumasan	95.700.000	90.300.000	94,36
f. Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	847.000.000	847.000.000	100
g. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	3.993.000	-	0
h. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	4.263.050	-	0
i. Belanja Paket/Pengiriman	930.000	-	0
j. Belanja Cetakan Umum	15.908.475	2.131.250	13,4
k. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	197.560.000	197.475.000	99,96

Sumber : Diskominfotik Prov DKI Jakarta, 2018

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Terdapat beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasional pekerjaan dan media informasi Pusat Pelayanan Statistik adalah sebagai berikut :

Tabel 3.203 Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Statistik

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Website	1	statistik.jakarta.go.id
2.	Sistem Informasi Statistik	1	sidatik.jakarta.go.id
3.	E-mail	2	statistikdki@jakarta.go.id , statistikdki@gmail.com

Sumber : Diskominfotik Prov DKI Jakarta, 2018

Pusat Pelayanan Statistik juga menggunakan sarana/media lain yang dimiliki/dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik seperti portal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jakarta.go.id maupun portal satu data DKI Jakarta data.jakarta.go.id.

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan pada Urusan Statistik merupakan kebijakan *top down*, karena urusan ini berup pelayanan informasi kepada instansi pemerintah, masyarakat dan seluruh stakeholder pemerintahan yang memerlukannya.

Tabel 3.204 Sikronisasi Perencanaan Program Statistik

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	1	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2018	1	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2018	1	RKA : DPA	100
4	DPA 2018	1		

Sumber : Diskominfotik Prov DKI Jakarta, 2018

h. Permasalahan dan solusi

Masalah yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan Urusan Statistik sepanjang tahun 2018, antara lain:

- Sulitnya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan statistik sektoral.
- Sulitnya mengumpulkan kebutuhan data statistik dari Perangkat Daerah dan Perangkat Wilayah di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam rangka memperbaiki permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Urusan Statistik periode tahun 2018, diusulkan beberapa solusi sebagai berikut:

- Perlu adanya perekrutan pada posisi jabatan fungsional Statistisi dan pembinaan/bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi di bidang statistik.
- Diperlukan penyusunan kebijakan pedoman pengelolaan statistik sektoral berupa Peraturan Gubernur yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Untuk memudahkan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral Pemerintah Daerah diperlukan percepatan penerbitan Peraturan Presiden tentang Satu Data serta Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari Pemerintah Pusat sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan urusan statistik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

22. Persandian

a. Prioritas urusan

b. Program dan Kegiatan

Program Urusan Persandian tahun 2018 berjumlah 2 Program

Tabel 3.205 Program Urusan Persandian

No	Program	Jumlah Kegiatan
No	**Program**	**Jumlah Kegiatan**
1	Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	1
2	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	1

Sumber : Diskominfotik Prov DKI Jakarta, 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Pencapaian kinerja kegiatan urusan persandian Tahun 2018 sebesar 100% dari rencana kegiatan

Tabel 3.206 Realisasi kegiatan Tahun 2018

No	Program	Jumlah		
		Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	1	1	100
2	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	1	1	100
Jumlah		10	10	100

Sumber : Diskominfotik Prov DKI Jakarta, 2018

d. SKPD yang menyelenggarakan Urusan

Mulai Tahun 2017 urusan Persandian dilaksanakan oleh, Seksi Persandian dan Sistem Keamanan Data, Bidang Jaringan dan Komunikasi Data mempunyai tugas dukungan teknis layanan dan pengelolaan jaringan dan komunikasi data, pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengintegrasian dan pengelolaan

persandian dan sistem keamanan data.

Gambaran kondisi SDM urusan persandian secara rinci berdasarkan Golongan, Jabatan serta tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.207 Rekapitulasi Pegawai Urusan Persandian

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**		
	• Golongan IV		
	• Golongan III	6	
	• Golongan II		
	• Golongan I		
B.	**Eselon**		
	• Eselon II		
	• Eselon III		
	• Eselon IV	1	
	• Staf	5	
C.	**Pendidikan**		
	• S2		
	• S1	6	
	• Diploma		
	• SLTA		
	• SLTP		
	• SD		

Sumber : Diskominfotik Prov. DKI Jakarta, 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.208 Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan Statistik

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II					
2	Eselon III					
3	Eselon IV	1	1	1	1	1
Jumlah		1	1	1	1	1

Sumber : Diskominfotik Prov. DKI Jakarta, 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 1 / 1 = 100,00 %
- Diklat Kepemimpinan : 1 / 1 = 50,00 %
- Kepangkatan : 1 / 1 = 100,00 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Persandian pada Provinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2018 sebesar **Rp. 8.028.995.633** tetapi yang terserap sebesar **Rp. 7.544.899.410** adalah sebagai berikut.

Tabel 3.209 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Persandian

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Renewal Perangkat Security	1.563.784.663	1.466.077.660	93.75%
Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Security Network System	2.499.873.750	2.499.090.000	99.97%
Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Security Network System	3.143.646.220	2.922.590.000	92.97%
Pengadaan Lisensi Anti Virus	211.290.000	170.000.000	80.46%
Tenaga Ahli Network Administrator	120.000.000	120.000.000	100%
Tenaga Ahli Technical Support	219.600.000	178.800.000	81.42%
Pengadaan SSL Certificated dan Watchguard License	82.401.000	49.931.750	60.60%
Pengadaan Technical Training Persandian	63.200.000	62.800.000	99.37%
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia	36.400.000	34.210.000	93.98%
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	88.800.000	41.400.000	46.62%

Sumber : Diskominfotik Prov DKI Jakarta, 2018

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Persandian tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan Prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.210 Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Motor Dinas	1	
2.	Website	1	
3.	Notebook/Laptop	1	

Sumber : Diskominfotik Prov DKI Jakarta, 2018

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan dalam Urusan Persandian.

Tabel 3.211 Sikronisasi Perencanaan Program Persandian

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	2	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2018	1	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2018	2	RKA : DPA	100
4	DPA 2018	2		

Sumber : Diskominfotik Prov DKI Jakarta, 2018

h. Permasalahan dan solusi

1) Bentuk struktur organisasi pelaksanaan urusan Persandian berbentuk Seksi, yakni Seksi Persandian dan Keamanan Data yang berada di bawah Bidang Jaringan dan Komunikasi Data.
   solusi :
   Berkoordinasi dengan bagian organisasi untuk dapat mengusulkan menjadi Bidang Persandian dengan 3 Seksi yakni Seksi Tata Kelola, Seksi Operasional dan Seksi Pengawasan dan Evaluasi. Pengusulan menjadi Bidang ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
   - Tugas pelaksanaan urusan persandian akan semakin banyak sejalan dengan kebutuhan pengamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
   - Unit kerja yang menangani urusan Keamanan Informasi dan Persandian diberikan mandat dalam penyelenggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, dalam pelaksanaannya akan berdampak pada kewenangan pembinaan kabupaten/kota di bawahnya, koordinasi maupun pembuatan kebijakan.

- Pemerintah Provinsi memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan persandian di Pemerintah kabupaten/kota sehingga jika struktur organisasi persandian di Pemerintah Provinsi masih berbentuk Seksi maka pembinaan dan pengawasan akan berjalan kurang optimal.

2) Belum tersedianya ruangan tempat kegiatan sandi (TKS)
Solusi
mengajukan usulan pembuatan TKS sesuai dengan kriteria minimal adanya pembagian ruang dan memenuhi standar keamanan

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

1. Dilakukan evaluasi struktur organisasi Dinas Kominfotik khususnya urusan persandian yang saat ini hanya bagian dari Seksi menjadi Bidang Persandian atau Unit Pengelola Teknis (UPT) atau setingkat eselon III, agar dapat memenuhi kebutuhan pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Penyediaan Ruangan/Tempat Kegiatan Sandi untuk urusan Persandian sesuai Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Tempat Kegiatan sandi

23. Kearsipan

a. Prioritas urusan

- Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan

b. Program dan kegiatan

- Urusan Kearsipan

Tabel 3.212
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Kearsipan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI
	Lainnya Arsip Nasional	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	
3	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	
JML	**3**	**1**

Pada tahun anggaran 2018 terdapat 1 Program Urusan Kearsipan dengan 100 Kegiatan.

Tabel 3.213
Program Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

No	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan	100
	Total	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Dari kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 diperoleh hasil antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.214
Realisasi Program Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan	100	100	100%
	Jumlah	100	100	100 %

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2018

Dari 42 SKPD di Provinsi DKI Jakarta seluruhnya sudah mendapatkan sosialisasi dan berbagai bimbingan teknis sehingga diharapkan sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku.

Untuk SDM pengelola kearsipan telah dilakukan peningkatan pengembangan wawasan dan peningkatan kualitas SDM melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan dan

asistensi Kearsipan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 42 SKPD/UKPD dan 21 kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan.

d. SDM Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, dengan jumlah pegawai sebanyak 221 pegawai, dimana pegawai tersebut juga melaksanakan urusan perpustakaan

Tabel 3.215
Rekapitulasi Pegawai Urusan Kearsipan

No	Kualifikasi	BPAD
A.	**Golongan**	**221**
	1. Gol. IV	19
	2. Gol III	124
	3. Gol II	62
	4. Gol I	6
B.	**Eselon**	**211**
	1. Eselon I	-
	2.Eselon II	1
	3.Eselon III	10
	4.Eselon IV	30
	5. Eselon V	-
	6.Fungsional Arsiparis	17
	Fungsional Pustakawan	16
	7.Pelaksana (Staf)	137
C.	**Pendidikan**	**211**
	1. S3	-
	2. S2	25
	3. S1	72
	4. Diploma	15
	5. SLTA	84
	6. SLTP	10
	7. SD	5

Sumber : BKD Prov.DKI Jakarta, 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.216
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan Kearsipan

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan Yang Terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1		1
2	Eselon III	10	10	10		10
3	Eselon IV	30	30	30		30
	Jumlah	**41**	**41**	**41**		**41**

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 41 / 41 = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : 41 / 41 = 100 %
- Kepangkatan : 41 / 41 = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Anggaran program kearsipan Tahun 2018 mengikut anggaran urusan perpustakaan.

Tabel 3.217 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kearsipan

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KEARSIPAN			
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	36.956.842.919	34.654.272.664	93,76%
2. BELANJA LANGSUNG	37.781.371.164	23.876.442.997	63,19%
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	
b. BELANJA BARANG DAN JASA	11.864.434.887	9.078.143.033	76,52%
- Belanja Pemeliharaan	4.053.093.389	3.451.788.200	85,16%
c. BELANJA MODAL	25.916.936.277	14.798.299.964	57,10%
CATATAN PERBANDINGAN :			
- Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD			
- Belanja Modal : Belanja URUSAN			
- Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa			
- Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN			

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Kerasipan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.218
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Kearsipan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Papan Pengumuman	7	
2.	Kotak Pengaduan	7	
3.	Media Masa	1	Online
4.	Website	1	http://dispusip.jakarta.go.id
5.	E-mail	1	

CATATAN PERBANDINGAN :

- Website : http://dispusip.jakarta.go.id
- E-mail : dispusip@jakarta.go.id

Untuk mendukung kegiatan operasional, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilengkapi dengan sarana dan prasana sebagaimana terlihat pada Tabel

Tabel 3.219 Sarana dan Prasarana Kerasipan

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah
1.	Ruang Sistem Informasi Manajemen Kearsipan (SIMARS)	Ruang
2.	Ruang Pengelolaan Arsif Inaktif dan Statis	Ruang
3.	Ruang Pengelolaan Arsip Media Baru (microfilm, video, foto, kaset suara)	Ruang
4.	Ruang Perawatan Arsip/Dokumen	Ruang
5.	Ruang Arsip Automatik elektronik	Ruang
6.	Ruang Fumigasi Arsip	Ruang
7.	Ruang tahan api	Ruang
8.	Lemari Kardex	Unit
9.	Lemari Roll Opack	Unit
10.	Lemari Kartografi	Unit
11.	Rak Arsip	Unit

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2018

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Kearsipan dilakukan atas dasar pertimbangan amanat UU 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan PP 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan pelaksanaannya meliputi 3 (tiga) aspek yaitu kebijakan kearsipan, Pengelolaan Kearsipan dan Pembinaan kearsipan dengan memperhatikan wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kearsipan.

Tabel 3.220
Sikronisasi Perencanaan Program Kearsipan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	1	RENJA : SKPD RKPD	100
2	RENJA OPD 2018	1	RKA : RENJA SKPD	100
3	RKA 2018	1	DPA : RKA	100
4	DPA 2018	1		

h. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

Solusi

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Kearsipan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.221
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Kearsipan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Pergub. Nomor 145 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah.
2.	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Serah	Pergub Nomor 282 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
	Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangakat Daerah Provinsi DKI Jakarta	Pergub. Nomor 300 tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
4.	Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Pergub. Nomor 122 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum
5.	Perda Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah	Pergub. Nomor 134 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Arsiparis dan Pustakawan
6.		Pergub Nomor 238 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah
7.		Pergub Nomor 213 tahun 2016 tentang Standardisasi Kebutuhan RPTRA
8.		Pergub Nomor 180 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus
9.		Pergub Nomor 2 tahun 2016 tentang Perpustakaan Digital iJakarta
10		Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2005 tentang Wajib Serah Arsip/Dokumen Daerah
11		Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembakuan Sarana dan Prasaran Kearsipan
		Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2010 tentang Jaringan Informasi Keasipan Daerah (JIKD)
		Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2010 Pengelolaan Arsip Inaktif
		Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2010 tentang Pemilihan Arsiparis Teladan
		Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Arsip Statis pada BUMD
		Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2010 tentang Prosedur Pelayanan Kearsipan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
		Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Statis
		Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional Pustakawan
		Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Arsip Dinamis
		Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

24. Perpustakaan

a. Prioritas urusan

- Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan
- Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan
- Program Peningkatan dan Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perpustakaan

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Perpustakaan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 3.222
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Perpustakaan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan	Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	
	NASIONAL	PROVINSI
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan
3	Program Pengembangan Perpustakaan	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perpustakaan
Jml	**3**	**3**

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Tahun 2018

Pada tahun anggaran 2018 terdapat 3 Program Urusan Perpustakaan dengan 639 kegiatan.

Tabel 3.223 Program Urusan Perpustakaan

No	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan	357
2.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan	245
3.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perpustakaan	37
Jumlah		**639**

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Tahun 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Tingkat pencapaian program dan kegiatan Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.224 Realisasi Program Urusan Perpustakaan

No	Program	Jumlah, Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan	350	350	100%
2.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan	243	243	100 %
3.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perpustakaan	134	134	100 %
Jumlah		627	303	100 %

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2018

Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik pada tahun 2018 sebanyak 7.255.384 pengunjung, yang terdiri dari 7.234.648 orang pengunjung perpustakaan

konvensional dan 20.736 pengguna perpustakaan elektronik iJakarta.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki 63 unit armada perpustakaan keliling, yang terdiri dari 2 unit kontainer (Permata), 35 unit mobil perpustakaan, dan 16 unit motor perpustakaan roda dua dan 10 unit motor perpustakaan roda tiga

d. Sumber Daya Manusia urusan Perpustakaan

Program dan kegiatan urusan perpustakaan diselenggarakan dengan sumber daya manusia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. ditingkat Provinsi dan Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota di lima wilayah Kota Administrasi, dengan jumlah pegawai secara keseluruhan sebanyak 221 pegawai, dimana pegawai tersebut juga melaksanakan urusan kearsipan.

Tabel 3.225
Rekapitulasi Pegawai Urusan Perpustakaan

No	Kualifikasi	BPAD
A.	**Golongan**	**211**
	1. Gol. IV	19
	2. Gol III	124
	3. Gol II	62
	4. Gol I	6
B.	**Eselon**	**211**
	1. Eselon I	-
	2.Eselon II	1
	3.Eselon III	10
	4.Eselon IV	30
	5. Eselon V	-
	6.Fungsional Arsiparis	17
	7.Pelaksana (Staf)	137
C.	**Pendidikan**	**211**

No	Kualifikasi	BPAD
	1. S3	-
	2. S2	25
	3. S1	72
	4. Diploma	15
	5. SLTA	84
	6. SLTP	10
	7. SD	5

Sumber: BKD Prov. DKI Jakarta, 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.226
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural PelaksanaUrusan Perpustakaan

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan Yang Terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1		1
2	Eselon III	11	10	10		10
3	Eselon IV	33	30	30		30
	Jumlah	**45**	**41**	**41**		**41**

Sumber : Kepegawaian Dispursip, 2018

Berikut Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan :

- Tingkat Pendidikan : 41 / 41 = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : 41 / 41 = 100 %
- Kepangkatan : 41 / 41 = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Perpustakaan tahun anggaran 2018 merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,

Tabel 3.227
Alokasi dan Realisasi Urusan Perpustakaan

URAIAN	ALOKAS (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN PERPUSTAKAAN			
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	44.271.218.080	41.512.930.796	93,77%
2. BELANJA LANGSUNG	95.629.208.211	81.025.424.738	84,73%

URAIAN	ALOKAS (Rp)	REALISASI (Rp)	%
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	-
b. BELANJA BARANG DAN JASA	42.413.244.924	36.526.709.959	86,12%
- Biaya Pemeliharaan	2.640.866.337	2.424.132.995	91,79%
c. BELANJA MODAL	53.215.963.287	44.498.714.779	83,62%
CATATAN PERBANDINGAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD			
• Belanja Modal : Belanja URUSAN			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN			

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Perpustakaan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.228
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi

No	Jenis Fasilitas/ Prasarna	Jumlah Fasilitas pada BPAD / KPAK								Jml
		Prov	JP	JU	JB	JS	JT	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1	-	7
2.	Kotak Pengaduan	1	1	1	1	1	1	1	-	7
3.	Website	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1	-	7

Website : www.dispusip.jakarta.go.id
E-mail : dispusip@jakarta.go.id

Dalam penyelenggaraan Tugas, Pokok dan Fungsinya Perpustakaan memberikan sarana dan prasarana yang tersebar di Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten berupa :

Tabel 3.229
Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Nama Sarana dan Prasarana		Jumlah
1.	Gedung Perpustakaan Tingkat Provinsi	1 buah
2.	Gedung Perpustakaan Tingkat Kota Jakarta Pusat	1 buah

3.	Gedung Perpustakaan Tingkat Kota Jakarta Utara	1 buah
4.	Gedung Perpustakaan Tingkat Kota Jakarta Barat	1 buah
5.	Gedung Perpustakaan Tingkat Kota Jakarta Selatan	1 buah
6.	Gedung Perpustakaan Tingkat Kota Jakarta Timur	1 buah
7.	Layanan Unit Mobil Perpustakaan Keliling	35 unit
8.	Koleksi Buku	1.127.565 eks.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2018

Setiap gedung perpustakaan umumnya memiliki fasilitas seperti :

3. Fasilitas Perpustakaan Umum Tingkat Provinsi: (1) Ruang Kantor, (2) Ruang Layanan Dewasa, (3) Ruang Layanan Anak – Anak, (4) Ruang Audio Visual, (5) Ruang Layanan Khusus Betawi dan (6) Ruang Audoturium Minat Baca/Ruang rapat, (7) Ruang pengolahan koleksi, (8) Ruang Data Center, (9) Ruang Pameran, (10) Ruang Diskusi, (11) Ruang Bermain Anak.
4. Fasilitas Perpustakaan Umum Tingkat Kota: (1) Ruang Kantor, (2) Ruang Layanan Dewasa, (3) Ruang Layanan Anak – Anak, (4) Ruang Audio Visual, (5) Ruang Layanan Khusus Betawi, (6) Ruang Bermain Anak, (7) Ruang Pengolahan Koleksi. (8). Ruang server.

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan urusan perpustakaan terselenggara dengan memperhatikan amanat RPJMD melalui tahapan harmonisasi dan sinkronisasi serta integrasi program dan anggaran baik secara vertikal maupun horizontal melalui pendekatan Top Down dan Bottom Up baik pada tingkat Provinsi maupun Kota.

Tabel 3.230
Sikronisasi Perencanaan Program Perpustakaan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	3	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2018	3	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2018	3	RKA : DPA	100
4	DPA 2018	3		

h. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Pekerjaan Penyelesaian Pekerjaan Rehab Total Gedung Sudin Pusip Jakarta Timur belum selesai terlaksana pada tahun 2018

2) Solusi

Dilakukan perpanjangan kontrak penyelesaian pekerjaan

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri atau peraturan yang berkaitan dengan urusan Perpustakaan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.231
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Perpustakaan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Pergub. Nomor 145 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah.
2	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Pergub Nomor 282 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangakat Daerah Provinsi DKI Jakarta	Pergub. Nomor 300 tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
4.	Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Pergub. Nomor 122 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
5.		Pergub. Nomor 134 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Arsiparis dan Pustakawan
6.		Pergub Nomor 238 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah
7.		Pergub Nomor 213 tahun 2016 tentang Standardisasi Kebutuhan RPTRA
8.		Pergub Nomor 180 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus
9.		Pergub Nomor 2 tahun 2016 tentang Perpustakaan Digital iJakarta

C. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Prioritas Urusan :

Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan.

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Kelautan dan Perikanan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 %, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.232
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Program	
	Nasional	**Provinsi**
1	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
2	Program Pengembangan dan Pengelolaa Sumber Daya Kelautan	Program Peningkatan dan pengawasan sumber daya kelautan yang berkelanjutan
Jml	**2**	**2**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

Program dalam Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Pertanian tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.233 Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Program	Jumlah Kegiatan
1	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	76
2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kelautan dan perikanan	22
3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kelautan dan perikanan	5
Total		**103**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2018 dalam Urusan Kelautan dan Perikanan antara lain :

Tabel 3.234 Realisasi Program Urusan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Pertanian

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	76	76	100
2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kelautan dan perikanan	22	22	100
3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kelautan dan perikanan	5	5	100
Total		103	103	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

Capaian lain dalam urusan Kelautan dan Perikanan antara lain sebagai berikut.

1) Konsumsi ikan penduduk DKI Jakarta perkapita selama 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 3.235
Konsumsi Ikan di Provinsi DKI Jakarta

No.	Tahun	Realisasi (Kg)
1.	2011	24,79
2.	2012	24,92
3.	2013	31,31
4.	2014	31,46
5.	2015	31,46
6.	2016	33,03
7.	2017	38,79
8.	2018	39,62

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

Konsumsi ikan perkapita/tahun cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan melalui kegiatan Kampanye Gemar Makan Ikan, Gelar Hasil Perikanan, Lomba Masak Ikan dan Diversifikasi Produk Olahan Hasil Perikanan.

- Produksi perikanan DKI Jakarta dihasilkan dari kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Volume dan nilai produksi perikanan DKI Jakarta tahun 2015 - 2018

Tabel 3.236
Volume dan Nilai Produksi Perikanan di DKI Jakarta

No.	Komoditi	Tahun				
		2014	2015*)	2016*)	2017	2018
1.	Perikanan Tangkap	225.355,30	289.214,10	143.894,00	135.619,00	107.494,66
	- Volume (ton)	4.288.061.809,80	5.978.173.954,10	3.443.919.449,00	3.268.950.802,00	2.738.312.276,95
	- Nilai (Rp. 1000)					
		6.970,63	7.959,29	4.836,36	4.368,50	3.813,82
2.	Perikanan Budidaya	175.968.817,00	214.082.581,00	121.933.828,00	108.979.366,00	89.882.974,30
	- Volume (ton)					
	- Nilai (Rp. 1000)	232.325,93	297.173,39	148.730,36	139.987,50	107.494,66
	Total	4.464.030.626,80	6.192.256.535,10	.565.853.277,00	3.377.930.168,00	.828.195.251,25
	- Volume	225.355,30	289.214,10	143.894,00	135.619,00	107.494,66

	(ton)					
	- Nilai (Rp. 1000)	4.288.061.809,80	5.978.173.954,10	3.443.919.449,00	3.268.950.802,00	2.738.312.276,95

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

Kegiatan usaha perikanan budidaya yang terus dikembangkan adalah budidaya tambak, budidaya kolam dan budidaya laut. Luas lahan perikanan di Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2018 umumnya didominasi oleh budidaya tambak. Produksi perikanan budidaya laut sedang digalakkan di BBIL (Balai Benih Induk Laut) di Pulau Tidung. terkait dengan peningkatan produksi, peningkatan produksi budidaya diarahkan pada budidaya laut di wilayah Kepulauan Seribu.

Ekspor ikan konsumsi selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 3.237
Ekspor Hasil Perikanan dari Provinsi DKI Jakarta

Ekspor Ikan Konsumsi	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018*)
- Volume (kg)	58.000.189,83	93.107.768,01	85.451.000	179.967.371,53	179.967.371,53
- Nilai (US $)	431.608.850,90	675.619.148,33	1.060.000.000	1.139.150.908,88	1.139.150.908,88
- Jumlah SME	10.639	10.991		9.834	9.834

SME = Sertifikat Mutu Ekspor
*) = angka sementara

Pada tahun 2018 volume ekspor ikan konsumsi Provinsi DKI Jakarta menurun tetapi dan nilai ekspor meningkat. Negara tujuan ekspor adalah Jepang, USA, Vietnam, Iran, Thailand dan Singapura dan lain-lain

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Pertanian, dengan jumlah pegawai 150 orang (termasuk di dalamnya Suku Dinas dan UPT).

Tabel 3.238
Rekapitulasi Pegawai Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Klasifikasi	Jumlah Pegawai Dinas/Sudin/UPT								Jumlah
		Prov	JP	Jut	JT	JSI	JBr	Kep. 1000	UPT	
A.	**Golongan**	**40**	**4**	**16**	**13**	**11**	**7**	**9**	**21**	**121**
	• Golongan IV	6	1	2	3	3	3	2	1	**21**
	• Golongan III	29	3	14	10	6	4	7	13	**86**
	• Golongan II	5				2			6	**13**
	• Golongan I								1	**1**
B.	**Eselon**	**40**	**4**	**16**	**13**	**11**	**7**	**9**	**21**	**121**
	• Eselon II	1								**1**
	• Eselon III	2		1				1	2	**6**
	• Eselon IV	6	1	2	2	1	1	2	2	**17**
	• Fungsional	1	1		2				7	**11**
	• Staf	30	2	13	9	10	6	6	10	**86**
C.	**Pendidikan**	**40**	**4**	**16**	**13**	**11**	**7**	**9**	**21**	**121**
	• S3									**0**
	• S2	7	1	1	2	1	1	1	1	**15**
	• S1	17	2	4	4	6	4	3	2	**42**
	• Diploma	1			2	1		1	2	**7**
	• SLTA	14	1	11	5	2	2	4	14	**53**
	• SLTP	1				1			1	**3**
	• SD								1	**1**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.239
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural
Pelaksana Kelautan dan Perikanan

No.	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan Yang Terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Dinas					
	• Eselon II	1	1	1	1	1
	• Eselon III	2	2	2	1	2
	• Eselon IV	7	6	6	6	6

No.	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan Yang Terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
2	Sudin Jakpus					
	• Eselon III	0	0	0	0	0
	• Eselon IV	1	1	1	1	1
3	Sudin Jakut					
	• Eselon III	1	1	1	1	1
	• Eselon IV	2	2	2	2	2
4	Sudin Jaktim					
	• Eselon III	0	0	0	0	0
	• Eselon IV	2	2	2	2	2
5	Sudin Jaksel					
	• Eselon III	0	0	0	0	0
	• Eselon IV	1	1	1	1	1
6	Sudin Jakbar					
	• Eselon III	0	0	0	0	0
	• Eselon IV	1	1	1	1	1
7	Sudin Kep Seribu					
	• Eselon III	1	1	1	1	1
	• Eselon IV	2	2	2	1	2
8	UPT					
	• Eselon III	2	2	2	0	2
	• Eselon IV	2	2	2	2	2
	JUMLAH					
	• Eselon II	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
	• Eselon III	6	6	6	3	6
	• Eselon IV	18	17	17	16	17
	TOTAL	25	24	24	20	24

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 24 / 24 = 100,00 %
- Diklat Kepemimpinan : 20 / 24 = 100,00 %
- Kepangkatan : 24 / 24 = 100,00 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Adapun alokasi anggaran urusan Kelautan dan Pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.240
Alokasi Program Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Pertanian

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	499.602.826.078	364.627.490.435	72,98
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2. BELANJA LANGSUNG	135.532.740.178	106.795.874.962	78,80
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	0
b. BELANJA BARANG DAN JASA	58.637.989.467	47.993.006.175	81,85
- Belanja Pemeliharaan	11.370.876.746	8.760.080.114	77,04
c. BELANJA MODAL	76.894.750.711	58.802.868.787	76,47
CATATAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	499.602.826.078	57.365.040.315.366	0,87
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	58.802.868.787	364.627.490.435	16,13
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	8.760.080.114	47.993.006.175	18,25
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	8.760.080.114	364.627.490.435	2,40

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Kelautan dan Perikanan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.241
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi UrusanKelautan dan Perikanan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarna	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1	2	9

No	Jenis Fasilitas/ Prasarna	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
2.	Kota Pengaduan	1	1	1	1	1	1	1	2	9
3.	Website	1								1
4.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1	2	9
5	Call Center	1	1	1	1	1	1	1	2	9

Summber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

Pemerintah Provinsi DKI memiliki beberapa sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasionalisasi Urusan Kelautan dan Perikanan.

Tabel 3.242
Sarana dan Prasarana Urusan Kelautan dan Pertanian

Urian Sarana dan Prasarana	Jumlah
1. Balai Pengujian Mutu &Pengolahan Hasil Perikanan	1
2. Pusat Budidaya Perikanan - Balai Benih Ikan Ciganjur - Balai Benih Ikan Ujung Menteng - Balai Benih Ikan Kalideres - Balai Benih Ikan Ciracas - Balai Benih Ikan Laut Pulau Tidung - Pusat Promosi Hasil Perikanan Sumenep - Pusat Promosi Hasil Perikanan Cngkareng	7 sub unit
3. Balai Teknologi Penangkapan Ikan, yang mempunyai beberapa perangkat pendukung antara lain : - Gedung bengkel dan Training - Gedung Pelayanan Perbaikan kapal - Gedung Workshop - Gedung Basuic Safety Training - Simulator Navigasi Kapal dan Alat tangkap Ikan - Galangan kapl (docking) - Kapal latih perikanan - Tempat perbaikan alat tangkap ikan/jaring - Gudang tempat peralatan bengkel perkapalan - Kios tempat alat-alat perikanan dan perbekalan nelayan - Dermaga bongkal muat kapal perikanan - Wisma penginapan	1
4. Unit Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan	1
5. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - TPI Muara Baru - TPI Muara Angke - TPI Kamal Muara - TPI Kalibaru	6

- TPI Cilincing - TPI Pulau Pramuka	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan tahapan perencanaan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta. Perencananan merupakan gabungan dari *Top down* dan *bottom up planning* melalui proses Musrenbang.

Tabel 3.243
Sikronisasi Perencanaan Program Kelautan dan Perikanan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	3	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2018	3	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2018	3	RKA : DPA	100
4	DPA 2018	3		

Summber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

h. Permasalahan dan solusi

- Dalam mengelola sumberdaya kelautan masih terkendala belum adanya legalitas perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap UU Nomor 27 Tahun 2007. Untuk itu selain dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, juga dilakukan perluasan kawasan konservasi. rehabilitasi ekosistem laut pesisir dan optimalisasi pengembangan lembaga pengawas sumberdaya, serta memperkuat kapasitas pendukung.
- Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya perikanan masih terhambat oleh sarana dan prasaranam pelabuhan ikan melebihi daya tampung, kurangnya pasokan benih ikan dan rendahnya teknologi budidaya. Upaya yang dilakukan antara lain pengembangan sarana pelabuhan, pemberdayaan nelayan, pengembangan pusat pemasaran ikan hias dan pembangunan sarana promosi.
- Belum optimalnya penataan kawasan pangkalan pendaratan ikan Muara Angke sehingga perlu penataan

kawasan Pelabuhan Muara Angke.

- Perairan Teluk Jakarta sangat dipengaruhi oleh 13 sungai yang bermuara di pesisir teluk Jakarta yang disinyalir telah mengakibatkan pencemaran terutama bersumber dari limbah domestik. Dalam upaya mengurangi bahkan menghilangkan pencemaran lingkungan perairan Teluk Jakarta, perlu upaya koordinasi yang menyeluruh antar dinas/instansi terkait yang dikoordinator di Tingkat Provinsi.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Kelautan dan Perikanan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.244
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2004	Perda No. 13 Tahun 1997 tentang Usaha Perikanan
		Pergub No. 159 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Summber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

Keberhasilan pembangunan kelautan dan pertanian khususnya dibidang perikanan dan kelautan dapat terwujud bila segala potensi sumberdaya dan peluang yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya lestari dan bertanggung jawab.

Capaian IKU RPJMD 2018 Urusan Kelautan dan Perikanan

Program	Indikator Program	Satuan	IKU 2018		Keuangan	
			Target	Capaian	Target	Capaian
Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	Jumlah produksi perikanan	ton	703.786	610.041	95.120.147.680	79.558.650.222
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kelautan dan perikanan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	17.109.404.695	15.194.912.278
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kelautan dan perikanan	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	315.490.922	272.708.115
Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Pelanggaran	83	65	585.300.319	539.768.600
Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang berhasil direhabilitasi	Ha.	141	141	5.044.698.699	4.776.479.632

2. Pertanian

a. Prioritas urusan

Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Pertanian yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 %

Tabel 3.245
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Pertanian

No.	Program	
	Nasional	Provinsi
1	Program Pengembangan Agribisnis	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jml	**2**	**2**

Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

Tahun 2018 terdapat 3 Program yang terdiikuti dalam 108 kegiatan dalam Urusan Pertanian sebagaimana terlihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.246
Program Urusan Pertanian

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	80
2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian	24
3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pertanian	4
	Total	**108**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Kegiatan dan hasil kegiatan selama Tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.247
Realisasi Program Urusan Pertanian

No.	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	80	80	100
2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian	24	24	100
3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pertanian	4	4	100
	Total	**108**	**108**	**100**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Pertanian Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Pertanian, dengan jumlah pegawai 228 orang (termasuk di dalamnya Suku Dinas dan UPT).

Tabel 3.248
Rekapitulasi Pegawai Urusan Pertanian

No	Klasifikasi	Jumlah Pegawai Dinas/Sudin/UPT								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	Kep. 1000	UPT	
A.	**Golongan**	**39**	**23**	**21**	**37**	**27**	**28**	**5**	**48**	**228**
	• Golongan IV	12	3	3	4	4	5	2	1	**34**
	• Golongan III	24	17	15	31	21	19	2	33	**162**
	• Golongan II	3	2	3	2	2	4	1	14	**31**
	• Golongan I		1							**1**
B.	**Eselon**	**39**	**23**	**21**	**37**	**27**	**28**	**5**	**48**	**228**
	• Eselon II									**0**

No	Klasifikasi	Jumlah Pegawai Dinas/Sudin/UPT								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	Kep. 1000	UPT	
	• Eselon III	3			1		1		1	**6**
	• Eselon IV	7	1	2	2	2	2	1	1	**18**
	• Fungsional	5	9	9	8	6	5	2	7	**51**
	• Staf	24	13	10	26	19	20	2	39	**153**
C.	**Pendidikan**	**39**	**23**	**21**	**37**	**27**	**28**	**5**	**48**	**228**
	• S3									**0**
	• S2	11	2	2	1	2	2			**20**
	• S1	14	8	4	14	9	7	2	12	**70**
	• Diploma	2	2	1	2	7	3			**17**
	• SLTA	9	10	13	20	9	16	3	28	**108**
	• SLTP	3	1						2	**6**
	• SD			1					6	**7**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.249
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Pertanian

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Dinas					
	• Eselon II					
	• Eselon III	3	3	3	3	3
	• Eselon IV	7	7	7	7	7
2	Sudin Jakpus					
	• Eselon III					
	• Eselon IV	1	1	1	1	1
3	Sudin Jakut					
	• Eselon III					
	• Eselon IV	2	2	2	2	2

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
4	Sudin Jaktim					
	• Eselon III	1	1	1	0	1
	• Eselon IV	2	2	2	2	2
5	Sudin Jaksel					
	• Eselon III					
	• Eselon IV	2	2	2	1	2
6	Sudin Jakbar					
	• Eselon III	1	1	1	1	1
	• Eselon IV	2	2	2	2	2
7	Sudin Kep Seribu					
	• Eselon III					
	• Eselon IV	1	1	1	1	1
8	UPT					
	• Eselon III	1	1	1	1	1
	• Eselon IV	1	1	1	1	1
	JUMLAH					
	• Eselon II	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	• Eselon III	6	6	6	5	6
	• Eselon IV	18	18	18	17	18
	TOTAL	24	24	24	22	24

Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 24 / 24 = 100,00 %
- Diklat Kepemimpinan : 22 / 24 = 91,67 %
- Kepangkatan : 24 / 24 = 100,00 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Pertanian merupakan bagian dari alokasi anggaran pada Dinas Kelautan dan Pertanian dan SKPD/UKPD lainnya, yaitu :

Tabel 3.250 Alokasi Program Kegiatan Urusan Pertanian pada Dinas Kelautan dan Pertanian

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN PERTANIAN	49.880.349.896	38.697.200.288	77,58

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2. BELANJA LANGSUNG	49.880.349.896	38.697.200.288	77,58
a. BELANJA PEGAWAI	73.073.200	73.073.200	0,00
b. BELANJA BARANG DAN JASA	42.807.625.878	33.231.953.801	77,63
- Belanja Pemeliharaan	3.830.887.465	2.968.955.966	77,50
c. BELANJA MODAL	6.999.650.818	5.392.173.287	77,03
CATATAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : APBD	49.880.349.896	57.365.040.315.366	0,09
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	5.392.173.287	38.697.200.288	13,93
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	2.968.955.966	33.231.953.801	8,93
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	2.968.955.966	38.697.200.288	7,67

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Pertanian tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.251
Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Pertanian

Urian Sarana dan Prasarana	Jumlah
1. Kebun bibit pertanian	16 lokasi
2. Pasar Bunga Rawa Belong	1 lokasi
3. Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Sapi/ Kerbau	2
4. RPH kambing/Domba	3
5. RPH Babi	1
6. Balai Kesehatan Hewan dan ikan	1
7. Pusat Teknologi Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan	1
8. Pusat Pengembangan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Kehutanan	1

9. Balai Proteksi tanaman	1
10. Pusat Pelatihan (Training Centre/TC) Pertanian Klender Jakarta Timur	1

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

Tabel 3.252
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Pertanian

No	Jesnis Fasilitas/ Prasarna	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1	2	9
2.	Kota Pengaduan	1	1	1	1	1	1	1	0	7
3.	Website	1								1
4.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1	2	9
5.	Call Center	1	1	1	1	1	1	1	2	9

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

Provinsi :
- Website : dkpjakarta.web.id
- E-mail : dkp.jakarta@yahoo.com
- Call Center : 021 6007251 , 021 6286625, 021 6285278, 021 6285484

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Pertanian merupakan gabungan *bottom up* dan *top down planning*. yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Kota/Kabupaten Administrasi dan badan Perencanaan Daerah.

Tabel 3.253
Sinkronisasi Perencanaan Program Pertanian

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	3	RKPD : RENJA SKPD	100,00
2	RENJA SKPD 2018	3	RENJA SKPD : RKA	100,00
3	RKA 2018	3	RKA : DPA	100,00
4	DPA 2018	3		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

h. Permasalahan dan solusi

- Semakin menurunnya luas lahan sawah di DKI Jakarta sebagai akibat dari alih fungsi lahan, sehingg keberadaan

sawah di DKI Jakarta perlu dipertahankan dan dijadikan sawah abadi sebagai salah satu bentuk Ruang Terbuka Hijau. Untuk itu diperlukan koordinasi lintas sektoral, baik untuk mempertahankan keberadaan sawah maupun untuk intensifikasi penanaman produk pertanian dalam ruang yang sempit tetapi memiliki produktivitas yang tinggi.

- Ketergantungan kebutuhan komoditas pertanian dari luar Provinsi DKI Jakarta sangta besar, belum adanya standarisasi mutu komoditas pertanian, termasuk perlu adanya ketentuan dan peraturan mengenai pengawasan peredaran produk pertanian, masih lemahnya perlindungan konsumen terhadap bahaya pestisida dan zat-zat berbahaya lainnya, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama dengan daerah produsen.

i. Hal-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Pertanian yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.254
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Pertanian

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Keputusan menteri Pertanian No. 481/KPTS/OT.2210/5/98 tentang Penerapan Standarisasi Komoditas Hasil Pertanian	Peraturan Daerah **(PERDA)** Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta **Nomor 8 Tahun 2004** Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2	Keputusan menteri Pertanian No. 481/KPTS/OT.2210/5/98 tentang Penerapan Standarisasi Komoditas Hasil	Pergub Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 190 Tahun 2010 tentang Pengendalian Mutu dan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
	Pertanian	keamanan Komoditas Hasil pertanian
3	Peraturan menteri Pertanian Nomor 50/permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di pemukiman.	Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan peredaran Unggas
4	Peraturan menteri Pertanian Nomor 50/permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di pemukiman.	Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas
5.	Peraturan menteri Pertanian Nomor 50/permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di pemukiman.	Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 146 Tahun 2007 tentang Petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 4 tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan peredaran unggas
6.	Peraturan menteri Pertanian Nomor 50/permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di pemukiman.	Kepgub Provinsi DKI Jakarta Nomor 1909/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1627/2009 tentang Lokasi Penampungan dan Penampungan Unggas

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

- Panen dan produksi padi, jagung, kacang tanah dan ubi kayu dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.255
Panen dan Produksi Padi, Jagung, Kacang Tanah dan Ubi Kayu di DKI Jakarta

No.	Komoditi	Tahun						
		2012	2013*)	2014	2015	2016*)	2017	2018
1.	Padi - Panen (Ha) - Produksi (Ton) - Produktivitas (Kwt/Ha)	1.839 10.208 55,50	1.744 10.268 58,88	1.360 7.445 54,74	1.137 6.361 55,95	1.385 7.858 56,73	787,1 4.238 5,38	690 3.990 5,78

No.	Komoditi	Tahun						
		2012	2013*)	2014	2015	2016*)	2017	2018
2.	Jagung - Panen (Ha) - Produksi (Ton) - Produktivitas (Kwt/Ha)	 10 19 19,00	 8 15 19,00					
3.	Kacang Tanah - Panen (Ha) - Produksi (Ton) - Produktivitas (Kwt/Ha)	 6 6 10,00	 5 5 10,00					
4.	Ubi Kayu - Panen (Ha) - Produksi (Ton) - Produktivitas (Kwt/Ha)	 14 164 117,00	 13 152 117,00					

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

Pencapaian RPJMD urusan pertanian tahun 2018

Program	Indikator Program	Satuan	IKU 2018		Keuangan	
			Target	Capaian	Target	Capaian
Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Produksi Pertanian dan Peternakan	ton	69.229	53.197	65.396.647.826	50.687.520.976
Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kasus penyakit menular strategis	kasus	12	10	7.077.746.690	6.181.777.913
Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah pelanggaran bidang pertanian dan peternakan	kasus	10	7	73.246.800	66.774.000
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	14.271.084.716	13.701.541.365
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pertanian	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	3	589.618.048	364.169.505

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2018

3. Kehutanan

a. Prioritas urusan

- Program Pengelolaan Pertamanan
- Program Pengelolaan Pemakaman
- Program Pengelolaan Hutan
- Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan
- Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kehutanan
- Program Konservasi Satwa

b. Program dan kegiatan

Program Nasional Urusan Kehutanan tidak ada, Adapun perbandingan program urusan Kehutanan yang ada di Provinsi DKI Jakarta dengan program nasional adalah sebagai berikut.

Tabel 3.256
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
UrusanKehutanan

No	Program	
	Nasional	**Provinsi**
1		Program Pengelolaan Pertamanan
2		Program Pengelolaan Pemakaman
3		Program Pengelolaan Hutan
4		Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan
5		Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kehutanan
6		Program Konservasi Satwa
Jml	**0**	**6**

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. DKI Jakarta, 2018

Pada tahun anggaran 2018, Urusan Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 program dan 215 kegiatan. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.257
Program Urusan Kehutanan

No.	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1	Program Pengelolaan Pertamanan	39
2	Program Pengelolaan Pemakaman	23
3	Program Pengelolaan Hutan	25
4	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan	91
5	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kehutanan	32
6	Program Konservasi Satwa	5
	Total	215

Sumber : Kehutanan Prov. DKI Jakarta, 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Beberapa kegiatan dan hasil kegiatan pada Urusan Kehutanan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.258
Realisasi Program Urusan Kehutanan

No.	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Pertamanan	39	36	92.31
2	Program Pengelolaan Pemakaman	23	21	91.30
3	Program Pengelolaan Hutan	25	23	92.00
4	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan	91	88	96.70
5	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kehutanan	32	32	100
6	Program Konservasi Satwa	5	5	100

No.	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
Total		215	205	95.35

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. DKI Jakarta, 2018

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Kehutanan Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, dengan jumlah pegawai 699 orang (termasuk di dalamnya Suku Dinas dan UPT) adalah sebagai berikut.

Tabel 3.259
Rekapitulasi Pegawai Urusan Kehutanan

No	Klasifikasi	DINAS KEHUTANAN	Jumlah
A.	**Golongan**	**699**	**699**
	• Golongan IV	54	54
	• Golongan III	370	370
	• Golongan II	247	247
	• Golongan I	28	28
B.	**Eselon**	**699**	**699**
	• Eselon II	1	1
	• Eselon III	11	11
	• Eselon IV	40	40
	• Fungsional	6	6
	• Staf	641	641
C.	**Pendidikan**	**699**	**699**
	• S3	-	-
	• S2	72	72
	• S1	229	229
	• Diploma	64	64
	• SLTA	251	251
	• SLTP	36	36
	• SD	47	47

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. DKI Jakarta, 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.260
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Kehutanan

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Dinas Kehutanan	**52**	**52**	**52**	**17**	**52**
	• Eselon II	1	1	1	-	1
	• Eselon III	11	11	11	5	11
	• Eselon IV	40	40	40	12	40
	TOTAL	**52**	**52**	**52**	**17**	**52**

Sumber : Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta, 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 52 / 52 = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : 17 / 52 = 35,69 %
- Kepangkatan : 52 / 52 = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Kehutanan merupakan bagian dari alokasi anggaran pada Dinas Kehutanan dan SKPD/UKPD lainnya, yaitu :

Tabel 3.261
Alokasi Program Kegiatan Urusan Kehutanan pada Dinas Kehutanan

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KEHUTANAN	296.612.417	288.182.700	97,16
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2. BELANJA LANGSUNG	296.612.417	288.182.700	97,16
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	0,00
b. BELANJA BARANG DAN JASA	296.612.417	288.182.700	97,16
- Belanja Pemeliharaan	72.193.792	69.723.500	96,58
c. BELANJA MODAL	-	-	#DIV/0!
CATATAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : APBD	296.612.417	57.365.040.315.366	0,0005

• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	-	288.182.700	0,0000
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	69.723.500	288.182.700	24,19
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	69.723.500	288.182.700	24,19

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Kehutanan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.262
Sarana dan Prasarana
Urusan Kehutanan

Urian Sarana dan Prasarana	Jumlah
1. Pusat Perkayuan - TPK Cipinang - TPK Pondok Pinang - TPK Sukapura - TPK Ujung Menteng	4 Sub unit
2. Pusat Peredaran Hasil Hutan - Pos Pelayanan Sunda Kelapa - Pos Pelayanan Kalibaru - Pos Pelayanan Klender - Pos Pelayanan Ujung Menteng - Pos Pelayanan Cengkareng	5 sub unit

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. DKI Jakarta, 2018

Tabel 3.263
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Kehutanan

No	Jesnis Fasilitas/ Prasarna	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1		1	7
2.	Kota Pengaduan	1	1	1	1	1	1		1	7
3.	Website	1							1	2
4.	E-mail	1	1	1	1	1	1		1	7
5.	Call Center	1	1	1	1	1	1		1	7

Sumber : Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta, 2018

Provinsi
- Website : kehutanan.jakarta.go.id
- E-mail : distama@jakarta.go.id
- Call Center : 021 5328454

Jakarta Pusat
- E-mail : sudintama_jakpus@jakarta.go.id
- Call Center : 021 34834611

Jakarta Utara
- E-mail : sudintama_jakut@jakarta.go.id
- Call Center : 021 4302072

Jakarta Timur
- E-mail : sudintama_jaktim@jakarta.go.id
- Call Center : 021 48703470

Jakarta Selatan
- E-mail : sudintama_jaksel@jakarta.go.id
- Call Center : 021 72792522

Jakarta Barat
- E-mail : sudintama_jakbar@jakarta.go.id
- Call Center : 021 58356233

UP. Taman Margasatwa Ragunan
- Website : ragunanzoo.jakarta.go.id
- E-mail : ragunanzoo_tmr@yahoo.co.id
- Call Center : 021 78845280

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Kehutanan merupakan gabungan *bottom up* dan *top down planning*, yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Kota/Kabupaten Administrasi dan Badan Perencanaan Daerah.

Tabel 3.264
Sinkronisasi Perencanaan Program Kehutanan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	6	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2018	6	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2018	6	RKA : DPA	100
4	DPA 2018	6		

Sumber : Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta, 2018

h. Permasalahan dan solusi

- Keterbatasan lahan dalam mewujudkan Ruang terbuka hijau (RTH) guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta sebagimana diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga perlu pembebasan lahan milik/privat

dengan APBD Provinsi DKI Jakarta.

- Kesadaran sebagian pihak terhadap RTH/Hutan Kota dan Hutan Negara masih rendah sehingga dibeberapa kawasan masih terjadi perambahan/penyerobotan lahan secara illegal, sehingga perlu peningkatan pengamanan dan pengawasan kawasan, pembangunan pos jaga dan pagar pengaman, operasi terpadu, koordinasi lintas sektor, pembuatan papan peringatan/larangan dan penindakan.
- Kesadaran sebagian masyarakat/pihak dalam mendukung program pemerintah Öne Billon Trees"/Program Penanaman Satu milyar Pohon masih belum optimal, sehingga perlu sosialisasi, penggalangan "CSR/Coorporate Social Responsibility pada BUMN, BUMS untuk ikut berpartisipasi mendukung penanaman pohon serta sumbangan bibit (buah-buahan dan tanaman pelindung) secara cuma-cuma

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

1) Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Kehutanan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.265
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Kehutanan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Permen Kehutanan No. P.55/MENHUT-II/2006, jo. P.63/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara jo. Permenhut P.8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut No. P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara	Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Sumber : Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta, 2017

2) Data hasil pembebasan dari tahun 2010-2016 adalah :

Luas kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta terlihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.266
Luas Kawasan Hutan Perairan dan Daratan di Provinsi DKI Jakarta (Ha)

No	Status Hutan	LUAS (Ha)
1	Taman Nasional Kepulauan Seribu	107.489,00
JUMLAH		107.489,00
1	**Hutan Lindung**	**44,76**
	a. Hutan Lindung Angke Kapuk	44,76
2	**Hutan Produksi**	**157,65**
	a. Kawasan Jalur Hijau Mangrove Tol Sedyatmo	95,05
	b. Transmisi PLN	23,70
	c. Cengkareng Drain	28,39
	d. Kebun Bibit/Arboretum	10,51
3	**Hutan Konservasi**	**210,42**
	a. Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke	25,02
	b. Kawasan Wisata Alam Angke Kapuk	99,82
	c. Suaka Margasatwa Pulau Rambut	45,00
	d. Cagar Alam Pulau Bokor	18,00
	e. Taman Nasional Kepulauan Seribu	18,41
	f. Lahan Kompensasi PT. KNI	1,73
	g. Lahan Kompensasi PT. Mandara Permai	2,44
Jumlah		**412,83**

Ket : Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6310/Kpts-II/2002

Tabel 3.267 Data Hutan Kota Hasil Pembebasan

NO.	LOKASI	LUASAN (Ha/M2)	TAHUN PEMBEBASAN
1.	Hutan Kota Cipedak, Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan	0,50	2006
2.	Hutan Kota Srengseng Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan	0,60	2007
3.	Hutan Kota Ujung Menteng, Cakung Jakarta Timur.	1,43	2008
4.	Hutan Kota Munjul, Jakarta Timur	2,11	2009
5.	Hutan Kota Pondok Labu, Jakarta Selatan	2,02	2009
6.	Hutan Kota Rawa Buaya, Jakarta Barat	1,09	2009

NO.	LOKASI	LUASAN (Ha/M2)	TAHUN PEMBEBASAN
7.	Hutan Kota Jagakarsa, Jakarta Selatan	1,18	2009
8.	Hutan Kota Kembangan, Jakarta Barat	1,80	2010
9.	Perluasan Hutan Kota Munjul	0,70	2011
10.	Hutan Kota Rawa Malang, Semper Timur Jakarta Utara	5,70	2011
11.	Hutan Kota Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara	1,34	2012
12.	Hutan Kota Kel. Setu, Kec Cipayung Jakarta Timur	0,93	2012
13.	Hutan Kota Jalan JOE Kel Lenteng Agung Jakarta Selatan	0,93	2012
14.	Hutan Kota Rorotan (perluasan), Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara	0,84	2013
15.	Hutan Kota Pondok Ranggon, Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Jakarta Timur	0,44	2013
16.	Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Hutan Kota Interaktif di Jakarta Timur	1,3267	2017
17.	Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Hutan Kota Kelurahan Ciracas	1,3147	2017
18.	Pengadaan Lahan untuk Hutan Kota di cilincing	0,9037	2017
19.	Pengadaan Lahan untuk Hutan Kota di Pulogebang	1,100	2017
JUMLAH		**26,2551**	

Tabel 3.268 Hutan Kota Di Provinsi DKI Jakarta

No	Hutan Kota	Luas (ha)	Status (SK / Tahun Pembebasan)	Kota Administrasi
1	Srengseng	15,00	SK Gubernur No 202/1995	Jakarta Barat
2	Waduk Sunter Utara	8,20	SK Gubernur No 317/1999	Jakarta Utara
3	Kampus Universitas Indonesia	55,40	SK Gubernur No 3487/1999	Jakarta Selatan
4	Komplek Lanud Halim Perdana Kusuma	3,50	SK Gubernur No 338/2002	Jakarta Timur

5	Kemayoran	4,60	SK Gubernur No 339/2002	Jakarta Utara
6	Komplek Kopassus Cijantung	1,75	SK Gubernur No 868/2004	Jakarta Timur
7	Blok P Walikota Jakarta Selatan	1,64	SK Gubernur No 869/2004	Jakarta Selatan
8	PT. JIEP Pulogadung	8,90	SK Gubernur No 870/2004	Jakarta Timur
9	Mabes TNI Cilangkap	14,43	SK Gubernur No 871/2004	Jakarta Timur
10	Buperta Cibubur	27,32	SK Gubernur No 872/2004	Jakarta Timur
11	Kawasan Berikat Nusantara Marunda	1,59	SK Gubernur No 196/2005	Jakarta Utara
12	PT. Jakarta Propertindo	2,49	SK Gubernur No 197/2005	Jakarta Utara
13	Masjid Istiqlal	1,08	SK Gubernur No 198/2005	Jakarta Pusat
14	Situ Rawa Dongkal	3,28	SK Gubernur No 207/2005	Jakarta Timur
	TOTAL	**149,18**		
15	Dukuh	0,50	Hasil Pembebasan 2004	Jakarta Timur
16	Cipedak	0,49	Hasil Pembebasan 2006	Jakarta Selatan
17	Srengseng Sawah	0,57	Hasil Pembebasan 2007	Jakarta Selatan
18	Ujung Menteng	1,43	Hasil Pembebasan 2008	Jakarta Timur
19	Rawa Buaya	6,19	Hasil Pembebasan 2009	Jakarta Barat
20	Hutan Kota Jl. Kahfi II Jagakarsa	1,18	Hasil Pembebasan 2009	Jakarta Selatan
21	Hutan Kota Pondok Labu	2,02	Hasil Pembebasan 2009	Jakarta Selatan
22	Munjul	2,80	Hasil Pembebasan 2009 dan 2011	Jakarta Timur
23	Kembangan Utara	1,85	Hasil Pembebasan 2010	Jakarta Barat
24	Hutan Kota Rawa Malang Semper Timur	5,77	Hasil Pembebasan 2011	Jakarta Utara
25	Setu	0,93	Hasil Pembebasan 2012	Jakarta Timur

26	Hutan Kota Jalan JOE	0,93	Hasil Pembebasan 2012	Jakarta Selatan
27	Hutan Kota Rorotan	2,18	Hasil Pembebasan 2012 dan 2013	Jakarta Utara
28	Pondok Ranggon	0,44	Hasil Pembebasan 2013	Jakarta Timur
29	Cilangkap	4,28	Hasil Pembebasan 2013	Jakarta Timur
30	Hutan Kota Sukapura	2,40	Serah Terima dari Taman Ternak Tahun 2014	Jakarta Utara
31	Cilincing	0,90	Hasil Pembebasan 2015	Jakarta Utara
32	Pulogebang	1,10	Hasil Pembebasan 2015	Jakarta Timur
33	Cipayung	1,33	Hasil Pembebasan 2015	Jakarta Timur
34	Ciracas	1,31	Hasil Pembebasan 2015	Jakarta Timur
TOTAL		**38,60**		
GRAND TOTAL		**187,78**		

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. DKI Jakarta, 2018

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Prioritas urusan

Program Prioritas Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018 di DKI Jakarta. yaitu :

1) Program pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan
2) Program konservasi air tanah dan pengendalian penurunan Muka Tanah
3) Program Peningkatan Pencahayaan Kota

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

sebanyak 100 % (3 dari 3 Program Nasional), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.269
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi Urusan ESDM

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1.	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan energi dan sumber daya mineral
2.	Program Peningkatan aksebilitas Pemda dan Koperasi Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi	Program pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan
3.	Progam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program konservasi air tanah dan pengendalian penurunan Muka Tanah
4.		Program Peningkatan Pencahayaan Kota
5.		Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan energi dan sumber daya mineral
Jml	**3**	**5**

Pada tahun anggaran 2018 terdapat 5 program dengan 166 kegiatan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.270
Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan	9
2.	Program konservasi air tanah dan pengendalian penurunan Muka Tanah	9
3.	Program Peningkatan Pencahayaan Kota	70
4.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan energi dan sumber daya mineral	51
5.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan energi dan sumber daya mineral	25
	Jumlah	164

Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi, 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Pencapaian kegiatan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral selama Tahun 2018.

Tabel 3.271
Realisasi Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan	9	8	88,89
2	Program konservasi air tanah dan pengendalian penurunan Muka Tanah	9	8	88,89
3	Program Peningkatan Pencahayaan Kota	70	69	98,57
4	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan energi dan sumber daya mineral	51	51	100
5	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan energi dan sumber daya mineral	25	25	100
	TOTAL	164	161	98,17

Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi, 2018

Capaian kinerja lain dalam urusan energi dan SDM adalah sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan pemeriksaan kelaikan Operasi bagi Genset-genset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 unit Genset yang tersebar di SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta di antaranya pada Rumah Sakit, Kantor Dinas, Rumah Pompa, Terminal, Gelanggang Remaja, Gedung Sekolah, Gedung Kesenian dan Rumah Susun. Dari 100 unit genset tersebut telah menghasilkan 100 Sertifikat Laik Operasi sehingga aman untuk digunakan dan layak untuk dioperasikan

2. Tetap tersambungnya daya listrik ke Kepulauan Seribu sebesar 10 MW dari target 15 MW sampai dengan Tahun 2022. Hal ini didukung oleh pemeliharaan Jaringan Tegangan Menengah yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Terdapat 80,17% bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah dengan perhitungan jumlah pelanggan aktif dan pelanggan cadangan dibagi Total pelanggan (pelanggan akitf, pelanggan cadangan dan pelanggan non-aktif) ditambah pengguna tanpa izin. Jumlah pelanggan aktif sebanyak 1.577 pelanggan, jumlah pelanggan cadangan sebanyak 2.163 pelanggan, jumlah pelanggan non-aktif sebanyak 755 pelanggan dan pengguna tanpa izin sebanyak 170 sumur
4. Persentase cakupan pencahayaan kota sebanyak 81,19% yang melebihi target indikator kinerja Tahun pertama. Cakupan pencahayaan kota di Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan penerangan lewat Lampu hemat Energi LED Smart System sebanyak 234.373 titik, lampu hemat Energi Non-Smart System sebanyak 16.738 titik dan lampu konvensional sebanyak 2.243 titik sedangkan kebutuhan lampu ideal lampu PJU diperkirakan sebanyak 312.050 titik
5. Dari 253.354 titik PJU yang telah terpasang di Provinsi DKI Jakarta saat ini, 92,51% (sebanyak 234.373 titik) di antaranya telah menggunakan lampu PJU hemat energi LED Smart System yang tersebar di 5 Wilayah Kota

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Dinas Perindustrian dan Energi memiliki pegawai sebanyak 243 orang dimana Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas

Perindustrian dan Energi memiliki pegawai sebanyak 168 orang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.272
Rekapitulasi Pegawai Urusan ESDM

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**	**168**	
	• Golongan IV	22	
	• Golongan III	114	
	• Golongan II	30	
	• Golongan I	2	
B.	**Eselon**	**168**	
	• Eselon I		
	• Eselon II	0	
	• Eselon III	9	
	• Eselon IV	29	
	• Eselon V		
	• Fungsional		
	• Staf	76	
C.	**Pendidikan**	**168**	
	• S3	1	
	• S2	22	
	• S1	83	
	• Diploma	10	
	• SLTA	49	
	• SLTP	1	
	• SD	2	

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta, 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.273
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan ESDM

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	0	0	0	0
2	Eselon III	10	9	9	9	9
3	Eselon IV	29	29	28	24	29
	JUMLAH	40	38	37	33	38

Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi, 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 37 / 40 = 92,5 %
- Diklat Kepemimpinan : 33 / 40 = 82,5 %
- Kepangkatan : 38 / 40 = 95 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2018 sebesar Rp 1.261.490.090.013 yang terserap sebesar Rp. 963.459.759.302 atau sebesar 76,37%.

Tabel 3.274
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan ESDM

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGARAN URUSAN ESDM	1.261.490.090.013	963.459.759.302	76,37
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	100.193.690.000	93.432.123.396	93,25
2. BELANJA LANGSUNG	1.161.296.400.013	870.027.635.906	74,92
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	
b. BELANJA BARANG DAN JASA	1.055.337.739.038	791.132.885.278	74,96
BELANJA PEMELIHARAAN	35.926.206.327	24.403.302.602	67,93
c. BELANJA MODAL	105.958.660.975	78.894.750.628	74,46
CATATAN : PERBANDINGAN			
Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	1.261.490.090.013		-
Belanja Modal : Belanja URUSAN	105.958.660.975	1.261.490.090.013	8,40
Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	35.926.206.327	1.055.337.739.038	3,40
Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	35.926.206.327	1.261.490.090.013	2,85

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Energi dan SDM tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.275
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi ESDM

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1		7

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
2.	Posko Pengaduan	1	1	1	1	1	1	1		7
3.	Leaflet	1								1
5.	Stand Banner	1	1	1	1	1	1	1		7
6.	Website	1								1
7.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1		7

Catatan :

- Website : http://disperindgi.jakarta.go.id/
- E-mail :
  - dinasindergi@jakarta.go.id
  - dinasindergi.pusat@gmail.com
  - dinasindergi.timur@gmail.com
  - dinasindergi.barat@gmail.com
  - dinasindergi.utara@gmail.com
  - dinasindergi.selatan@gmail.com
  - dinasindergi.tekstil@gmail.com
  - dinasindergi.bahan@gmail.com
  - dinasindergi.kerajinan@gmail.com
  - dinasindergi.kelistrikan@gmail.com

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di DKI Jakarta adalah gedung kantor, peralatan kantor, komputer, ruang rapat/pertemuan, sarana transportasi (mobil) dan sarana prasarana kerja lainnya.

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan perpaduan antara perencanaan yang bersifat bottom up dan top down karena melaksanakan kebijakan-kebijakan Pusat maupun Daerah. Penyusunan perencanaan dilakukan sesuai dengan hirarki perencanaan, yaitu menjabarkan kebijakan pusat (RPJP) dan daerah (RPJMD/RKPD) dan kebutuhan nyata di lapangan. yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)/rencana kerja (Renja) SKPD.

Tabel 3.276
Sinkronisasi Perencanaan Program ESDM

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	5	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2018	5	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2018	5	RKA : DPA	100
4	DPA 2018	5		

h. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

- Terbatas dan belum meratanya pembangunan lampu PJU baik kualitas maupun kuantitas.
- Ketergantungan pekerjaan fisik di lapangan dengan instansi lain di antaranya dengan SKPD lain, sehingga perlu adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Perkembangan kegiatan pembangunan yang sangat cepat di wilayah DKI Jakarta telah melebihi kapasitas sumber daya geologi dan bahkan mengabaikan kendala-kendala geologi yang ada.
- Kondisi lingkungan Geologi wilayah DKI Jakarta sudah tidak mampu lagi mengimbangi perkembangan kegiatan pembangunan yang sangat cepat dan hal ini akan justru malah berpotensi (memicu) timbulnya bencana geologi di wilayah tersebut seperti Penurunan tanah, genangan banjir dan rob, intrusi air laut dan penurunan kualitas dan kuantitas air tanah.
- Bencana geologi yang sudah, sedang, dan mungkin akan terjadi ditengarai karena “kondisi bawah tanah/geologi dan konservasi air tanah” di Jakarta belum dijadikan kebijakan untuk basis perencanaan dan penataan ruang wilayah. kebijakan penataan ruang di Jakarta kenyataannya hanya di occupation layer (bagian atas), meliputi pemukiman, perkantoran, kawasan niaga, kawasan industri, pertanian dsb. sedangkan di base layer (bagian bawah) yaitu kondisi geologi yang meliputi hidrogeologi, tanah dan batuan/litologi, struktur kegempaan, daya dukung tanah dan konservasi air tanah, belum banyak menjadi pertimbangan dan masukan di dalam penyusunan RTRW DKI Jakarta. Untuk itu, diharapkan kondisi bawan tanah/geologi dan konservasi air tanah dijadikan salah satu basis utama perencanaan dan pentaan ruang atas dan bawah tanah wilayah Jakarta. Kebijakan tersebut diharapkan dijadikan program prioritas yang dimulai tahun 2013 dengan memanfaatkan, menginventarisi dan mengevaluasi data-data geologi yang ada sebelumnya dan diharapkan di akhir

tahun 2015 Jakarta memiliki Rencana Induk (Master Plan) Tata Guna Lahan Berbasis Kondisi Bawah Tanah (Geologi) dan Konservasi Air Tanah 2030 sebagai acuan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030.

Solusi:

- Menjadikan geologi perkotaan sebagai salah satu basis perencanaan dan penataan ruang/wilayah kota Jakarta.
- Untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah berkelanjutan serta pola terintegrasi, pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh satu SKPD yang tupoksinya melaksanakan otonomi daerah di bidang ESDM, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP 38 Tahun 2007)
- Pembangunan lampu PJU lebih mengedepankan pada skala prioritas untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

1) Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral serta Urusan Perindustrian berada dalam satu Dinas.
2) Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Energi dan SDM yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.277
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Energi dan SDM

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi	Pergub Nomor 267 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Energi
2.	Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air	Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0031 tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghematan Energi	

5. Pariwisata

a. Prioritas Urusan

Program Prioritas Urusan Pariwisata Tahun 2018 di DKI Jakarta. yaitu :

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata
2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3) Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Seni Budaya dan Pariwisata
4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pariwisata

b. Program dan Kegiatan

Program nasional Urusan Pariwisata yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 %, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.278
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Pariwisata

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Pengembangan Pemasaran Paiwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata
3	Program Pengembangan	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Seni Budaya

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
	Kemitraan Pariwisata	dan Pariwisata
4		Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pariwisata
5		Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pariwisata
Jml	3	5

Program urusan Pariwisata pada tahun 2018 seluruhnya sebanyak 5 program dengan 277 kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD. Dan dilaksanakan sebanyak 5 program dengan 265 kegiatan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.279
Program Urusan Pariwisata

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1.	PembinaandanPengembanganIndustriPariwisata	32
2.	PengembanganDestinasiPariwisata	73
3.	PenyediaandanPemeliharaanSaranaPrasaranaSeniBudayadanPariwisata	79
4.	PeningkatandanPengelolaan Kantor UrusanPariwisata	87
5.	Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pariwisata	6
	Jumlah	**277**

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Adapun kegiatan dan hasil-hasilnya pada Tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.280
Realisasi Program Urusan Pariwisata

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	73	71	97,26 %
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata	32	32	100 %
3.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Seni Budaya dan	79	77	97,47 %

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
	Pariwisata			
4.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pariwisata	87	79	90,80 %
5.	Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pariwisata	6	6	100 %
	TOTAL	**277**	**265**	**95,67 %**

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2018

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun relatif meningkat. Demikian pula kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Data jumlah wisatawan dan kontribusi pariwisata dimaksud sebagai berikut.

Tabel 3.281
Jumlah kunjungan Wisatawan

No	Tahun	Jumlah Wisatawan		Jumlah
		Nusantara	Mancanegara	
1.	2014	41.871.178	2.319.295	44.190.473
2.	2015	29.713.103	2.372.396	32.085.499
3.	2016	31.645.333	2.512.005	34.157.338
4.	2017	35.464.572	2.658.055	34.157.338
5.	2018	34.192.053	2.813.411	37.005.464

Tabel 3.282
Kontribusi Sektor Pariwisata

No	Tahun	Jumlah (Triliun)		%	Ket
		Kontribusi	PDRB		
1.	2013	3.122.227.781.520		667.875,1629	
2.	2014	3.729.003.586.519	1.761.410.		
3.	2015	4.309.523.665.888			
4	2016				
5.	2017				

Capaian lain dalam Urusan Kepariwisataan adalah sebagai berikut :

- Jumlah event pariwisata unggulan Nasional dan Internasional sebanyak 38 event terdiri dari Partisipasi pawai lintas budaya nusantara, Pemilihan abang dan None Jakarta 2018, Apresiasi dan kompetisi seni pelajar TK,SD,SLTP dan SLTA, Festival Teater Jakarta, Lomba paduan suara, pergelaran kesenian

terpilih, festival film indie, apresiasi dan lomba nuansa religi, festival lenong, jakarta komedi expo, lomba karya cipta musik betawi, festival teater pelajar, gebyar budaya betawi (Lenong,palang pintu, pantun, tari tradisi, sahibul kikayat, dll), Lebaran Betawi, Festival lenong Betawi, Pergelaran kesenian di RPTRA, Pergelaran seni budaya pada event-event, Gebyar budaya betawi, pentas seni di ruang publik,weekend@kotatua, pergelaran evaluasi hasil pelatihan bagi pelaku seni, pergelaran kesenian reguler, pergelaran kesenian terpilih, Setu babakan menari, Penyelenggaraan acara paket khusus budaya betawi, Atraksi pekan HUT TMII, Penyelenggaraan parade teater, Penyelenggaraan parade tari nusantara, penyelenggaraan parade musik tradisi, Penyelenggaraan kirap karnaval keparajuritan nusantara, Penyelenggaraan atraksi liburan sekolah TMII, Penyelenggaraan atraksi pekan desember, Penyelenggaraan atraksi pencak silat, Penyelenggaraan atraksi Zafin, Pergelaran kesenian rutin anjungan provinsi DKI Jakarta TMII, Pementasan Rutin Sandiwara sunda Miss Tjitjih, Pergelaran rutin wayang orang bharata, Gebyar taman ismail marzuki.

- Jumlah tenaga SDM Profesi Kepariwisataan sebanyak 696 peserta pelatihan SDM Profesi Kepariwisataan. Pelatihan terdiri dari : Pelatihan Tenaga KerjaIndustri PariwisataBidang Waiters/waitress, Head Waiter, Demi Chef, Commis Pastry, Room attendant, Pramuwisata muda, Travel Consultant,Event Organizer, Spa Therapist, Life Guard, pemandu wisata selam tingkat persiapan, kuliner laut kepulauan seribu, pemenduan lokal kepulauan seribu, manajemen homestay kepulauan seribu

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Seribu dan Unit Pengelola/UP yang berada di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dimana pegawai tersebut juga melaksanakan urusan kebudayaan.

Tabel 3.283
Rekapitulasi Pegawai Urusan Pariwisatadan Kebudayaan

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**	202	
	1. Golongan IV	28	
	2. Golongan III	131	
	3. Golongan II	43	
	4. Golongan I	0	
B.	**Eselon**	202	
	1. Eselon I		
	1. Eselon II		
	2. Eselon III	8	
	3.Eselon IV	25	
	4. Eselon V		
	5. Fungsional		
	6.Pelaksana (Staf)	169	
C.	**Pendidikan**	202	
	1. S3		
	1. S2	34	
	2. S1	78	
	3. Diploma	16	
	4. SLTA	63	
	5. SLTP	7	
	6. SD	4	

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta, 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.284
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Pariwisata

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	-	-	-	-	-
2	Eselon III	8	8	8	5	8
3	Eselon IV	25	25	25	10	25
Jumlah		**33**	**33**	**33**	**15**	**33**

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 33 / 35 = 94,28%
- Diklat Kepemimpinan : 15 / 35 = 42,85%
- Kepangkatan : 33 / 35 = 94,28%

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran urusan pariwisata yaitu sebesar Rp. 79.123.950.495,- sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp. 64.079.162.135,- (79,07%).

Tabel 3.285
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pariwisata

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGARAN URUSAN PARIWISATA			
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2. BELANJA LANGSUNG			
a. BELANJA PEGAWAI			
b. BELANJA BARANG DAN JASA			
BELANJA PEMELIHARAAN			
c. BELANJA MODAL			
CATATAN : PERBANDINGAN			
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD			
• Belanja Modal : Belanja URUSAN			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN			

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Pariwisata tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan Prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.286
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UP	
1.	Papan Petunjuk	1	1	1	1	1	1	1	1	8
2.	Bahan Promosi/ Informasi	6	0	0	0	0	0	0	0	5
3.	Brosur	216	0	0	0	0	0	0	0	216
4.	Buku	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000
5.	Poster	12.500	0	0	0	0	0	0	0	12.500
6.	Pocket Map	12.500	0	0	0	0	0	0	0	12.500
7.	Poster	12.500	0	0	0	0	0	0	0	12.500
8.	Souvenir	4 (38.100)	0	0	0	0	0	0	0	4 (38.100)
9.	Tourism Information Center (TIC)	7	0	0	0	0	0	0	0	7
10.	Boothstand	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11.	Call Center	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Website	1	0	0	0	0	0	0	0	1
13.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1	1	8
14	Pengumunan dimedia massa	1	0	0	0	0	0	0	0	1

CATATAN :
- Website : www.jakarta-tourism.go.id
- E-mail : info@jakarta_tourism.go.id
- Call Center : 021-5205454

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa sarana dan Prasarana sebagai berikut :

Tabel 3.287
Sarana dan Prasarana Kepariwisataan

No.	Urian Sarana dan Prasarana	Keterangan
1.	Anjungan dan Graha Wisata	Graha Wisata

No.	Urian Sarana dan Prasarana	Keterangan
		Raguna, TMII, Anjungan Provinsi DKI Jakarta TMII dan Sangkrini Jaya Raya
2.	Akademi Pariwisata Jakarta (APJ)	
3.	Informasi dan Pengembangan Website, www.jakarta-tourism.go.id Tourism Information Center (TIC) di Djakarta Theatre, Kuta Bali, Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma	Media Social : Facebook, Instagram,Youtube
4.	Pusat Pelatihan dan Profesi Kepariwisataan	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2018

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Kegiatan kepariwisataan merupakan program *top down* yang pembahasan rencana kegiatannya diintegrasikan pada Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi dan Provinsi.

Tabel 3.288
Sinkronisasi Perencanaan Program Pariwisata

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	4	RKPD : RENJA SKPD	75
2	RENJA SKPD 2018	5	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2018	5	RKA : DPA	100
4	DPA 2018	5		

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2018

h. Permasalahan dan solusi

Tabel 3.289
Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Daya tarik obyek wisata masih kurang antara lain karena prasarana dan sarana yang tersedia belum memadai,	Untuk meningkatkan daya Tarik wisata telah dilakukan pengembangan atraksi wisata dengan memaksimalkan penyelenggaraan event seni budayadi seluruh destinasi, pertunjukan seni budaya secara regular (rutin), pertunjukan di pusat-pusat kebudayaan, dan melakukan

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
		pembangunan saranadan prasarana baik baru maupun pengembangan destinasi wisata yang sudah ada
2.	Kurangnya kolaborasi dengan masyarakat, komunitas dan pelaku industri praiwisata	Untuk meningkatkan sector pariwisata tidak dapat dilakukan secara parsial dan dilakukan sendiri oleh dinas Pariwisata tetapi perlu dilakukan kerjasama dengan stacholder pariwisata, komunitas, dan industry pariwisata. Upaya yang telah dilakukan adalah melaksanakan program pembinaan industry pariwisata bekerjasama dengan assosiasi industry pariwisata (PHRI, Asita, HPI dan assosiasi pariwisata yang lain..
3.	Kurangnya publikasi dan informasi obyek wisata beserta atraksinya	Untuk meningkatkan publikasidaninformasitelah dilakukan promosi terpadu yang melibatkan asosiasi-asosiasi dibidang pariwisata, seperti : Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), PHRI, ASITA, dan Pusat Perbelanjaan. Bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata RI dan Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri, serta bekerjasama dengan jurnalisdalam negeri dan luar negeri (asing) dalam kegiatan Famtrip Jakarta.
4	Belum optimalnya koordinasi antar sektor yang terkait.	Untuk mengoptimalkan koordinasi antar sector terkait telah dilakukan kerjasama dengan instansi terkait (Dishub, UMKM, Dinas Citata, PTSP dll) dalam pengembangan pariwisata baik dalam pembangunan sarana dan prasarana (pemenuhan kebutuhan aksesibilitas dana menitas), maupun kelengkapan fasilitas pariwisata lainnya.

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2018

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Pariwisata yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.290
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Pariwisata

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Undang-Undang Nomor	1. Peraturan Daerah Nomor 6

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
	10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	Tahun 2015 tentang Kepariwisataan 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi Daerah

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2018

6. Perdagangan

a. Prioritas urusan

Terdapat 1 Program Urusan Perdagangan Tahun 2018 di DKI Jakarta yaitu :

- Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Perdagangan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100%.

Tabel 3.291
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Perdagangan

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Peningkatan Pengamanan Perdagangan	Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan
2	Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri	Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan
3	Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan barang Kebutuhan Pokok dan Barng Penting	Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan
4	Peningkatan Perlindungan Konsumen	Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan
Jml	4	4

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Tahun 2018

Secara tupoksional, program Urusan Perdagangan merupakan bagian tak terpisahkan dari program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan. Pada tahun anggaran 2018 terdapat 2 program pada Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan untuk Perdagangan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.292
Program Urusan Perdagangan

NO	KEGIATAN	Jumlah Kegiatan
1	Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	16
2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	67
	JUMLAH TOTAL	83

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Tahun 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Tingkat pencapaian program dam kegiatan urusan perdagangan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.293
Realisasi Program Urusan Perdagangan

NO	KEGIATAN	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	16	16	100
2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	67	67	100
	Jumlah	83	83	100

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Tahun 2017

Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan Ekspor Bersih Perdagangan dapat dijelaskan pada table sebagai berikut.

Tabel 3.294
Kontribusi Sektor Perdagangan

No	Tahun	Jumlah (Juta Rp)		%	Keterangan
		Kontribusi	PDRB		
4.	2010	178.357.449	862.089.737	20.69	

5.	2011	84,862,256	982.804.778	20,81	
6.	2012	228.042,600	1.103.692.660	20,66	
7.	2013	265.127.740	1.255.925.780	21,11	
8.	2014				
9.	2016	359.660.204	2.177.119.880	16,52	
10.	2017	408.344.929	2.410.373.483	16,94	
11.	2018	248.310.000	2.599.170.000	9.55	

Sumber : Jakarta dalam angka,2018

Tabel 3.295
Ekspor Bersih Perdagangan

No	Tahun	Jumlah (US$)		Ekspor Bersih (Rp)
		Ekspor	Impor	
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	2014	24.426.032.908,88	84.430.290.000	(60.004.257.091,12)
2.	2015	1.606.529.847.96	6.044,040.000	(4.437.510.152.04)
3.	2016	46.031.700.000	71.247.130.000	(25.215.430.000)
4	2017	42295,30	64554,80	(22259.50)
5.	2018	54.506.200.000	93.926.950.000	(39.420.750.000)

Sumber : Dinas Koperasi UMKM-P Prov.DKI Jakarta 2018

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dengan jumlah pegawai sebanyak 97 orang. Sebagian pegawai Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan juga melaksanakan Urusan Koperasi dan UMKM.

Tabel 3.296
Rekapitulasi Pegawai Urusan Perdagangan

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**	**97**	
	• Golongan IV	17	
	• Golongan III	77	
	• Golongan II	3	
	• Golongan I	0	
B.	**Eselon**	**97**	
	• Eselon I	-	

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
	• Eselon II	-	
	• Eselon III	2	
	• Eselon IV	10	
	• Eselon V	-	
	• Fungsional	52	
	• Staf	33	
C.	**Pendidikan**	**97**	
	• S3	-	
	• S2	15	
	• S1	63	
	• Diploma	10	
	• SLTA	9	
	• SLTP	0	
	• SD	0	

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta , 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.297
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan Perdagangan

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	-	-	-	-	-
2	Eselon III	2	2	2	2	2
3	Eselon IV	10	8	8	7	8
	Jumlah	12	10	10	10	10

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Tahun 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 10 / 10 = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : 9 / 10 = 90%
- Kepangkatan : 10 / 10 = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk dua urusan yaitu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Perdagangan.

Tabel 3.298
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perdagangan

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN PERDAGANGAN	56,686,243,292	48,954,167,690	86,36
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	50,741,779,624	44,296,086,313	87,30
2. BELANJA LANGSUNG	5,944,463,668	4,658,081,377	78,36
a. BELANJA PEGAWAI	67,000,000	54,077,644	80,71
b. BELANJA BARANG DAN JASA	5,874,163,668	4,603,404,310	78,36
- Belanja Pemeliharaan	1,330,090,586	864,517,195	64,99
c. BELANJA MODAL	3,300,000	599,426	18,16
CATATAN PERBANDINGAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	4.427.046.476	200.240.785.043	2,21
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	531.412.431	4.427.046.476	12,00
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	199.999.206	3.326.134.045	6,01
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	199.999.206	4.427.046.476	4,52

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Perdagangan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.299
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Perdagangan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin/UPT								Jumlah
		Dinas	JP	JU	JT	JS	JB	KS	UPT	
1.	Papan Pengumuman	2	-	-	-	-	-	-	2	4
2.	Kota Pengaduan	1	-	-	-	-	-	-	1	2
3.	Leaflet	1	-	-	-	-	-	-	1	2
4.	Mobil Keliling	1	-	-	-	-	-	-	1	2
5.	Media Masa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Website	1	-	-	-	-	-	-	-	1
7.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1	1	8
8.	Call Center	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Tahun 2018

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Perdagangan tidak terlepas dari kepentingan dunia usaha, baik pada sektor industri maupun perdagangannya itu sendiri. Untuk itu dibentuk Forum Koordinasi Pembangunan Bidang Industri dan Bidang Perdagangan. serta kegiatan dialog interaktif dengan dunia usaha. Dari kedua hal tersebut. muncul usulan-usulan kegiatan yang mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3.300
Sinkronisasi Perencanaan Program Perdagangan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	2	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2018	2	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2018	2	RKA : DPA	100
4	DPA 2018	2		

h. Permasalahan dan solusi

Permasalahan :

1) Analisa laboratorium pada kegiatan pengawasan barang SNI wajib dalam DPA terdapat kendala pada Balai Pengujian Mutu Barang Kemendag, yaitu kendala persyaratan jumlah barang contoh yang dibutuhkan dan lama waktu pelaksanaan pengujian.
2) Terdapatnya efisiensi dari kegiatan Pengawasan Kemetrologian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

Solusi :

Perlu meningkatkan koordinasi eksternal dengan Kemendag untuk mengetahui persyaratan uji laboratorium, baik jumlah barang yang dibutuhkan maupun lama waktu pengujian laboratoriumnya.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Perdagangan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.301
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Perdagangan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Pergub Nomor 266 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
2.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No : 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal	Pergub Nomor 309 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Metrologi
3		Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang perpasaran swasta

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Tahun 2018

7. Ketransmigrasian

a. Prioritas urusan

Prioritas Urusan Ketransmigrasian adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Ketransmigrasian yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 %, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.302
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Ketransmigrasian

NO	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi.	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
Jml	1	1

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2018

Program ketransmigrasian di Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian tak terpisahkan dari program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada Tahun 2018 program yang dilaksanakan adalah Peningkatan Sarana, Prasarana Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian sebanyak 1 kegiatan.

Tabel 3.303
Program Urusan Ketransmigrasian

No.	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	1
	Jumlah	**1**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan ketransmigrasian adalah sebagai berikut.

Tabel 3.304
Realisasi Program Urusan Ketransmigrasian

No.	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Sarana, Prasarana Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian	1	1	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2018

Capaian lain dalam urusan ketransmigrasian antara lain

a. Penjajakan Kerjasama Penetapan Lokasi Transmigrasi 2 lokasi.
b. Pendaftaran dan Seleksi Akhir Transmigran 10 KK
c. Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke 2 lokasi Transmigrasi :

Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat : 5 KK

Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu : 5 KK

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Ketransmigrasian Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan jumlah dan rincian pegawai sebagai berikut :

Tabel 3.305
Rekapitulasi Pegawai Urusan Transmigrasi

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**	**3**	
	• Golongan IV		
	• Golongan III	3	
	• Golongan II		
	• Golongan I		
B.	**Eselon**	**1**	
	• Eselon II	**1**	
	• Eselon III	0	
	• Eselon IV	0	
	• Fungsional	1	
	• Staf	2	
C.	**Pendidikan**	**3**	
	• S2	0	
	• S1	1	
	• Diploma	0	
	• SLTA	2	
	• SLTP	0	
	• SD	0	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.306
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan Ketransmigrasian

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	0	0	0	0	0
2	Eselon III	0	0	0	0	0
3	Eselon IV	1	1	1	0	1
Jumlah		1	1	1	0	1

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 1 / 1 = 100,00 %
- Diklat Kepemimpinan : 1 / 0 = 00,00 %
- Kepangkatan : 1 / 1 = 100,00 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Ketransmigrasian melekat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2018. Khusus untuk Urusan Transmigrasi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 76.249.250,-

Tabel 3.307
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Ketransmigrasian

URAIAN	ALOKAS (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KETRANSMIGRASIAN	17.904.480,-	12.611.480,-	70,44
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	-	
2. BELANJA LANGSUNG	-	-	
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	
b. BELANJA BARANG DAN JASA	17.904.480,-	12.611.480,-	70,44
c. Belanja Pemeliharaan	-	-	-
d. BELANJA MODAL	-	-	-
CATATAN PERBANDINGAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	17.904.480,-	12.611.480,-	70,44
• Belanja Modal : Belanja URUSAN			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN			

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Ketransmigrasian tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan Prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.308
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Ketransmigrasian

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin							Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1	0	7
2.	Kota Pengaduan	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Leaflet	1	-	-	1	-	-	-	-	2
4.	Mobil Keliling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Media Masa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Website	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	E-mail	1	-	-	-	-	-	-	-	1
8.	Call Center	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2018

CATATAN PERBANDINGAN :

- Website : disnakertrans.jakarta.go.id
- Call Center : 021-3847937, 3503623, 3846121

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Prasarana berupa Gedung Transito yang berlokasi di Jln H. Naman No. 1 Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Sedangkan untuk peningkatan keterampilan. para Calon Transmigrasi bisa mengikuti berbagai pelatihan baik pada Pusat Pelatihan Kerja (PPK) maupun kegiatan yag dilakukan oleh SKPD lain. seperti di bidang pertanian.

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Urusan Transmigrasi merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha khususnya pertanian di daerah tujuan transmigarsi. Oleh karena itu program ini bersifat top down dengan pendekatan persuasif.

Tabel 3.309
Sinkronisasi Perencanaan Program Ketransmigrasian

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	1	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2018	1	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2018	1	RKA : DPA	100
4	DPA 2018	1		

h. Permasalahan dan solusi

Jakarta sebagai kota besar menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah untuk mengadu nasib di Kota Jakarta khususnya disektor non pertanian. Namun demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berupaya mensosialisasikan program transmigrasi kepada warga Jakarta. khususnya yang berminat di bidang pertanian. Program transmigrasi di DKI Jakarta lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat daripada pemerataan penduduk. Tahun 2017 terdapat 10 KK yang ikut transmigrasi. Harus diakui bahwa jumlah tersebut masih rendah bila dibandingkan jumlah penduduk. Oleh karena itu sosialisasi harus diupayakan sampai di setiap Kelurahan.

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Ketransmigrasian yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.310
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Ketransmigrasian

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Pergub Nomor 271 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

8. Industri

a. Prioritas urusan

- Program pembinaan dan Pengembangan Industri
- Program Pengawasan dan Pengendalian Industri

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Perindustrian yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.311
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Perindustrian

No	Program	
	Nasional	Provinsi
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Program pembinaan dan Pengembangan Industr
2	Program Penataan Struktur Industri	
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri
4		Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian
		Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian
Jml	**3**	4

Sumber : Dinas PE, 2018

Program Urusan Industri di Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian tak terpisahkan dari Program Industri dan Perdagangan. Adapun program khusus industri sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.312
Program Urusan Perindustrian

NO	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	21
2.	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	17
3	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	58
4	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian	7
	Jumlah	**103**

Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi, 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan industri adalah sebagai berikut.

Tabel 3.313
Realisasi Program Urusan Industri

NO	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	21	20	95,24
2	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	17	17	100
3	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	58	58	100
4	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian	7	7	100
	Jumlah	**103**	**102**	**99,03**

Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi, 2018

Capaian lain urusan perindustrian tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

a. Pada Tahun 2018 telah diciptakan 800 produk industri berkualitas melalui beberapa upaya yaitu pendaftaran Hak Merek melalui Ditjen KKI Kemenkumham RI sebanyak 300 unit, sertifikasi Halal melalui LPPOM MUI sebanyak 300 unit dan pendampingan desain kemasan sebanyak 200 unit

b. Telah dilakukan pelatihan Wirausaha Industri di 6 Wilayah Kota/kabupaten sehingga diciptakan 2.009 Wirausaha Industri Baru melalui pelatihan makan-minum, fashion, kerajinan dan elektronik
c. Telah dilaksanakan penumbuhan industri sebanyak 60 unit Industri kreatif di Provinsi DKI Jakarta
d. Sepanjang Tahun 2018 telah dilaksanakan pengujian di 2 (dua) Unit Industri di lingkungan Dinas Perindustrian dan Energi sehingga menghasilkan rata-rata 81,38% produk industri yang sesuai dengan Standar SNI yang telah ditetapkan
e. Dari 13.222 unit usaha di komoditi makanan dan minuman, telah dilakukan pengawasan bahan berbahaya pada 1.998 unit usaha makanan dan minuman (15,11%) melalui pengujian Formalin, Boraks, Methanil Yellow dan rhodamin B

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Industri Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Energi. dengan jumlah pegawai sebanyak 75 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.314
Rekapitulasi Pegawai Urusan Perindustrian

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**	**75**	
	• Golongan IV	14	
	• Golongan III	57	
	• Golongan II	3	
	• Golongan I	1	
B.	**Eselon**	**75**	
	• Eselon II	0	
	• Eselon III	3	
	• Eselon IV	10	
	• Staf	62	
C.	**Pendidikan**	**75**	
	• S2	18	

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
	• S1	37	
	• Diploma	5	
	• SLTA	14	
	• SLTP	1	
	• SD	0	

Sumber : Dinas Perindustrian dan energi Prov. DKI Jakarta, 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.315
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Perindustrian

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	0	0	0	0	0
2	Eselon III	3	3	2	2	2
3	Eselon IV	11	10	10	5	10
Jumlah		14	14	13	8	13

Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi, 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

- Tingkat Pendidikan : 13 / 14 = 92,86 %
- Diklat Kepemimpinan : 8 / 14 = 57,14 %
- Kepangkatan : 13 / 14 = 92,86 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Perindustrian melekat pada Dinas Perindustrian dan Energi tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 18.847.002.300 yang terserap sebesar Rp. 13.820.585.818 atau sebesar 73,33%.

Tabel 3.316
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Perindustrian

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGARAN URUSAN PERINDUSTRIAN	34.870.077.028	28.184.383.165	80,83
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	-	
2. BELANJA LANGSUNG	34.870.077.028	28.184.383.165	80,83
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
b. BELANJA BARANG DAN JASA	29.466.186.142	23.889.313.575	81,07
- Belanja Pemeliharaan	1.732.032.179	1.104.811.971	63,79
c. BELANJA MODAL	5.403.890.886	4.295.069.590	79,48
CATATAN : PERBANDINGAN			
• Alokasi Anggaran URUSAN : APBD	34.870.077.028		-
• Belanja Modal : Belanja URUSAN	5.403.890.886	34.870.077.028	15,50
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	1.732.032.179	29.466.186.142	5,88
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	1.732.032.179	34.870.077.028	4,97

Sumber : LKPD 2018 unreviewed, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Perindustrian tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan Prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.317
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Perindustrian

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1		7
2.	Posko Pengaduan	1	1	1	1	1	1	1		7
3.	Leaflet	1	1	1	1	1	1	1		7
4.	Stand Banner	1	1	1	1	1	1	1		7
5.	Website	1								1
6.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1		7

Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi, 2018

Catatan :
- Website : http://disperindgi.jakarta.go.id/
- E-mail : - dinasindergi@yahoo.com
  - dinasindergi.pusat@gmail.com
  - dinasindergi.timur@gmail.com
  - dinasindergi.barat@gmail.com
  - dinasindergi.utara@gmail.com
  - dinasindergi.selatan@gmail.com
  - dinasindergi.tekstil@gmail.com
  - dinasindergi.bahan@gmail.com
  - dinasindergi.kerajinan@gmail.com
  - dinasindergi.kelistrikan@gmail.com

Sarana dan prasarana yang dipergunakan adalah gedung kantor. peralatan kantor. komputer. ruang rapat/pertemuan. sarana transportasi (mobil) dan sarana penunjang operasional lainnya.

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

Proses perencanaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan forum mengikutsertakan pembicara serta peserta dari Asosiasi, Perguruan Tinggi, Praktisi dan Pemerhati industri, dimana para stakeholder tersebut diharapkan dapat memberikan masukan dan mengajukan usulan mengenai hal-hal terkait kebutuhan lingkungan industri. Setelah para stakeholder mengusulkan kebutuhannya, maka usulan tersebut dibawa dalam Rapat Teknis (Ratek) yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

h. Permasalahan dan solusi

Permasalahan :

- Belum adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk industri kecil menengah.
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha khususnya di bidang makanan dan minuman dalam menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik sesuai dengan (Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 75 Tahun 2010)
- Masih maraknya penggunaan bahan tambahan pada makanan yang tidak sesuai, maupun yang dilarang untuk digunakan seperti formalin dan borak. (Peraturan Menteri Kesehatan 722 Tahun 1988)
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam bidang standarisasi dan legalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Untuk Sentra IKM Batu Aji/Batu Mulia perlu kerjasama lintas SKPD yang didukung oleh suatu peraturaran Gubernur
- Beberapa alat pengujian telah kurang akurat dan aus dimakan usia untuk itu telah dilakukan peremajaan dan pemutakhiran terhadap mesin-mesin pengujian serta memperluas cakupan uji barang pada Unit-Unit Industri yang memiliki sertifikat laboratorium SNI 17025:2008 sehingga diakui secara nasional dan Internasional
- Banyak IKM-IKM yang sudah mendapatkan Sertifikat SNI namun karena masih menggunakan Pedoman BSN 10 sebagai Dokumen Mutunya, maka perlu pembinaan lebih lanjut kepada IKM-IKM tersebut untuk meningkatkan Dokumen mutunya berdasarkan Sistem Manajemen Mutu SNI/ISO 9001:2008 sehingga Sertifikat SNI yang dimiliki akan tetap berlaku
- Banyak IKM-IKM yang berdomisili di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sehingga menyulitkan dalam pembinaan dan legalitas perizinan yang dimiliki.

Solusi :

- Melakukan koordinasi dengan unit-unit yang terkait agar dibuatkan legal formal tentang keberadaan IKM.
- Melakukan pembinaan secara berkala terhadap industri makanan dan minuman
- Memberikan kemudahan persyaratan perizinan kepada para industri rumah tangga untuk mendapatkan syarat keterangan domisili karena pada umumnya industri rumah tanggi tersebut tidak mengganggu lingkungan dan para

Industri Rumah Tangga ini mwmpunyai peranan yang cukup besar dalam penyediaan kebutuhan masyarakat (sandang dan pangan) dan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi masyarakat

- Pengawasan secara berkala terhadap industri makanan dan minuman
- Pengawasan dan pengendalian secara berkala
- Perlu pembinaan lebih lanjut kepada IKM-IKM tersebut untuk meningkatkan Dokumen mutunya berdasarkan Sistem Manajemen Mutu SNI/ISO 9001:2008 sehingga Sertifikat SNI yang dimiliki akan tetap berlaku

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Perindustrian yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.318
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Perindustrian

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Pergub Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian
2.	Kepmen Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman teknis Penyusunan Pengendalian Dampak terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi, 2018

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Pada Tahun 2018, Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren di Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

a. Perangkat Daerah Pelaksana :

1) **Fungsi Penunjang Perencanaan**
   Dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
2) **Fungsi Penunjang Keuangan**
   Dilaksanakan oleh BPKD, BPAD dan BPRD Provinsi DKI Jakarta
3) **Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**
   Dilaksanakan oleh BKD dan BPSDM Provinsi DKI Jakarta
4) **Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan**
   Dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
5) **Fungsi Penunjang Kesatuan Banga dan Politik**
   Dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
6) **Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
   Dilaksanakan oleh :
   a) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang terbagi ke dalam Biro – Biro Setda Provinsi DKI Jakarta.
   b) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
   c) Set. DPRD Provinsi DKI Jakarta
   d) BP BUMD Provinsi DKI Jakarta
   e) BPPBJ Provinsi DKI Jakarta

b. Program dan kegiatan

Program dan kegiatan Fungsi Penunjang Tahun 2018 sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 3.319
Program dan kegiatan Fungsi Penunjang

No	SKPD dan Program	Jumlah Kegiatan
A.	**Fungsi Perencanaan**	**105**

	1. Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan 2. Penelitian dan Pengembangan 3. Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD	59 2 68 21
B.	**Fungsi Keuangan**	**385**
	BPKD 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengelola Keuangan Daerah 3. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengelola Keuangan Daerah	**41** 27 11 3
	BPAD 1. Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah 2. Program Pemanfaatan Aset Daerah 3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengelola Aset Daerah 4. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional SKPD/UKPD Pengelola Aset Daerah	**74** 42 2 25 5
	BPRD Program Pelayanan Pajak Daerah Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Program Pengelolaan Kendaraan Dinas	**270** 86 181 3
C.	**Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	**120**
	Badan Kepegawaian Daerah 1. Program Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor 3. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD	**50** 31 11 1
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1. Program Pengembangan Kompetensi SDM 2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia	**70** 53 14 3
D.	**Fungsi Penelitian dan Pengembangan**	**-**
E.	**Fungsi Kesbangpol** 1. Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2. Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat	**115** 82 33
F.	**Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**	
1.	**Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta**	
	Biro Tata Pemerintahan	**…**

	1. Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah	1
	2. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga/Badan	5
	3. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1
	4. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Tata Pemerintahan	8
	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	**20**
	1. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur	13
	2. Program Peningkatan Pengelolaan Kantor Biro	7
	Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	26
	1. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri	4
	2. Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah	8
	3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	11
	4. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas	3
	Biro Hukum	16
	1. Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	1
	2. Program Peningkatan Bantuan dan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	8
	3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	7
	Biro Perekonomian	22
	1. Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian	15
	2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	7
	Biro Umum	**36**
	1. Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggan Daerah	25
	2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Umum	11
	Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	**21**
	1. Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota	16
	2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	5
	Biro Administrasi Sekretariat Daerah	19
	1. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Admnistrasi Sekretariat Daerah	15
	2. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Administrasi Sekretariat Daerah	3
	3. Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas	1
	Biro Kesejahteraan Sosial	**23**
	1. Program Koordinasi Kebijakan Kesehatan, Rumah Soial ,Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	16
	2. Program Peningkatan Pengelolaan Kantor Biro Kesejahteraan Sosial	7

	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	22
	1. Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pemuda dan Olahraga Serta Mental Spiritual 2. Program Pengelolaan, Pengawasan dan Pembinaan Mental Spiritual 3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	9 6 7
2.	**Inspektorat Provinsi DKI Jakarta**	**26**
	1. Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor 3. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional	13 10 3
3	**Sekretariat DPRD**	
	1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor 3. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas	20 556 3
4	BP BUMD	23
	1. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD 2. Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Pembinaan BUMD 3. Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD Pembinaan BUMD	11 9 3
5	**Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa**	19
	1. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor 2. Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	17 2
	Jumlah Total	**6.848**

Sumber : SKPD/UKPD masing-masing, 2018

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah PNS Provinsi tahun 2018 sebanyak 65.431 orang, jumlah penduduk provinsi tahun 2018 sebanyak 10.846.145 jiwa orang sehingga rasionya hanya 0,67 %.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang dikelola oleh BKD dan diintegrasikan oleh Dinas Kominfomas.
  Sistem Informasi Website BKD, Sistem Informasi Dokumen ASN, Etkd, E-Absensi

- Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta ketentuan lain, jumlah SKPD di DKI Jakarta sebanyak 42 SKPD Adapun rincian SKPD tersebut sebagai berikut.

a) Setda	= 1	unit
b) Setwan	= 1	unit
c) Dinas	= 22	unit
d) Badan	= 9	unit
e) Satpol PP	= 1	unit
f) Inspektorat	= 1	unit
g) Kota/Kabupaten	= 6	unit
h) BPBJ	= 1	unit
Jumlah SKPD	= 42	unit

Tabel 3.320
Rekapitulasi Pegawai Fungsi Penunjang

No	Kualifikasi	SKPD/UKPD(Dinas/Badan/Kota/Kabupaten)												
		Setda	Insp	Wilayah	BPKD	BKD	BPSDM	BPRD	BP BUMD	KESBANG POL	Setwan	BAPPEDA	BPBJ	BPAD
A.	**Golongan**	736	**255**	**4600**	**285**	**269**	**112**	**771**	**46**	**134**	131	**203**	**150**	**299**
	1. Gol. IV	111	52	305	26	29	37	89	7	28	9	37	17	32
	2. Gol. III	490	186	3351	223	190	59	539	36	81	74	152	127	190
	3. Gol. II	129	17	895	34	49	13	138	3	25	48	13	6	71
	4. Gol. I	6	0	49	2	1	3	5	-	-	-	1		6
B.	**Eselon**	**854**	**255**	**4600**	**285**	**269**	**112**	**771**	**46**	**134**	131	**70**	**150**	**51**
	1. Eselon I	4	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		-
	2. Eselon II	23	1	18	2	0	1	1	1	-	1	2	1	1
	3. Eselon III	40	13	178	10	13	5	59	4	8	4	14	2	12
	4. Eselon IV	117	10	1718	36	39	13	84	12	35	12	45	16	38
	5. Eselon V		0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		-
	6. Fungsional	7	115	4	0	13	33	-	-	91	2	5	0	-
	7. Pelaksana	663	116	2682	237	204	60	627	29	-	122	137	131	-
C.	**Pendidikan**	**852**	**255**	**4600**	**285**	**269**	**112**	**771**	**46**	**134**	131	**70**	**150**	**299**
	1. S3	6	0	2	2	0	5	-	1	1	-	0	0	1
	2. S2	110	57	398	27	45	46	130	9	25	12	55	18	36
	3. S1	248	150	1.658	167	116	32	439	25	65	57	105	99	91
	4. Diploma	39	10	469	36	31	8	113	2	9	-	7	12	19
	5. SLTA	413	36	1871	50	75	18	83	8	32	56	35	21	135
	6. SLTP	23	0	134	1	2	2	5	1	1	6		0	15
	7. SD	13	2	68	2	0	1	1	-	1	-	1	0	2

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta , 2018

Pejabat pelaksana Fungsi Penunjang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.321 Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana fungsi penunjang

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	**Setda**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Eselon I	5	1	1		1
	Eselon II	23	20	20		20
	Eselon III	40	37	37		37
	Eselon IV	117	112	112		112
	Jumlah	**185**	**170**	**170**		**170**
2	**Inspektorat**					
	Eselon II	1	1	1	0	1
	Eselon III	13	13	13	8	13
	Eselon IV	10	10	10	4	10
	Jumlah	**24**	**24**	**24**	**12**	**24**
3	**BPKD**					
	Eselon II	2	2	2	-	2
	Eselon III	12	10	10	9	10
	Eselon IV	39	36	36	27	36
	Jumlah	**52**	**48**	**48**	**36**	**48**
4	**BKD**					
	Eselon II	1	0	0		0
	Eselon III	13	13	13		13
	Eselon IV	39	39	39		39
	Jumlah	1	0	0		0
5	**BPSDM**					
	Eselon II	1	1	1	1	1
	Eselon III	6	6	6	6	6
	Eselon IV	13	13	8	2	8
	Jumlah	**20**	**20**	**15**	**9**	**15**
6	**BPRD**					
	Eselon II	2	1	1	1	1
	Eselon III	59	59	59	59	59
	Eselon IV	84	84	84	84	84
	Jumlah	**145**	**144**	**144**	**144**	**144**
7	**KESBANG**					
	Eselon II	1	-	-	-	-
	Eselon III	10	8	8	8	**8**
	Eselon IV	35	35	35	35	**35**
	Jumlah	**46**	**43**	**43**	**43**	**43**
8	**Setwan**					
	Eselon II	1	1	1	-	1
	Eselon III	4	4	4	4	4
	Eselon IV	12	12	12	9	12
	Jumlah	**17**	**17**	**17**	**13**	**17**
9	**BPAD**					

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
	Eselon II	1	1	1		1
	Eselon III	12	12	12	10	12
	Eselon IV	39	38	39	28	38
	Jumlah	**52**	**51**	**52**	**38**	**51**
16	**BP BUMD**					
	Eselon II	1	1	1	1	1
	Eselon III	4	4	4	1	4
	Eselon IV	12	12	12	9	12
	Jumlah	17	17	17	11	17
17	**BAPPEDA**	-	-	-	-	-
	Eselon II	-	-	-	-	-
	Eselon III	-	-	-	-	-
	Eselon IV	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-
18	**BPBJ**					
	Eselon II	1	1	1	0	1
	Eselon III	9	7	7	1	5
	Eselon IV	16	16	16	7	16
	Jumlah	**26**	**24**	**24**	**8**	**22**

Sumber : BKD dan SKPD, 2018

d. Tingkat pencapaian Pelaksanaaan Fungsi Penunjang

Pelaksanaan hasil kegiatan pada Fungsi Penunjang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan Kediklatan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018

Tabel 3.322 Volume Kelulusan dan Pelatihan

NO	KEGIATAN	Peserta (Pegawai)	Lulus (Pegawai)
1	Diklat Capacity Building	150 orang	150 orang
2	Diklat Hukum Konstruksi	30 orang	30 orang
3	Diklat Pengawas Konstruksi	30 orang	30 orang
4	Diklat Manajemen BLUD	120 orang	120 orang
5	Diklat Manajemen Bencana	90 orang	90 orang
6	Diklat Manajemen Sekolah (e-learning)	300 orang	300 orang
7	Diklat Penataan Ruang Daerah	60 orang	60 orang
8	Diklat Dasar Pol PP bagi Staf	120 orang	120 orang
9	Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (e-learning)	300 orang	300 orang
10	Diklat Pengelolaan Barang Daerah	600 orang	600 orang
11	Diklat Bendahara Pengeluaran	420 orang	420 orang
12	Diklat Bendahara Penerimaan	30 orang	30 orang
13	Diklat Pengiriman PPNS	150 orang	150 orang
14	Diklat Training Of Courses	30 orang	30 orang

15	Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Widyaiswara	30 orang	30 orangg
16	Diklat Teknis Pertanahan	300 orang	300 orang
17	Diklat Kereta Api Perkotaan	90 orang	90 orang
18	Pengiriman Kediklatan	177 orang	177 orang
19	Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis	30 orang	30 orang
20	Diklat Komunikasi Publik	30 orang	30 orang
21	Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual	150 orang	150 orang
22	Diklat Manajemen SDM (e-learning)	300 orang	300 orang
23	Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (e-learning)	300 orang	300 orang
24	Diklat Teknis Perundang-undangan	150 orang	150 orang
25	Diklat Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta Estate Manajemen (Blended e-learning)	300 orang	300 orang
26	Diklat Sistem Pengendalian Internal Pemerinntah	90 orang	90 orang
27	Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	90 orang	90 orang
28	Diklat Pelayanan Prima (e-learning)	300 orang	300 orang
29	Diklat Keprotokolan	150 orang	150 orang
30	Diklat Bina Damai	150 orang	150 orang
31	Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum	90 orang	90 orang
32	Diklat Revolusi Mental	150 orang	150 orang
33	Kerjasama Kediklatan	750 orang	750 orang
34	Seleksi Pegawai Tugas Belajar	300 orang	216 orang
35	Penyusunan Kurikulum Diklat	3 kurikulum	3 kurikulum
36	Penyusunan Modul Diklat	18 modul	18 modul
37	Pengelolaan Sistem Informasi BPSDM	12 bulan	12 bulan
38	Pengembangan e-learning	5 jenis diklat	5 jenis diklat
39	Akreditasi Kediklatan	2 jenis diklat	4 jenis diklat
40	Penyusunan Analisa Kesenjangan Kompetensi (TNA)	1 dokumen analisa kesenjangan kompetensi	1 dokumen analisa kesenjangan kompetensi
41	Penjaminan Mutu dan SMM ISO 9001:2015	1 SMM	1 SMM
42	Knowledge Management	5 rumpun	5 rumpun

43	Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi	800 orang	814 orang
44	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Dalam Rangka Sertifikasi Profesi	4 Standar Kompetensi Jabatan untuk Sertifikasi Profesi	4 Standar Kompetensi Jabatan untuk Sertifikasi Profesi
45	Pelaksanaan Klinik Kompetensi	5 jenis	6 jenis
46	Pengiriman Pegawai Tugas Belajar	101 orang	101 orang
47	Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi	450 orang	450 orang
48	Penyusunan Rencana Strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta 2018-2022	1 dokumen	1 dokumen
49	Diklat Dasar Kereta Api Perkotaan	90 orang	90 orang
50	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	150 orang	150 orang
51	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	300 orang	300 orang
52	Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III ((K1/K2)	2.520 orang	2.520 orang
53	Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas	20 orang	300 orang
	Jumlah	11.038 orang	10.954 orang

Sumber : Badan Diklat Prov. DKI Jakarta 2018

Tingkat capaian pada program pengembangan kompetensi SDM untuk pendukung diklat yaitu :

1) Penyusunan Kurikulum Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 3 kurikulum diklat al.
   - Diklat Komunikasi Publik;
   - Diklat Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas;
   - Diklat Kepemimpinan Kepala Sekolah.

2) Penyusunan Modul Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 18 modul al. :
   a) Diklat Komunikasi Publik 6 jenis antara lain :
      - Konsep dasar komunikasi publik;
      - Kommunikasi intra pribadi;
      - Komunikasi antar pribadi;
      - Efektif Publik Speaking;

- Media relation
- Komunikasi digital.

b) Diklat Teknis Pelayanan Terpadu bagi Penyandang Disabilitas 6 jenis antara lain :
   - Overview pelayanan bagi penyandang disabilitas
   - Layanan sepenuh hati bagi penyandang disabilitas
   - Perspektif disabilitas
   - Penanganan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana
   - Desain dan arsitektur kota yang ramah bagi penyandang disabilitas
   - Penyusunan Action plan penataan aksesibilitas dan peningkatan pelayanan bagi disabilitas

c) Diklat Kepemimpinan Kepala Sekolah 6 jenis antara lain :
   - Pengembangan diri kepala sekolah berbasis integritas
   - Kepemimpinan menggerakkan
   - Manajemen perubahan dan inovasi
   - Membangun jejaringan kerja
   - Pemanfaatan TIK dalam Pendidikan
   - Kewirausahaan Kepala Sekolah

3) Pengembangan e-learning telah selesai dilaksanakan dengan capaian 5 jenis diklat antara lain :
   a) Modul Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (revisi)
   b) Modul Diklat Revolusi Mental
   c) Diklat Diklat Bendahara Pengeluaran

d) E-Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa (Perencanaan Pengadaan, Tata Cara dan Strategi Analisa Pasar, Penyusunan Spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri(HPS), Kualifikasi Penyedia Jasa, Penyusunan Kebutuhan dan Anggaran, Pelaksanaan Evaluasi Penyedia dan Dokumen Penawaran)
e) E-Bimtek campuran (Overview Pelayanan Terpadu bagi, Pelayanan Sepenuh hati bagi Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilias, Penyusunan Konten Media Sosial, Penyusunan Rencana Strategis, Desain dan Arsitektur Kota yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pengelolaan Perpustakaan, Manajemen Proyek Strategis, Inventarisasi Pengelolaan BMG).

4) Akrediasi Kediklatan telah selesai dilaksanakan dengan capaian 4 jenis diklat antara lain :
   a) Diklat Bendahara Pengeluaran
   b) Diklat Bendaharan Penerimaan
   c) Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual
   d) Diklat Penatausahaan Keuangan

5) Knowledge Management telah selesai dilaksanakan dengan capaian 5 rumpun antara lain :
   a) CoP Kediklatan;
   b) CoP Pemerintahan;
   c) CoP Kesehatan (BLUD);

d) CoP Pendidikan;
e) CoP Keuangan

6) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Dalam Rangka Sertifikasi Profesi telah selesai dilaksanakan dengan capaian 4 Standar Kompetensi Jabatan untuk Sertifikasi Profesi antara lain :
   a) Skema Jabatan
   b) Skema Pengelola Rusun
   c) BLUD
   d) Petugas Pelaksana Lingkungan Hidup

7) Pelaksanaan Klinik Kompetensi telah selesai dilaksanakan dengan capaian 6 jenis antara lain :
   a) Merit system
   b) Uji kompetensi tenaga kesehatan
   c) Damkar
   d) Pembentukan LSP
   e) Penyusunan MoU dengan Kemendikbud
   f) Uji Coba dan bedah perangkat skema sertifikasi pelayanan prima

Tingkat Pencapaian pelaksanaan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 Sesuai pada table berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat	100 Persen dari 4000 orang (20% Target RPJMD)	100,0%
		Jumlah Konflik Sosial	38 kejadian konflik	38 kejadian konflik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2	Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya	Indeks Demokrasi	73,35 Poin	84.73 Poin
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	0	0
		Progres realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	100%	95,54%
		Penyampaian Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara tepat waktu	100%	100%
		Persentase progres sensus aset/barang inventaris OPD	100%	82%
		Persentase progres updating data strategis OPD pada Portal Data Jakarta sesuai tugas dan fungsi	7 Dataset	7 Dataset

Perda yang ditetapkan pada tahun 2018 sebanyak 11 dari 42 Raperda yang diajukan. Dari jumlah tersebut tidak ada Raperda yang dibatalkan.

Tabel 3.323 Daftar Perda Tahun 2018

Nomor Peraturan Daerah	Nama Peraturan Daerah
Perda Nomor 1 Tahun 2018	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Perda Nomor 2 Tahun 2018	Perpasaran
Perda Nomor 3 Tahun 2018	Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
Perda Nomor 4 Tahun 2018	Perindustrian
Perda Nomor 5 Tahun 2018	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Perda Nomor 6 Tahun 2018	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Perda Nomor 7 Tahun 2018	Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
Perda Nomor 8 Tahun 2018	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Nomor Peraturan Daerah	Nama Peraturan Daerah
Perda Nomor 9 Tahun 2018	Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah)
Perda Nomor 10 Tahun 2018	Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah)
Perda Nomor 11 Tahun 2018	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sumber : Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Fungsi Penunjang pada Provinsi DKI Jakarta, dapat terlihat pada Tabel berikut :

NO	NAMA URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PERENCANAAN	121,866,238,802	113,714,652,125	93.31
2	KEUANGAN	4,429,597,434,745	1,273,720,323,645	28.75
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	288,393,539,917	261,892,607,874	90.81
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3,481,007,800	70,400,000	2.02
5	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	148,607,226,903	135,116,497,225	90.92
6	FUNGSI LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1,747,552,453,470	1,568,674,206,359	89.76

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 mencapai 93,07% dari target penerimaan Rp 65.809.931.722.844,00 yaitu sebesar Rp 61.250.152.195.102,00. Realisasi APBD selengkapnya sebagaimana pada berikut :

Tabel 3.324
Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta
Tahun anggaran 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi		Bertambah / (Berkurang) (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6 (4-3)
A.	**PENDAPATAN**				
1.	Pendapatan Asli Daerah	44.350.077.858.844	43.340.601.994.544	97,72	(1.009.475.864.300)
2.	Penerimaan Dana Perimbangan	21.401.857.864.000	17.855.177.072.924	83,43	(3.546.680.791.076)
3.	Lain-lain Pendapatan Yg Sah	57.996.000.000	54.373.127.634	93,75	(3.622.872.366)

	Jumlah	**65.809.931.722.844**	**61.250.152.195.102**	**93,07**	**(4.559.779.527.742)**
B	**BELANJA**				
1.	**Belanja Tidak Langsung**	**34.081.435.869.027**	**27.786.146.868.735**	**81,53**	**(6.295.289.000.292)**
	· Belanja Pegawai	20.426.209.409.000	19.207.005.602.368	94,03	(1.219.203.806.632)
	· Belanja Bunga	51.000.000.000	44.048.569.889	86,37	(6.951.430.111)
	· Belanja Subsidi	4.210.500.000.000	2.640.949.492.360	62,72	(1.569.550.507.640)
	· Belanja Hibah	1.889.296.992.994	1.477.749.741.459	78,22	(411.547.251.535)
	· Belanja Bantuan Sosial	4.183.520.562.000	4.068.195.900.000	97,24	(115.324.662.000)
	· Belanja Bantuan Keuangan	364.487.512.200	346.273.033.100	95,00	(18.214.479.100)
	· Belanja Tidak Terduga	2.956.421.392.833	1.924.529.559	0,07	(2.954.496.863.274)
2.	**Belanja Langsung**	**41.012.395.391.186**	**33.735.159.684.557**	**82,26**	**(**7.277.235.706.629**)**
	· Belanja Pegawai	3.094.441.452.578	2.655.821.492.542	85,83	(438.619.960.036)
	· Belanja Barang dan Jasa	20.479.877.008.398	16.982.017.570.295	82,92	(3.497.859.438.103)
	· Belanja Modal	17.438.076.930.210	14.097.320.621.720	80,84	(3.340.756.308.490)
	Belanja Daerah	**75.093.831.260.213**	**61.521.306.553.292**	**81,93**	**(13.572.524.706.921)**
C	**PEMBIAYAAN**				
1	Penerimaan Pembiayaan	**17.452.307.127.533**	**17.432.702.406.581**	**99,89**	(19.604.720.952)
2	Pengeluaran Pembiayaan	**8.168.407.590.164**	**7.504.097.432.530**	**91,87**	(664.310.157.634)
	SILPA		**9.657.450.615.861**		
	APBD	**83.262.238.850.377**			

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

Beberapa catatan perbandingan mengenai Pengelolaan APBD 2009-2018.

8) Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2018 sebesar 58,01% dari Total Belanja APBD sebesar Rp 75.093.831.260.213,00 dengan rincian urusan sebagai berikut.

a) Pendidikan : Rp 21.013.424.987.891
b) Kesehatan : Rp 10.014.402.268.523
c) Pekerjaan Umum & PR : Rp 8.549.403.820.818
d) Perumahan Rakyat : Rp 2.902.112.756.777
e) Trantibumlinmas : Rp 2.425.850.063.909
f) Sosial : Rp 740.856.401.010

JUMLAH **Rp 45.646.050.298.928**

No	Tahun	APBD (Rp)	Belanja Pelayanan Dasar (Rp)	%
1.	2009	23.594.857.431.915	11.048.332.574.481	46,83
2.	2010	26.230.179.402.534	16.932.092.883.059	64.55
3.	2011	30.922.361.719.302	18.808.451.255.551	60,82
4.	2012	38.366.680.073.841	23.338.180.860.638	60,83
5.	2013	46.578.865.629.904	27.934.010.981.312	55,58
6	2014	63.650.106.383.473	41.197.378.678.186	56,51
7.	2015	59.685.552.609.233	35.222.678.096.291	59,01
8.	2016	57.365.040.315.366	34.176.307.037.448	59,58
9.	2017	71.823.575.363.258	32.753.604.679.716	45,60
10	2018	75.093.831.260.213	45.646.050.298.928	60,79

9) Perbandingan anggaran urusan Pendidikan dan Kesehatan dengan Belanja APBD

No	Tahun	APBD (Rp)	Belanja Pendidikan dan Kesehatan (Rp)	%
1.	2009	23.594.857.431.915,00	4.495.864.834.280,00	19,05
2.	2010	26.230.179.402.534,33	9.744.036.094.493,00	37,15
3.	2011	30.922.361.719.302,38	10.992.713.098.079,00	35,55
4.	2012	38.366.680.073.841,00	13.670.019.206.941,00	35,63
5.	2013	46.578.865.629.904,00	17.690.186.749.728,00	35,19
6	2014	63.650.106.383.473,00	23.701.439.743.152,00	37,24
7	2015	59.685.552.609.233,00	17.812.809.848.664,00	29,84
8.	2016	57.365.040.315.366,00	19.910.170.330.365,00	34,71
9.	2017	71.823.575.363.258,00	23.883.226.841.526,00	33,25
10	2018	75.093.831.260.213,00	31.027.827.256.414,00	41,32

10) Dana Perimbangan yang terserap Tahun 2009-2018

No	Tahun	Alokasi Dana Perimbangan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2009	9.008.400.000.000,00	8.650.835.929.772,00	96,03
2.	2010	10.006.090.000.000,00	9.537.609.058.087,00	95,32

No	Tahun	Alokasi Dana Perimbangan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.	2011	8.658.411.159.801,00	9.149.708.963.289,00	105,67
4.	2012	9.776.877.857.000,00	11.554.964.807.804,00	118,19
5.	2013	10.547.537.223.090,00	9.387.539.401.653,00	89,00
6	2014	17.770.000.000.000,00	9.677.533.225.272,00	54,46
7	2015	12.995.465.925.000,00	5.887.267.644.697,00	45,30
8.	2016	15.990.368.025.994,00	15.271.661.452.714,00	95,51
9.	2017	18.696.340.600.000,00	18.969.291.389.929,00	101,46
10.	2018	21.401.857.864.000,00	17.855.177.072.924,00	83,43

- DAU yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018

No	Tahun	APBD (Rp)	DAU (Rp)	%
1.	2009	19.371.835.508.395,00	0,00	0,00
2.	2010	22.963.351.075.250,00	0,00	0,00
3.	2011	26.845.693.060.531,00	209.909.442.000,00	0,78
4.	2012	33.650.011.958.617,00	275.327.857.000,00	0,82
5.	2013	40.799.864.826.912,00	299.182.466.000,00	0,73
6	2014	65.042.099.407.000,00	85.985.282.000,00	0,13
7	2015	56.309.238.000.000,00	0,00	0,00
8.	2016	57.161.248.465.732,00	0,00	0,00
9.	2017	0,00	0,00	0,00
10.	2018	0,00	0,00	0,00

- Perbandingan belanja langsung APBD dari Total Belanja APBD Tahun 2009-2018

No	Tahun	APBD (Rp)	Belanja (Rp)	%
1.	2009	23.594.857.431.915,00	16.763.570.859.733,00	71,05
2.	2010	26.230.179.402.534,33	17.551.732.922.015,00	66,91
3.	2011	30.922.361.719.302,38	16.796.252.566.473,00	54,32
4.	2012	38.366.680.073.841,00	19.885.620.794.407,00	51,83
5.	2013	46.578.865.629.904,00	31.609.905.465.946,00	67,86
6	2014	63.650.106.383.473,00	46.524.935.359.879,00	73,09
7	2015	59.685.552.609.233,00	22.325.834.524.849,00	37,41
8.	2016	57.365.040.315.366,00	31.004.340.790.717,00	54,05
9.	2017	51.043.030.955.776,00	27.305.210.224.908,00	53,49
10.	2018	61.521.306.553.292,00	33.735.159.684.557,00	54,83

- Rencana PAD APBD Tahun 2018 sebesar Rp44.350.077.858.844,00 atau 67,39% dari Total

Rencana Pendapatan dalam APBD Tahun 2018, sebesar Rp65.809.931.722.844,00

No	Tahun	APBD (Rp)	TARGET PAD (Rp)	%
1.	2009	19.371.835.508.395,00	10.363.435.508.395,00	53,50
2.	2010	22.963.351.075.250,00	12.315.398.272.250,00	53,63
3.	2011	26.845.693.060.531,00	16.280.133.657.370,00	60,64
4.	2012	33.650.011.958.617,00	20.523.433.370.351,00	60,99
5.	2013	40.799.864.826.912,00	26.304.097.561.000,00	64,47
6	2014	65.042.099.407.000,00	39.757.308.437.000,00	61,13
7	2015	56.309.238.000.000,00	37.965.616.304.000,00	67,42
8.	2016	57.161.248.465.732,00	38.501.784.839.738,00	67,35
9.	2017	62.517.744.026.535,00	41.687.387.826.535,00	66,68
10.	2018	65.809.931.722.844,00	44.350.077.858.844,00	67,39

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2009-2018

No	Tahun	Opini BPK	Keterangan
1.	2009	WDP	-
2.	2010	WDP	-
3.	2011	WTP	-
4.	2012	WTP	-
5.	2013	WDP	-
6.	2014	WDP	-
7.	2015	WDP	-
8.	2016	WDP	-
9.	2017	WTP	-
10.	2018	-	Belum terdapat penilaian

- SILPA Tahun 2009-2018.

No	Tahun	APBD (Rp)	Belanja (Rp)	%
1.	2009	23.594.857.431.915,00	4.446.373.058.586,11	18,84
2.	2010	26.230.179.402.534,33	3.748.512.147.298,33	14,29
3.	2011	30.922.361.719.302,38	4.911.196.018.129,38	15,88
4.	2012	38.366.680.073.841,00	6.470.618.490.508,20	16,87
5.	2013	46.578.865.629.904,00	9.463.721.530.814,00	20,32
6.	2014	63.650.106.383.473,00	7.593.994.776.473,00	11,93
7.	2015	59.685.552.609.233,00	9.160.897.609.233,00	15,35
8.	2016	57.365.040.315.366,00	7.688.315.869.811,00	13,40
9.	2017	71.823.575.363.258,00	12.497.577.878.386,00	17,40
10.	2018	83.262.238.850.377,00	9.657.450.615.861,00	11,60

- Realisasi PAD Tahun 2018, sebesar Rp43.340.601.994.544,00 atau 70,76% dari Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2018, sebesar Rp65.809.931.722.844,00

No	Tahun	APBD (Rp)	PAD (Rp)	%
1.	2009	19.371.835.508.395,00	10.601.057.958.783,30	54,72
2.	2010	22.963.351.075.250,00	12.315.398.272.250,00	53,63
3.	2011	26.845.693.060.531,00	17.825.987.294.430,80	66,40
4.	2012	33.650.011.958.617,00	22.091.077.374.004,03	65,65
5.	2013	40.799.864.826.912,00	26.849.324.753.236,00	65,81
6.	2014	65.042.099.407.000,00	31.277.329.814.932,00	48,09
7.	2015	56.309.238.000.000,00	33.690.978.069.694,00	59,83
8.	2016	57.161.248.465.732,00	37.153.774.645.542,20	64,99
9.	2017	62.517.744.026.535,00	43.211.576.966.867,00	69,12
10.	2018	65.809.931.722.844,00	43.340.601.994.544,00	65,86

- Realisasi Belanja Tahun 2018, sebesar Rp61.521.306.553.292,00 atau 81,93% dari Total Belanja dalam APBD Tahun 2018, sebesar Rp75.093.831.260.213,00.

No	Tahun	APBD (Rp)	Belanja (Rp)	%
1.	2009	23.594.857.431.915,00	19.511.099.430.822,10	82,69
2.	2010	26.230.179.402.534,33	21.552.895.838.935,00	82,17
3.	2011	30.922.361.719.302,38	26.423.599.893.297,00	85,45
4.	2012	38.366.680.073.841,00	31.609.017.861.145,00	82,39
5.	2013	46.578.865.629.904,00	38.294.384.858.471,00	82,21
6.	2014	63.650.106.383.473,00	37.764.668.506.957,00	59,33
7.	2015	59.685.552.609.233,00	43.037.809.732.739,00	72,11
8.	2016	57.365.040.315.366,00	47.155.845.569.881,00	82,20
9.	2017	61.821.923.000.480,00	51.043.030.955.776,00	82,56
10.	2018	75.093.831.260.213,00	61.521.306.553.292,00	81,93

- Realisasi PAD 2009-2018

No	Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%
1.	2009	10.363.435.508.395,00	10.601.057.958.783,30	102,29
2.	2010	12.315.398.272.250,00	12.891.992.182.041,05	104,68
3.	2011	16.280.133.657.370,00	17.825.987.294.430,80	109,50
4.	2012	20.523.433.370.351,00	22.091.077.374.004,03	107,64

5.	2013	26.304.097.561.000,00	26,849,324,753,236,00	102,07
6.	2014	39.757.308.437.000,00	31.277.329.814.932,00	78,67
7.	2015	37.965.616.304.000,00	33.690.978.069.694,00	88,74
8.	2016	38.501.784.839.738,00	37.153.774.645.542,20	96,50
9.	2017	41.687.387.826.535,00	43.211.576.966.867,00	103,66
10.	2018	44.350.077.858.844,00	43.340.601.994.544,00	97,72

- Perkembangan PAD Tahun 2009-2018

No	Tahun	Nilai Realisasi PAD (Rp)	Kenaikan (%)	Keterangan
1.	2009	10.608.032.178.408,20	1,46	
2.	2010	12.891.992.182.041,05	21,53	
3.	2011	17.825.987.294.430,80	38,27	
4.	2012	22.091.104.415.443,00	23,93	
5.	2013	26,849,324,753,236,00	21,54	
6.	2014	31.277.329.814.932,00	16,49	
7.	2015	33.690.978.069.694,00	7,72	
8.	2016	37.153.774.645.542,20	10,28	
9.	2017	43.211.576.966.867,00	16,30	
10.	2018	43.340.601.994.544,00	0,30	

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan penyelenggaraan Fungsi Penunjang dilakukan melalui Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah. Musrenbang tersebut bertujuan menyelaraskan usulan kegiatan dari setiap SKPD (RKA/Renja SKPD) dengan Program Daerah sesuai Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Tabel 3.325
Sikronisasi Perencanaan Program Fungsi Penunjang

No	SKPD/Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	Setda			
	• RKPD 2018	27	RKPD : RENJA SKPD	100
	• RENJA SKPD 2018	27	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2018	27	RKA : DPA	100
	• DPA 2018	27		
2	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta			
	• RKPD 2018	3	RKPD : RENJA SKPD	100

No	SKPD/Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
	• RENJA SKPD 2018	3	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2018	3	RKA : DPA	100
	• DPA 2018	3		
3.	BPKD			
	RKPD 2018	3	RKPD : RENJA SKPD	100
	RENJA SKPD 2018	3	RENJA SKPD : RKA	100
	RKA 2018	3	RKA : DPA	100
	DPA 2018	3		
4.	BKD			
	RKPD 2018	3	RKPD : RENJA SKPD	100
	RENJA SKPD 2018	3	RENJA SKPD : RKA	100
	RKA 2018	3	RKA : DPA	100
	DPA 2018	3		
5.	BPSDM			
	RKPD 2018	3	RKPD : RENJA SKPD	100
	RENJA SKPD 2018	3	RENJA SKPD : RKA	100
	RKA 2018	3	RKA : DPA	100
	DPA 2018	3		
6.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah			
	RKPD 2018	3	RKPD : RENJA SKPD	100
	RENJA SKPD 2018	3	RENJA SKPD : RKA	100
	RKA 2018	3	RKA : DPA	100
	DPA 2018	3		100
7	BAPPEDA			
	RKPD 2018	4	RKPD : RENJA SKPD	100
	RENJA SKPD 2018	4	RENJA SKPD : RKA	100
	RKA 2018	4	RKA : DPA	100
	DPA 2018	4		
8.	Sekretariat DPRD			
	RKPD 2018	5	RKPD : RENJA SKPD	100
	RENJA SKPD 2018	5	RENJA SKPD : RKA	100
	RKA 2018	5	RKA : DPA	100
	DPA 2018	5		
9.	BPAD			
	RKPD 2018	4	RKPD : RENJA SKPD	100
	RENJA SKPD 2018	4	RENJA SKPD : RKA	100
	RKA 2018	4	RKA : DPA	100
	DPA 2018	4		
10.	KESBANGPOL			
	RKPD 2018	2	RKPD : RENJA SKPD	100
	RENJA SKPD 2018	2	RENJA SKPD : RKA	100
	RKA 2018	2	RKA : DPA	100
	DPA 2018	2		
11	BP BUMD			
	RKPD 2018	3	RKPD : RENJA SKPD	100
	RENJA SKPD 2018	3	RENJA SKPD : RKA	100
	RKA 2018	3	RKA : DPA	100
	DPA 2018	3		
12	BPPBJ			
	RKPD 2018	2	RKPD : RENJA SKPD	100

No	SKPD/Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
	RENJA SKPD 2018	2	RENJA SKPD : RKA	100
	RKA 2018	2	RKA : DPA	100
	DPA 2018	2		100

Sumber : SKPD/UKPD Prov. DKI Jakarta 2018

Tabel 3.326 Capaian Kegiatan Fungsi Penunjang

No	SKPD dan Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kegiatan	%
1.	Setda	220	220	100
	a. Biro Tata Pemerintahan	15	15	100
	b. Biro Organisasi dan RB	20	20	100
	c. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	26	26	100
	d. Biro Hukum	16	16	100
	e. Biro Perekonomian	22	22	100
	f. Biro Umum	36	36	100
	g. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	21	21	100
	h. Biro Adiministrasi Sekretariat Daerah	19	19	100
	i. Biro Kesejahteraan Sosial	23	23	100
	j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	22	22	100
2.	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	26	26	100
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	41	…	-
4.	Badan Kepegawaian Daerah	43	43	100
5.	BPSDM	70	70	100
6.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	270	268	99,26
7	BAPPEDA	51	51	100
8.	Sekretariat DPRD	79	79	100
9.	KESBANGPOL	115	115	100
10.	BP BUMD	23	23	100
11	BPBJ	19	19	100
12	BPAD	74	68	91,89
Jumlah				

Sumber : SKPD/UKPD masing-masing, 2018

g. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.327 Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Fungsi Penunjang

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	SKPD										Jumlah
		Setda	Insp	Wilayah	BPKD	BKD	BPSDM	BPRD	Setwan	BPAD	BPPBJ	
1.	Papan Pengumuman	2	2	21	14	2	1	2	11	-	8	137
2.	Kotak Pengaduan	-	1	11		1	-	1	-	1	-	338
3.	Leaflet	1	-	,			1	7	-	-	-	328
4.	Mobil Keliling	-	-	9			-	5	-	-	-	23
5.	Media Masa	-	-				-	4	1	-	-	8
6.	Website	1	1	3		1	1	1	1	1	-	14
7.	E-mail	1	2	20	1	1	1	1	1	1	-	32
8.	Call Center	1	-	6			-	2	-	1	-	11

Sumber : SKPD/UKPD Prov. DKI Jakarta

h. Permasalahan dan solusi

Dalam pelaksanaan Fungsi Penunjang terdapat permasalahan khususnya pada aspek perencanaan, antara lain :

1. Evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah belum dilaksanakan secara berkala dan optimal.
2. Tugas penelitian dan pengembangan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena ukuran unit kerja yang melaksanakan tugas tersebut sangat kecil yaitu berada di level eselon IV.
3. Belum optimalnya pembinaan terhadap OPD tentang perencanaan pembangunan, hal ini terlihat dari kemampuan OPD dalam membuat Cascading Kinerja dari Renstra ke Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV

Dari beberapa permasalahan tersebut, Bappeda Provinsi DKI Jakarta berupaya melakukan pencegahan antara lain dilakukan dengan :

1. Menyusun SOP untuk proses perencanan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Membangun sistem yang diperlukan untuk proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan guna tranparansi dan kemudahan dalam mengontrol ketiga proses tersebut. Pada Tahun 2017 dibangun sistem SIPJMD (Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah Daerah) untuk perencanaan pembangunan 5 tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dan Rencana Stategis SKPD (Renstra).
2. Mengevaluasi struktur organisasi Bappeda dan akan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.
3. Meningkatkan pembinaan terhadap OPD tentang perencanaan pembangunan melalui bimbingan teknis dan pelatihan

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Tahun 2017 – 2022, terdapat pelaksanaan Fungsi Kewilayahan untuk mengakomodir pelaksanaan program dan kegiatan pada Kabupaten dan Kota Administrasi. Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI bahwa Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, lembaga Teknis Daerah, Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

Diperlukan indikator tersendiri dari Pemerintah Pusat sebagai acuan Provinsi DKI Jakarta untuk mengakomodir pelaporan fungsi kewilayahan yang dilaksanakan oleh tingkat Kota

Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sampai ke tingkat kelurahan.

Penghargaan yang diraih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil dari Pemerintah Pusat selama tahun 2018 tertuang dalam lampiran penghargaan pada Lampiran Indikator Kinerja Kunci.

E. Fungsi Kewilayahan

Sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Otonomi tunggal di tingkat Provinsi sehingga Kota dan Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta sebagai Perangkat Daerah dan bukan merupakan daerah otonom.

a. Perangkat Daerah Pelaksana :

1. Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

b. Program dan kegiatan Fungsi Kewilayahan Tahun 2018 sesuai dengan table berikut :

Tabel 3.328 Program dan kegiatan Fungsi Kewilayahan

No	SKPD dan Program	Jumlah Kegiatan
	Fungsi Kewilayahan	
	5 Wilayah Kota dan 1 Kabupaten	
a.	**Jakarta Pusat**	**1.323**
	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	667
	2. Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat	16
	3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	484

	4. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional	106
	5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	50
b.	**Jakarta Timur**	**1.570**
	1. Program Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur	819
	2. Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur	24
	3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Timur	685
	4. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Timur	131
	5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur	72
c.	**Jakarta Selatan**	**1.644**
	1. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan	152
	2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan	734
	3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	965
	4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Adm Jakart Selatan	16
d.	**Jakarta Barat**	**1.440**
	1. Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Adm. Jakarta Barat	602
	2. Penyelenggaraan Kota Adm. Jakarta Barat	22
	3. Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Adm. Jakarta Barat	230
	4. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Adm. Jakarta Barat	64
	5. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Adm. Jakarta Barat	820
e.	**Jakarta Utara**	**788**
	1. Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Utara	75
	2. Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Utara	350
	3. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara	34
	4. Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara	16
	5. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara	466
f.	Kepulauan Seribu	251
	1. Program Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	37
	2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	84

C.	3. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	14
	4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	108
	5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	8
	...	
	Jumlah Total	**6.916**

C. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel 3.329 Tabel Kepegawaian Fungsi Kewilayahan

No	Kualifikasi	WILAYAH					
		WJP	WJU	WJT	WJS	WJB	KEP.SERIBU
A.	**Golongan**	736	**255**	**4600**	**285**	**269**	**150**
	1. Gol. IV	111	52	305	26	29	17
	2. Gol. III	490	186	3351	223	190	127
	3. Gol. II	129	17	895	34	49	6
	4. Gol. I	6	0	49	2	1	
B.	**Eselon**	**854**	**255**	**4600**	**285**	**269**	**150**
	1. Eselon I	4	0	0	0	0	
	2. Eselon II	23	1	18	2	0	1
	3. Eselon III	40	13	178	10	13	2
	4. Eselon IV	117	10	1718	36	39	16
	5. Eselon V		0	0	0	0	
	6. Fungsional	7	115	4	0	13	0
	7. Pelaksana	663	116	2682	237	204	131
C.	**Pendidikan**	**852**	**255**	**4600**	**285**	**269**	**150**
	1. S3	6	0	2	2	0	0
	2. S2	110	57	398	27	45	18
	3. S1	248	150	1.658	167	116	99
	4. Diploma	39	10	469	36	31	12
	5. SLTA	413	36	1871	50	75	21
	6. SLTP	23	0	134	1	2	0
	7. SD	13	2	68	2	0	0

Pejabat pelaksana Fungsi Kewilayahan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.330 Tabel Kesesuaian Jabatan pada fungsi kewilayahan

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	**WJP**					
	Eselon II	3	3	3	0	3
	Eselon III	27	27	27	23	27
	Eselon IV	292	271	271	202	271
	Jumlah	**322**	**301**	**301**	**225**	**301**
2	**WJB**					
	Eselon II	3	3	3	1	3
	Eselon III	27	24	24	19	24
	Eselon IV	352	334	3334	157	334
	Jumlah	382	361	361	177	361
3	**Kepulauan seribu**					
	Eselon II	3	3	3	3	3
	Eselon III	12	10	10	10	10
	Eselon IV	60	60	60	39	60
	Jumlah	**75**	**73**	**73**	**52**	**73**
4	**WJT**					
	Eselon II	3	**3**	**3**	1	3
	Eselon III	31	25	24	23	25
	Eselon IV	409	384	330	260	382
	Jumlah	**443**	**412**	**357**	**283**	**410**
5	**WJU**					
	Eselon II	3	3	3	3	3
	Eselon III	23	23	23	20	23
	Eselon IV	215	207	191	154	207
	Jumlah	**241**	**233**	**217**	**177**	**233**
6	**WJS**					
	Eselon II	3	3	3	1	3
	Eselon III	31	29	29	28	29
	Eselon IV	409	381	379	291	379
	Jumlah	443	413	411	320	411

d. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fungsi Kewilayahan

Capaian pada RKPD tahun 2018 untuk fungsi kewilayahan sebagai besar belum dapat mencapai target yang telah ditetapkam dalam indikator program pada RPJMD tahun 2017-2022. Survei IKM yang dinilai oleh masyarakat pada aspek pelayanan yaitu :

1) Pelayanan PPSU
2) Pelayanan Ketertiban Umum
3) Pelayanan Posyandu

4) Pelayanan Jumantik
5) Pelayanan PKK
6) Pelayanan RPTRA

Tabel 3.331 Survei IKM Kota/Kab Adm. Tahun 2018

No	SKPD	Program	Indikator Program	Target Capaian	Realisasi Capaian
				Indikator Program	Indikator Program
1	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi	85%	82,26%
			Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	90%	82,26%
2	Kota Administrasi Jakarta Utara	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi	100%	84,35%
			Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	100%	84,35%
3	Kota Administrasi Jakarta Barat	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi	85%	85,35%
			Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	80%	85,35%
4	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi	100%	83,28%
			Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	100%	83,28%
5	Kota Administrasi Jakarta Timur	Program penyelenggaraan kota administrasi Jakarta Timur	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi	100%	81,54%
			Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	100%	81,54%
6	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Program Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kabupaten Administrasi	80%	86,02%
			Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	80%	86,02%

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Fungsi Penunjang pada Provinsi DKI Jakarta, dapat terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.332 Alokasi dan realisasi anggaran Fungsi Kewilayahan tahun 2018

NO	NAMA URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	KEWILAYAHAN	**5,147,813,162,191**	**4,752,984,704,830**	**92.33**
1	Kota Adm. Jakarta Pusat	763,132,187,959	701,957,323,242	91.98
2	Kota Adm. Jakarta Utara	782,481,842,577	719,456,372,581	91.95
3	Kota Adm. Jakarta Selatan	108,779,541,075	1,035,118,144,579	90.51
4	Kota Adm. Jakarta Barat	1,041,232,631,127	942,465,765,400	93.36
5	Kota Adm. Jakarta Barat	1,273,057,263,635	1,197,827,323,104	94.09
6	Kab. Adm. Kepulauan Seribu	179,129,695,818	156,159,775,924	87.18

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan penyelenggaraan Fungsi Kewilayahan dilakukan melalui Musrenbang Kelurahan dan berjenjang sampai tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah. Musrenbang tersebut bertujuan menyelaraskan usulan dan masukan dari masyarakat dengan Program Daerah sesuai Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Tabel 3.333 Sikronisasi Perencanaan Program Fungsi Kewilayahan

No	SKPD/Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	5 Wilayah Kota + 1 Kab			
	RKPD 2018	29	RKPD : RENJA SKPD	100
	RENJA SKPD 2018	29	RENJA SKPD : RKA	100
	RKA 2018	29	RKA : DPA	100
	DPA 2018	29		
2	Walikota Jakarta Timur			
	RKPD 2018	5	RKPD : RENJA SKPD	100
	RENJA SKPD 2018	5	RENJA SKPD : RKA	90,90
	RKA 2018	5	RKA : DPA	100
	DPA 2018	5		

3	Walikota Jakarta Pusat			
	RKPD 2018	5	RKPD : RENJA SKPD	100
	RENJA SKPD 2018	5	RENJA SKPD : RKA	100
	RKA 2018	5	RKA : DPA	100
	DPA 2018	5	RKPD : RENJA SKPD	100
4	Walikota Jakarta Utara			
	RKPD 2018	5	RKPD : RENJA SKPD	100
	RENJA SKPD 2018	5	RENJA SKPD : RKA	100
	RKA 2018	5	RKA : DPA	100
	DPA 2018	5		
5	Walikota Jakarta Barat			
	RKPD 2018	5	RKPD : RENJA SKPD	100
	RENJA SKPD 2018	5	RENJA SKPD : RKA	100
	RKA 2018	5	RKA : DPA	100
	DPA 2018	5		
6	Walikota Jakarta Selatan			
	RKPD 2018	4	RKPD : RENJA SKPD	90
	RENJA SKPD 2018	4	RENJA SKPD : RKA	100
	RKA 2018	4	RKA : DPA	100
	DPA 2018	4		
7	Kepulauan Seribu			
	RKPD 2018	5	RKPD : RENJA SKPD	100
	RENJA SKPD 2018	5	RENJA SKPD : RKA	100
	RKA 2018	5	RKA : DPA	100
	DPA 2018	5		

Tabel 3.334 Capaian Kegiatan Fungsi Kewilayahan

No	SKPD dan Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kegiatan	%
	5 Wilayah Kota + 1 Kabupaten			
1	Jakarta Pusat	1323	1284	98
2	Jakarta Timur	1823	1823	100
3	Jakarta Selatan	1.644	1589	97,2
4	Jakarta Barat	1638	1638	100
5	Jakarta Utara	916	916	100
6	Kepulauan Seribu	251	244	97,21

g. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Fungsi Penunjang. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.335 Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Fungsi Kewilayahan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	SKPD							Jumlah
		Wilayah	WJB	WJP	WJS	WJT	WJU	KEP. SERIBU	
1.	Papan Pengumuman	2	65	4	1	4	4	-	80
2.	Kotak Pengaduan	-	62	-	1	-	-	-	63
3.	Leaflet	1	40	-	-	-	-	-	41
4.	Mobil Keliling	-	**1**	-	-	-	-	-	1
5.	Media Masa	-	4	-	2	-	-	-	6
6.	Website	1	2	1	1	1	1	-	7
7.	E-mail	1	3	-	1	-	1	-	6
8.	Call Center	1	1	-	-	-	-	-	2

h. Permasalahan dan solusi

Dalam pelaksanaan Fungsi Kewilayahan secara keseluruhan tahun 2018 terlaksana dengan baik. Kota dan Kabupaten yang bersifat administrasi bukan daerah otonom yang melaksanakan sebagaian kewenangan urusan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan hanya bersifat rutin dan koordinatif.

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Tahun 2017 – 2022, terdapat pelaksanaan Fungsi Kewilayahan untuk mengakomodir pelaksanaan program dan kegiatan pada Kabupaten dan Kota Administrasi. Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI bahwa Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, lembaga Teknis Daerah, Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

Diperlukan indikator tersendiri dari Pemerintah Pusat sebagai acuan Provinsi DKI Jakarta untuk mengakomodir pelaporan fungsi kewilayahan yang dilaksanakan oleh tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sampai ke tingkat kelurahan.

Penghargaan yang diraih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil dari Pemerintah Pusat selama tahun 2018 tertuang dalam lampiran penghargaan pada Lampiran Indikator Kinerja Kunci.